



Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (R K P D)
Kabupaten Buru Selatan

2024





BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 24); 25.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 185 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buru Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Kabupaten Buru Selatan Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 Kabupaten Buru Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 satu tahun;
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun;
13. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
16. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
18. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output), dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (Impact).
25. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum dan sesudah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

BAB II
POKOK-POKOK PENYUSUNAN
Pasal 2

Ruang Lingkup RKPD adalah:

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, yang mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (5) terdiri dari :

Bab 1. Pendahuluan;

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab 3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab 7. Penutup

Uraian Bab I sampai Bab VII sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat ikut serta partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menyusun KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2024.

BAB III

PENYESUAIAN RKPD

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2024 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggunakan RKPD Tahun 2024 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

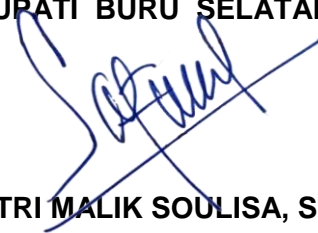
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada tanggal : 13 Juli 2023

BUPATI BURU SELATAN,



Hj. SAFITRI MALIK SOULISA, S.IP, M.Si

Diundangkan di : Namrole

Pada tanggal : 13 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH BURU SELATAN



Drs.UMAR MAHULETTE

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 14

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Aula Kantor Bupati Buru Selatan**, telah diselenggarakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Buru Selatan pada acara pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023;
2. Pemaparan Materi oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku dengan Tema "**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023**";
3. Pemaparan Materi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan dengan tema "**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023**";
4. Pemaparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan "**Satu Data Indonesia**";
5. Pemaparan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Buru Selatan "**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2023**."
6. Pemaparan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak "**Sinergitas Perencanaan Antara Pemerintah Desa Dan Pemerintah Daerah**"
7. Tanggapan, pertanyaan, dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh para narasumber;
8. Saran masukan pada diskusi Kelompok sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022

J a m : 16.00 WIT

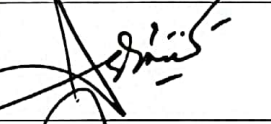

Tempat : Aula Kantor Bupati Buru Selatan

Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.
- KEDUA** : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- KETIGA** : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 untuk dijadikan sebagai rancangan akhir RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023.

**Mewakili Peserta Musrenbang RKPD
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023**

NO	Nama	Lembaga/ instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BERNADUS WAEMESSE, S.SosM	DPRD	ANGGOTA DPRD	
2.	Ir. HAKIM TUANAKOTA Msi	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS	
3.	IORIS LOCLATU SP. M si	DINAS PERTANIAN	KEPALA DINAS	
4.	MAJED LATUEONSIA	DINAS PENDAPATAN	KEPALA DINAS	
5.	AHMAD WAEL.S.TP SPd	KANTOR CAMAT WAESAMA	CAMAT	

**Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Buru Selatan**



H. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19621121 199103 1 003



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-9
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-10
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-14
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-26
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-47
2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-51
2.6. EVALUASI RKPD KABUPATEN BURU SELATAN	II-57
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-26
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-2
4.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2024	IV-13
4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024	IV-16
4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	IV-26
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V
5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024	V-1
5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2024	V-2
5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ...	V-3
5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	V-6
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI
6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	VI-1
6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024	VI-5
BAB. VII PENUTUP	VII
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	I-3
Tabel 1.2 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	I-4
Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	I-5
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan Selatan dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2022	II-3
Tabel 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru	II-5
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022	II-6
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022	II-6
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	II-7
Tabel 2.6 Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Buru Selatan	II-12
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020–2022	II-15
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018 – 2022	II-18
Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020-2022	II-19
Tabel 2.10 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2022 Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	II-20
Tabel 2.11 Analisis Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020	II-22
Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2017-2022	II-26
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2021	II-26
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022	II-27
Tabel 2.15 Tabel Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	II-28
Tabel 2.16 Tabel Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-29
Tabel 2.17 Tabel Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	II-29
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2022	II-30
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2021-2022	II-30
Tabel 2.20 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-30
Tabel 2.21 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-31
Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ...	II-31
Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-31
Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja	II-32
Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-33
Tabel 2.26 Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-33
Tabel 2.27 Skor PPH Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-33



Tabel 2.28	Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2021-2022	II-34
Tabel 2.29	Tabel Pemberian penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021-2022	II-34
Tabel 2.30	Tabel Cakupan Area Pelayanan Tahun 2021-2022	II-34
Tabel 2.31	Tabel Timbulan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/TPST/SPA Tahun 2021-2022	II-34
Tabel 2.32	Tabel Rasio Penduduk ber-KTP	II-35
Tabel 2.33	Tabel Rasio Bayi berakte Kelahiran	II-35
Tabel 2.34	Tabel Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2021-2022	II-35
Tabel 2.35	Tabel Database Skala Kabupaten Tahun 2021-2022	II-36
Tabel 2.36	Tabel KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2021-2022	II-36
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-36
Tabel 2.38	Tabel Indikator Kinerja Daerah Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-37
Tabel 2.39	Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-37
Tabel 2.40	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-38
Tabel 2.41	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-38
Tabel 2.42	Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-38
Tabel 2.43	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-39
Tabel 2.44	Persentase penduduk Kabupatenn Buru Selatan yang Menggunakan Handphone/Telepon Genggam Tahun 2021-2022	II-39
Tabel 2.45	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-40
Tabel 2.46	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-40
Tabel 2.47	Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021-2022	II-40
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM	II-40
Tabel 2.49	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-41
Tabel 2.50	Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-41
Tabel 2.51	Persentase Bidang Olahraga Tahun 2021-2022	II-42
Tabel 2.52	Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2022	II-42
Tabel 2.53	Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2021-2022	II-43
Tabel 2.54	Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-43
Tabel 2.55	Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-43
Tabel 2.56	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-44
Tabel 2.57	Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2022	II-44
Tabel 2.58	Tabel Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-45
Tabel 2.59	Tabel Target Capaian Urusan Pariwisata	II-45
Tabel 2.60	Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022	II-45
Tabel 2.61	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2021	II-46
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-46
Tabel 2.63	Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-47



Tabel 2.64	Daya Tersambung pada PT. PLN (Persero) Cabang/Ranting PLN tahun 2021-2022	II-48
Tabel 2.65	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Buru Selatan 2022	II-48
Tabel 2.66	Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-48
Tabel 2.67	Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-49
Tabel 2.68	Tabel Jenis-jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan Di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022	II-49
Tabel 2.69	Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-50
Tabel 2.70	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022	II-51
Tabel 2.71	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru	II-51
Tabel 2.72	Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022	II-57
Tabel 2.73	Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023	II-57
Tabel 3.1	Kondisi dan Target Perekonomian Nasional	III-8
Tabel 3.2	Kondisi dan Target Perekonomian Provinsi Maluku	III-10
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018 – 2022	III-16
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020–2022	III-17
Tabel 3.5	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020 -2022	III-18
Tabel 3.6	PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020-2022	III-19
Tabel 3.7	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2022	III-21
Tabel 3.8	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2022	III-22
Tabel 3.9	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan, 2018-2022	III-22
Tabel 3.10	Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan	III-26
Tabel 3.11	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022, Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	III-27
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022, Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	III-30
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022, Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	III-33
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	IV-7
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	IV-25
Tabel 4.3	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	IV-32
Tabel 5.1	Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	V-1
Tabel 5.2	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	V-3
Tabel 5.3	Rencana Program/Program yang Bersumber dari APBN Tahun 2024	V-6
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun Target 2024	VI-1



Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VI-5
Tabel 6.3	Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022	VI-16



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-8
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-spasial	I-9
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan Selatan	II-1
Gambar 2.2 Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan	II-2
Gambar 2.3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan	II-8
Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan	II-10
Gambar 2.5 Konsep Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan	II-11
Gambar 3.1 Visi Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan	III-5



DAFTAR DIAGRAM

	Hal.
Diagram 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	I-3
Diagram 2.1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022 di Kabupaten Buru Selatan	II-7
Diagram 2.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2022	II-14
Diagram 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022	II-22
Diagram 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Target RPJMD TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022	II-24
Diagram 2.5 Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022	II-25
Diagram 3.1 Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2022	III-18
Diagram 3.2 Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Buru Selatan (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2022	III-19
Diagram 3.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022	III-22
Diagram 3.4 Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022	III-23



DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2022 II-16
Grafik 2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022 II-16
Grafik 2.3	Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan Tahun 2018-2022 .. II-21
Grafik 2.4	Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Terhadap Provinsi Maluku, Nasional dan Target RPJMD Tahun 2021 II-23
Grafik 2.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2022 II-25
Grafik 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku III-11
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022 . III-15
Grafik 3.3	Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Terhadap Provinsi Maluku, Nasional dan Target RPJMD Tahun 2021 III-20
Grafik 3.4	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2018 – 2022 III-23
Grafik 3.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2022 III-24

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 dan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dengan fungsi mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
3. Arahan penyusunan RENJA dan RKA OPD
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah



7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.1.1. Proses Penyusunan

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan top-down/bottom-up, teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan Pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan membahas rancangan RKPD yang meliputi : (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah; (3) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; (4) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; (5) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
Rancangan akhir RKPD merupakan hasil penyelarasan Rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Buru, Rancangan RKPD Provinsi Maluku dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional.
6. Penetapan RKPD.
Penetapan RKPD adalah tahap akhir yang dilakukan setelah pembahasan/fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibahas di provinsi. Penetapan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Untuk memastikan bahwa output dari hasil penyusunan berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Buru tahun 2023 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJPD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dengan isu strategis
	Terwujudnya pembangunan konsistensi antara isu strategis dengan prioritas
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 dengan program/kegiatan OPD
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2023
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2023
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan

	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program dan output kegiatan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) – berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik- tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan proses penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down serta politik. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	Usulan dari Musrenbang desa dan kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Buru tahun 2024 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2024
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024
TEKNOKRATIK	dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Buru dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD
	Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
	Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020– 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Minimal (SPM) Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2018 tentang reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

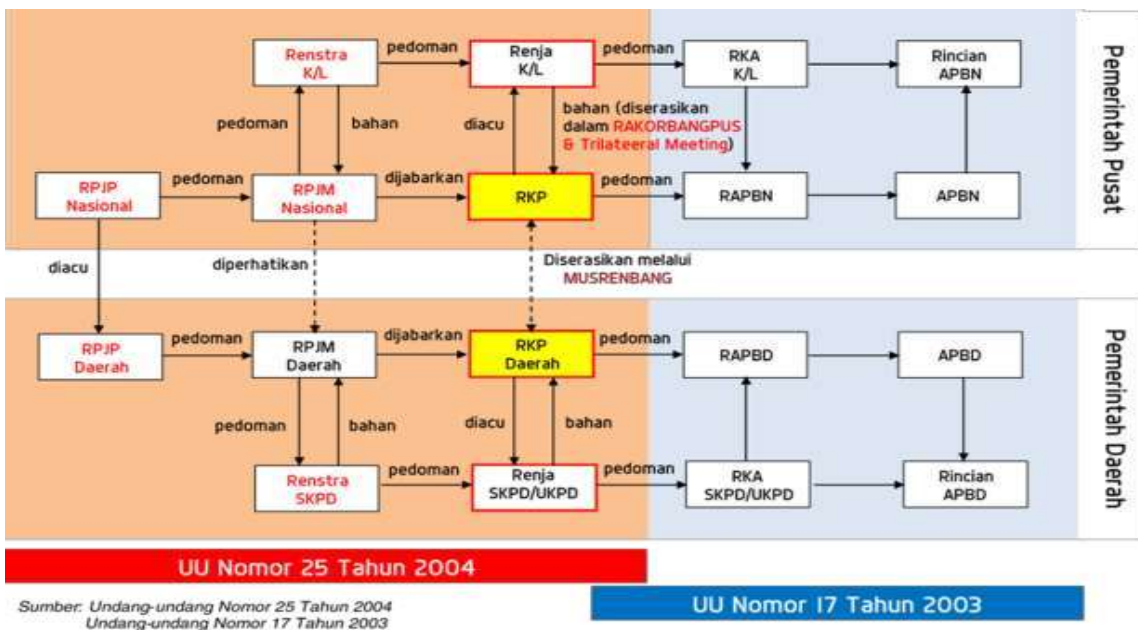
Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD, dimana Renja OPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum musrenbang nasional. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2024. Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen

lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2024.

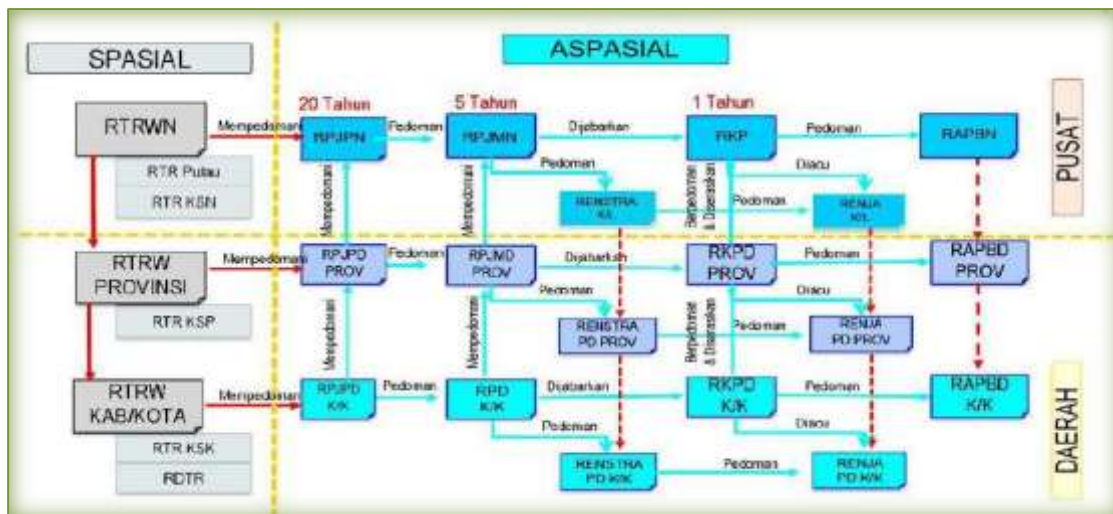
Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD (RenjaOPD).

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Disamping dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut diatas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Dimana dokumen-dokumen spasial tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD,RPJMD maupun RPD yang merupakan dokumen acuan dalam penyusunan RKPD sebagaimana dijabarkan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-spasial



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan /pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2024. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menciptakan kepastian kebijakan dan kepatutan perencanaan karena merupakan komitmen pembangunan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target perjanjian kinerja (perkin) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024;
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, dan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive, dan kondusif, dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
7. Merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD Tahun 2024;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD tahun 2024;

1.5. SISTIMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra OPD, Renja OPD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisi uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

Menjelaskan secara umum kondisi daerah dari Aspek Geografi yang mencakup pendekatan keruangan, kelingkungan dan kompleks kewilayahan serta Aspek Demografi yang mencakup keadaan dan komposisi penduduk di Kabupaten Buru Selatan.

- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menjelaskan tentang Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang difokuskan pada Pemerataan Ekonomi dan Pemerataan Sosial.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan tentang segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah
Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan arah kebijakan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan hubungan visi dan misi dan tujuan, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2001-2026.
- 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2024
Menjelaskan Isu Global dan Isu Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024.
- 4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
Menjelaskan isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021–2026 pada tahun berkenaan.

4.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menjelaskan tentang hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD yang disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Menjelaskan Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

5.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dengan mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.3. Rencana Pendanaan Dan Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan tentang Rencana Pendanaan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

5.4. Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2024

Menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2024 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2024.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.



6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan suatu wilayah. Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah, untuk mengetahui aspek geografi dan demografi dalam menyusun perencanaan untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal pada suatu wilayah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

Secara Astronomis, Kabupaten Buru Selatan terletak antara 2°30' Lintang Selatan dan 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' Bujur Timur dan 127°00' Bujur Timur (Gambar 2.1) dan terletak di jalur utama lalu lintas Laut (Tol Laut) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III), seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar: 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan

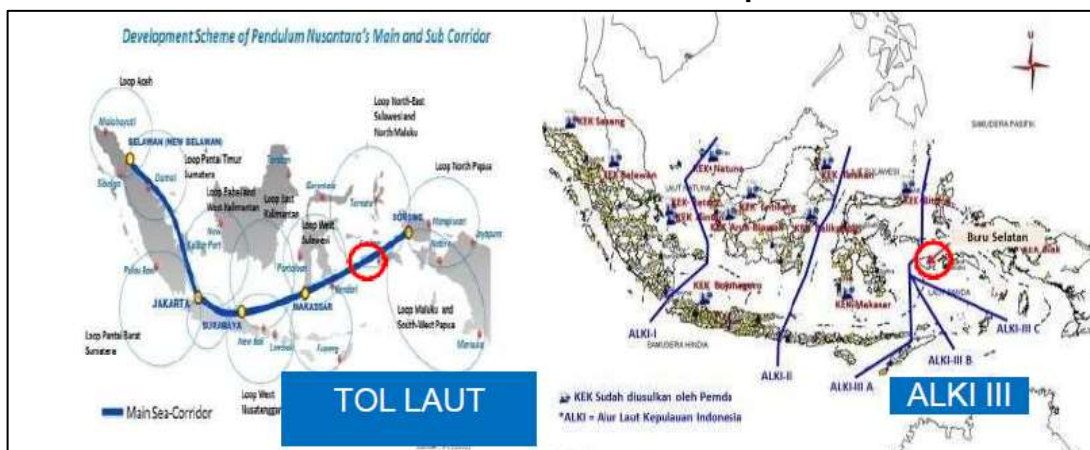


Sumber : Bagian Pemerintahan (Setda) Kab. Buru Selatan, 2023

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan di Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Seram, Laut Banda di sebelah Selatan dan Barat, serta Selat Manipa dan Kabupaten Buru di sebelah Timur. Kabupaten Buru Selatan memiliki luas sekitar 3.780,56 km² dan wilayahnya meliputi sebagian dari Pulau Buru dan pulau-pulau lain di sekitarnya, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Kondisi Geostrategis dan Geopolitik Kabupaten Buru Selatan dalam peran strategisnya secara nasional dan internasional berada pada posisi strategis jalur lintas alur kepulauan Indonesia ALKI III. UNCLOS 1982 ratifikasi undang-undang 17 tahun 1985 memberikan

penguatan peran terhadap posisi jalur ALKI III dimana Kabupaten Buru Selatan berada pada alur lintas kapal internasional yang bila dikembangkan akan dapat memanfaatkan peluang ini sebagai potensi ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kawasan di Indonesia timur. Untuk mendorong aktifitas arus barang dari pusat produksi di Kabupaten Buru Selatan jalur transportasi nasional yang dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan dan sistim tata transportasi wilayah yang mengkoneksikan wilayah Buru Selatan dengan pasar di wilayah Sulawesi dan Jawa telah dikembangkan Tol Laut sebagai stabilisator harga untuk memberikan nilai ekonomi terhadap setiap kebutuhan konsumsi dan hasil produksi masyarakat yang dijual ke pasar. Jalur laut ALKI III dan tol laut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar. 2.2. Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan



2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan 3.780,56 Km² terbagi menjadi 6 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Adapun batas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Timur : Kabupaten Buru dan Selat Manipa
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Banda

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa
1.	Leksula	Leksula	1.419,29	19
2.	Kepala Madan	Biloro	953,36	16
3.	Waesama	Wamsisi	540,93	11
4.	Namrole	Elfule	243,57	17
5.	Ambalau	Siwar	228,63	7
6.	Fena Fafan	Waekatin	394,78	11
Total			3.780,56	81

Sumber : Bagian Pemerintahan (Setda) Buru Selatan, 2023

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara fisiografi (makro relief), bentuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dikelompokkan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (plateau/pedmont) dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru Selatan didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % yang meliputi luas 15,43 % dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam. Sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampai agak curam.

Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu ; bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai. Sebagian besar tanah di Pulau Buru Selatan adalah jenis tanah kompleks, dimana persebaran jenis tanah ini meliputi ; alluvial, podsolik merah kuning, organosol, grumasol dan tanah-tanah kompleks.

2.1.1.3. Geomorfologi dan Hidrogeologi

Kondisi Geomorfologi Pulau Buru Selatan dan Pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk ke dalam Kabupaten Buru Selatan dikontrol oleh geologi regional Provinsi Maluku, dimana wilayah ini merupakan ujung Barat Busur Kepulauan Non Magmatik dari Lingkaran Sirkam Pasifik. Oleh karena itu Kepulauan Buru Selatan dapat di kelompokkan kedalam beberapa satuan Geomorfologi seperti berikut :

- 1) Satuan Geomorfologi Perbukitan/ Pegunungan Lipatan Patahan yang menempati wilayah bagian tengah Kabupaten Buru Selatan;



- 2) Satuan Geomorfologi Punggungan Homoklin yang meliputi wilayah bagian Utara dan Selatan Kepulauan Buru Selatan;
- 3) Satuan Geomorfologi Lembah dan Bantaran Sungai yang mengikuti lembah sungai-sungai besar juga menjadi wilayah permukiman.

Kondisi hidrogeologi Pulau Buru Selatan dan pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk dalam Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

a) Pola Aliran Sungai

Sebagaimana telah dijelaskan didepan, sungai sebagai unsur geografi yang ada di Kabupaten Buru Selatan (28 sungai) mempunyai pola aliran; dendritik (menurun), paralell, trellis, rektanguler dan radier mengalir menuju pantai kontrol oleh struktur geologi (patahan, rekahan dan sistem perlipatan batuan) yang terdapat di wilayah ini. Tingkat kerapatan sungai sangat intensif, dimana hampir seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan tertutup oleh pola aliran sungai baik yang bersifat permanen maupun intermitten.

b) Zona Air Tanah

Dari kondisi tersebut di atas dan didukung oleh kontrol batuan dan struktur geologi, maka secara umum neraca air tanah menunjukkan terdapat 2 (dua) zona air tanah, yaitu:

- Zona air tanah rendah, yang pada umumnya menempati punggungan pemisah air morfologi (*morphological water divided*) sebagai pemisah daerah tangkapan hujan (*catchment area*) keempat wilayah DAS tersebut diatas serta pada 2 (dua) punggungan yang terdapat di selatan daerah studi;
- Zona air tanah sedang – tinggi menempati hampir seluruh wilayah studi, yang mengelilingi Pulau Buru. Kawasan ini dapat tercapai jika sistem vegetasi tetap terjaga, sehingga tingkat peresapan (*recharged*) dapat dipertahankan dan *surface run off* dapat dicegah dan diperkecil.

c) Hidro Oceanografi

Sesuai dengan kondisi geografinya Kabupaten Buru Selatan dikelilingi oleh Laut Seram di Utara dan Laut Banda di Selatan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai kabupaten yang berada di dalam Provinsi Maluku. Oleh karena itu, pada bagian utara dan selatan berada pada posisi gapura energi gelombang yang tinggi pada musim barat maupun musim timur, dengan arus laut dari selatan yang sangat kuat pada musim timur yang berlangsung pada bulan Juni sampai September. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan posisi Pulau Buru Selatan yang berada di busur luar kepulauan non magmatik, maka Laut Seram di Utara dan Laut Banda di Selatan merupakan 2 (dua) palung laut dalam (samudera) yang sangat mempengaruhi wilayah ini, dengan kondisi batimetri yang sangat dalam. Disisi lain Pulau Buru Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang tinggi

didukung keberadaan di jalur ALKI III menghubungkan Timur, Barat, dan Utara seperti telah dijelaskan sebelumnya.

2.1.1.4. Klimatologi

Iklm di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kabupaten Buru Selatan yang lebih dominan daratan, beberapa pulau kecil dan laut Banda.

Berdasarkan data klimatologi di stasiun meteorologi Pulau Buru Selatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata temperatur/suhu udara tertinggi tercatat di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 27,9°C pada bulan Mei, sementara terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 26,2°C. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 16 hari dan yang terendah pada bulan Mei, yaitu 4 hari. Kondisi curah hujan, tercatat tertinggi pada bulan Juli sebesar 265,6 mm dan terendah pada bulan Juni sebesar 34,5 mm. Secara umum tekanan udara di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2022 berkisar antara 1.004,3 mbar sampai dengan 1.006,8 mbar. Sementara kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus yaitu sebesar 6,4 m/det dan terendah 5,0 m/det pada bulan Desember.

Tabel: 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru

Bulan	Rata-rata (average)						
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	26,9	87,0	5,6	1.005,9	102,9	12	5,8
Februari	26,9	86,0	5,4	1.005,2	230,2	14	4,9
Maret	27,2	86,5	5,1	1.005,4	126,3	14	6,0
April	27,7	83,5	5,4	1.005,3	95,3	7	6,8
Mei	27,9	82,8	5,5	1.006,0	45,0	4	7,8
Juni	27,5	83,4	5,1	1.006,2	34,5	5	4,2
Juli	26,2	85,4	6,2	1.006,8	265,6	12	4,5
Agustus	26,3	85,9	6,4	1.006,8	122,1	13	5,7
September	27,2	84,0	5,7	1.006,7	193,1	11	7,2
Oktober	27,5	84,0	5,4	1.005,6	57,0	5	8,0
November	27,4	84,3	5,7	1.005,8	46,7	5	7,6
Desember	27,0	85,5	5,0	1.004,3	153,8	16	5,7

Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, 2023

2.1.2. Aspek Demografi Daerah

Perkembangan penduduk Kabupaten Buru Selatan dilihat dari jumlahnya pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,72%. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel: 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2018	76,179	2,66
2.	2019	76,575	0,52
3.	2020	76,900	0,42
4.	2021	77,126	0,20
5.	2022	77,688	0,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan Fena Fafan dan Kepala Madan tercatat sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi tahun 2021-2022 dengan rata-rata pertumbuhan 2,92% dan 2,19% dan Kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Leksula sebesar -2,52%.

**Tabel: 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022**

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	Laju Pertumbuhan 2021-2022 (%)
1.	Kepala Madan	12.220	12.434	12.311	12.383	12.660	2,19
2.	Leksula	15.356	14.807	14.636	14.490	14.138	(2,52)
3.	Fena Fafan	4.101	4.132	4.090	4.057	4.179	2,92
4.	Namrole	20.037	20.201	20.614	21.194	21.974	0,04
5.	Waesama	14.809	15.445	15.618	15.689	15.568	(0,78)
6.	Ambalau	9.656	9.556	9.631	9.313	9.173	(1,53)
Buru Selatan		76.179	75.575	76.900	77.126	77.688	0,32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 terbesar berada di kecamatan Namrole yaitu sebesar 67,40 jiwa/km² dengan jumlah desa 17 dan jumlah dusun 13.

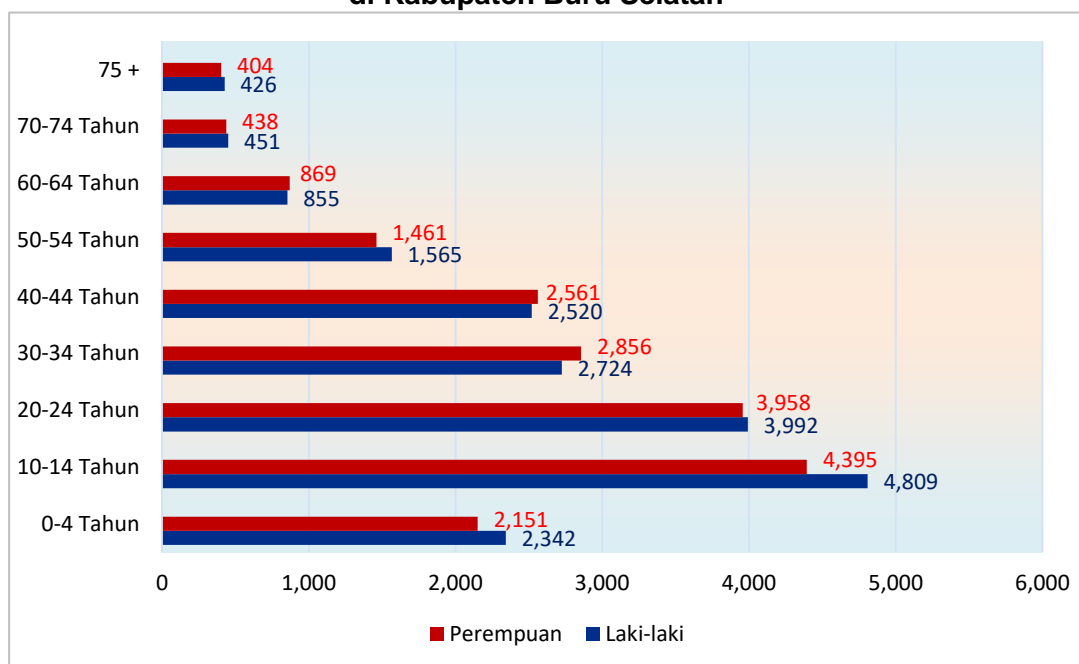
Tabel: 2.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Kepala Madan	1.276	16	1	9,92
2.	Leksula	1.900	19	-	7,44
3.	Fena Fafan	528	11	-	7,91
4.	Namrole	326	17	13	67,40
5.	Waesama	724	11	-	21,50
6.	Ambalau	306	7	-	29,98
Total		5.060	81	14	144,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

Pengelompokan menurut umur dan jenis kelamin bermanfaat bagi penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kelompok umur masing-masing. Penduduk Buru Selatan dengan kelompok umur 10-14 tahun dan 20-24 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi, hal ini berarti penduduk usia muda adalah penduduk yang dominan di Kabupaten Buru Selatan. Komposisi Penduduk ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif maka semakin besar beban tanggungan penduduk usia produktif.

Diagram 2.1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022 di Kabupaten Buru Selatan



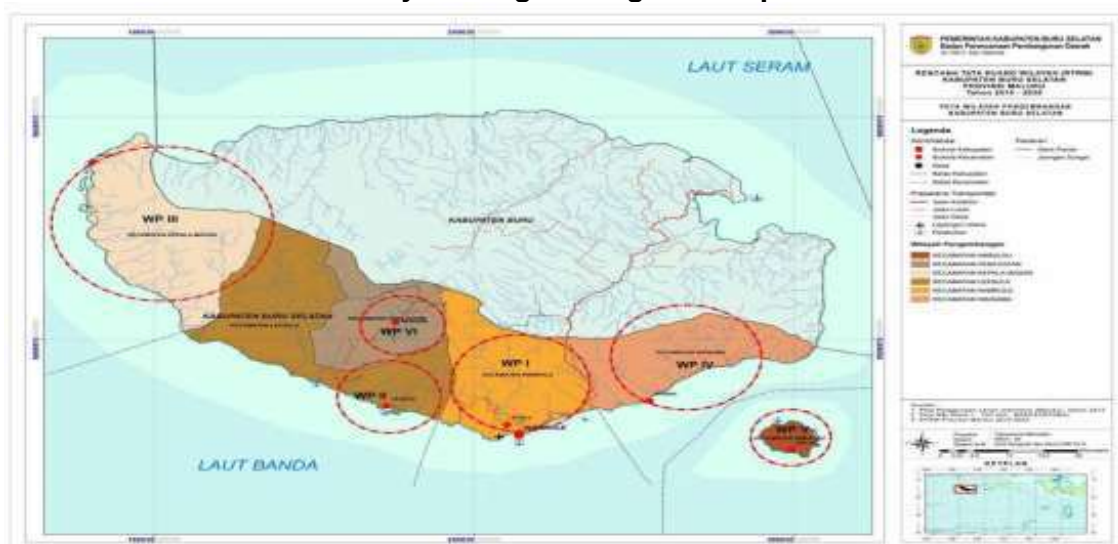
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

Jumlah penduduk menurut agama di Buru Selatan tahun 2022, sebanyak 50.753 orang beragama Islam, 21.520 orang Protestan, Ktolik 512 orang, Hindu sebanyak 1.158 orang, tidak ada yang beragama Budha dan Lainnya sebanyak 2.773 orang.

2.1.3. Wilayah Pengembangan

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk lebih jelas pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut. Keenam Wilayah Pengembangan tersebut sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Namrole dengan pusat pelayanan di Kota Namrole. Fungsi utama WP sebagai berikut :
 - a) Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Jasa
 - b) Pusat Transportasi Regional
 - c) Sentra produksi pertanian tanaman pangan
 - d) Sentra produksi kehutanan
 - e) Sentra produksi perikanan, dan
 - f) Wisata

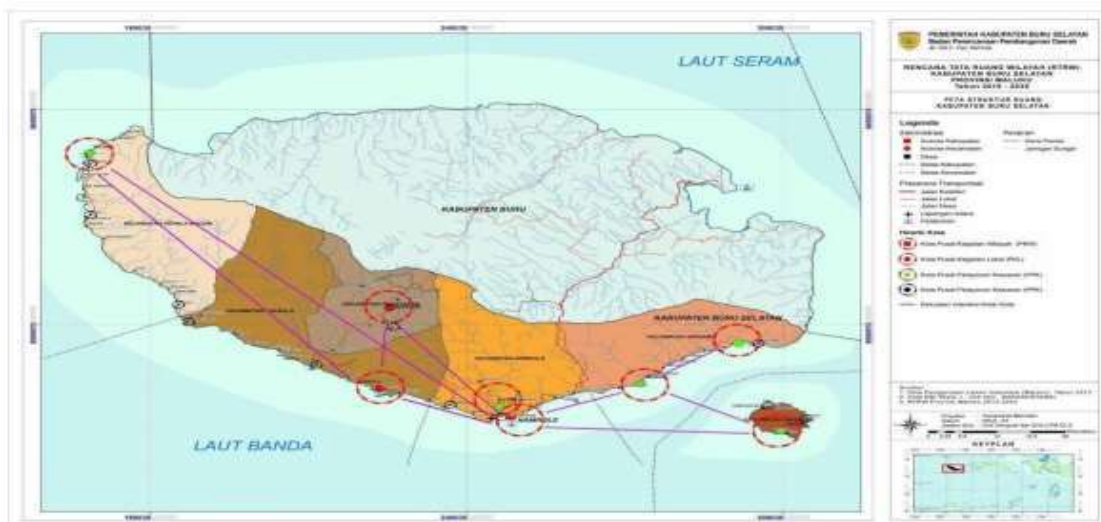


2. Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Leksula dengan pusat pelayanan di Kota Leksula. Fungsi utama WP II adalah :
 - a) Pusat Perdagangan
 - b) Pusat Pelayanan Jasa
 - c) Kawasan Ekonomi Khusus
 - d) Sentra produksi kehutanan, dan
 - e) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - f) Sentra produksi perkebunan
 - g) Sentra produksi perikanan
 - h) Wisata
3. Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kecamatan Fena Fafan dengan pusat pelayanan di Kota Waekatin. Fungsi utama WP III adalah :
 - a) Sentra produksi kehutanan
 - b) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - c) Sentra produksi perkebunan
 - d) Sentra produksi perikanan
 - e) Pendukung utama Kawasan Ekonomi Khusus
4. Wilayah Pengembangan IV yang meliputi Kecamatan Kepala Madan dengan pusat pelayanan di Kota Biloro. Fungsi utama WP IV adalah :
 - a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa
 - e) Wisata
5. Wilayah Pengembangan V yang meliputi Kecamatan Waisama dengan pusat pelayanan di Kota Wamsisi. Fungsi utama WP V adalah :
 - a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa
6. Wilayah Pengembangan VI yang meliputi Kecamatan Ambalau dengan pusat pelayanan di Kota Waelua. Fungsi utama WP VI adalah :
 - a) Sentra produksi perkebunan
 - b) Sentra produksi perikanan
 - c) Wisata

2.1.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan

Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan, yang direncanakan tidak terlepas dari rencana struktur kota di Ibukota Kabupaten maupun Kota Kecamatan, karena Kota merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sistem Perkotaan diarahkan sesuai dengan hierarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonominya. Pengembangan sistem kota-kota diarahkan sedemikian rupa, agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah, terutama berkaitan dengan kondisi fisik yang sebagian merupakan pulau-pulau dan kondisi bencana alam. Di pihak lain Kawasan perkotaan memerlukan pengelolaan secara individual yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas, serta mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Rencana struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada gambar 2.4. berikut :

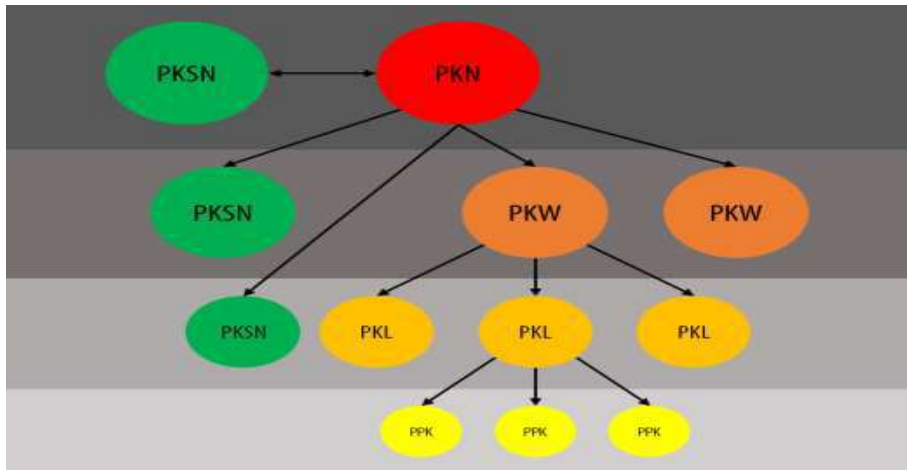
Gambar 2.4. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Buru Selatan tahun 2009-2029 bahwa pengembangan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan akan tetap mengacu pada hierarki fungsional dengan mengingat perkembangannya serta skala pelayanannya. Kota yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berdasarkan RTRW Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan adalah Namrole dan Leksula di Kecamatan Leksula. Kota yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kota yang merupakan Ibukota Kabupaten Buru Selatan yaitu Kota Namrole. Konsep struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Konsep Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan



Kota yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang yaitu :

- 1) Desa Elfule di Kecamatan Namrole
- 2) Desa Biloro di Kecamatan Kepala Madan
- 3) Desa Waekatin di Kecamatan Leksula yang diusulkan menjadi PKL (PKLP); dan
- 4) Desa Wamsisi di Kecamatan Waesama

Kota yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Desa Lena di Kecamatan Waesama dan Desa Elara di Kecamatan Ambalau. Desa yang merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Kabupaten Buru Selatan untuk masa mendatang yaitu :

- 1) Desa Waemulang (Kecamatan Leksula)
- 2) Desa Tifu (Kecamatan Leksula)
- 3) Desa Nanali (Kecamatan Kepala Madan)
- 4) Desa Sekat (Kecamatan Kepala Madan)
- 5) Desa Fogi (Kecamatan Kepala Madan)
- 6) Desa Fakal (Kecamatan Fena Fafan)
- 7) Desa Labuang (Kecamatan Namrole)
- 8) Desa Wamkana (Kecamatan Namrole)
- 9) Desa Waetawa (Kecamatan Waesama)
- 10) Desa Ulima (Kecamatan Ambalau)
- 11) Desa Lumoy (Kecamatan Ambalau)

Untuk memantapkan sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan masing-masing hierarki pusat pelayanan dan skala pelayanan yang direncanakan, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang maka perlu arahan fungsi untuk masing-masing kota yang berada di Kabupaten Buru Selatan hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2035) seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel: 2.6 Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Buru Selatan

No.	Hirarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan Fungsi Kewenangan		A	B	C	D	E	F	G	H
			Regional	Kabupaten								
1.	PKWp	Namrole	Regional	Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	PKL	Leksula	Regional	Kabupaten		X	X	X	X	X	X	X
3.	PKLp	Waekatin (Kecamatan Leksula)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
4.	PPK	Elfule (Kecamatan Namrole)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
5.	PPK	Biloro (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
6.	PPK	Wamsisi (Kec. Waesama)	Lokal	Kecamatan		X	X	X	X	X		X
7.	PPK	Lena (Kecamatan Waesama)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		X
8.	PPK	Elara (Kecamatan Ambalau)	Lokal	Kecamatan		X	X		X	X		X
9.	PPL	Waemulang (Kecamatan Leksula)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
10.	PPL	Tifu (Kecamatan Leksula)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
11.	PPL	Nanali (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
12.	PPL	Sekat (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
13.	PPL	Fogi (Kecamatan Kepala Madan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
14.	PPL	Fakal (Kecamatan Fena Fafan)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
15.	PPL	Labuang (Kecamatan Namrole)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
16.	PPL	Wamkana (Kecamatan Namrole)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
17.	PPL	Waetawa (Kecamatan Waesama)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
18.	PPL	Ulima (Kecamatan Ambalau)	Lokal	Kecamatan			X		X	X		
19.	PPL	Lumoy (Kecamatan Ambalau)	Lokal	Kecamatan								

Sumber : Hasil Analisis, 2009, RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Keterangan:

- A. : Pusat administrasi kabupaten
- B. : Pusat administrasi kecamatan
- C. : Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran
- D. : Pusat perhubungan dan komunikasi
- E. : Pusat produksi pengolahan
- F. : Pusat pelayanan sosial (kesehatan, Pendidikan, dll)
- G. : Pusat pendidikan tinggi
- H. : Pusat kegiatan pariwisata



2.1.4.1. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Buru Selatan, proses identifikasi kawasan yang telah dilakukan berhasil mengidentifikasikan kawasan lindung meliputi :

a. Zona Lindung Lokal dan Zona Penyangga Hutan Mangrove

Kawasan yang direncanakan meliputi : Leksula, Kepala Madan, Desa Wamsisi dan Desa Namrole, dengan luasan hutan mangrove adalah \pm 1.600,24 Ha (hasil analisa citra, 2005). Perairan pesisir pantai yang dimaksud adalah desa Nalbesy, Teluk Leksula, Mefa, Tifu, Pulau Tomahu, dan Pulau Fogi.

b. Kawasan Lindung Sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau

Perencanaan kawasan lindung sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau diarahkan untuk kawasan-kawasan yang masih mungkin untuk dipertahankan. Sempadan pantai berjarak 100 m atau disesuaikan lebar pantai, sempadan sungai utama 100 meter, sub sungai 50 meter dan sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman atau kota 15 meter atau disesuaikan dengan jarak sempadan yang tersisa atau topografi sungai. Kawasan lindung untuk sempadan danau 100 meter.

2.1.4.2. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan Perikanan Tangkap
- 2) Kawasan Pariwisata terdapat di Leksula dan Namrole
- 3) Zona Prasarana dan Sarana Perikanan

2.1.5. Kawasan Rawan Bencana

Penentuan zonasi/ wilayah rawan bencana Kabupaten Buru Selatan terbagi menjadi :

2.1.5.1. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan banjir meliputi wilayah ekologis adalah wilayah ekologi Buru Selatan Timur, Pulau Ambalau, Desa Waemulang dan Desa Waemala.

2.1.5.2. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Abrasi dan Akresi

Abrasi dan akresi umumnya terjadi di pesisir pantai wilayah ekologi Teluk Leksula – Tanjung Waitepu, Pantai Enbofi, Mefa, Fogi – Air Ternate. Abrasi pantai juga terjadi intensif sepanjang pesisir Kabupaten Buru Selatan. Pada Pulau Ambalau tingkat abrasi cukup tinggi, demikian juga pada pantai Namrole dan Wamsisi.

2.1.5.3. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Erosi dan Sedimentasi

Erosi terjadi pada area perbukitan karst dan denudasional, sementara Sedimentasi terjadi di muara sungai Waemala, Waihoka dan Waemulang.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

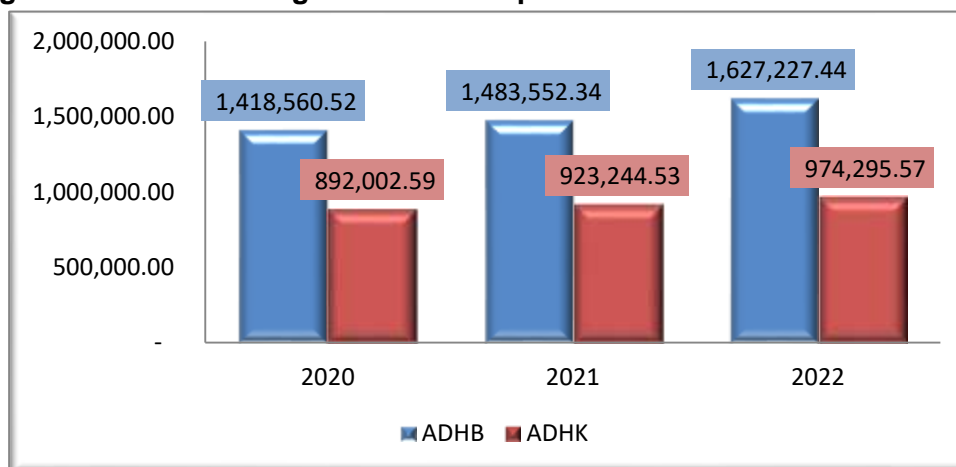
Tingkat kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator Ekonomi Makro antara lain: Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per kapita, Gini ratio, Tingkat Kemiskinan, Laju Inflasi dan Pengangguran.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi

Pendapatan domestik regional per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara atau daerah. Sesuai dengan konsep dan definisi, pengertian pendapatan per kapita suatu daerah adalah pendapatan regional netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya.

Sampai saat ini dalam perhitungan pendapatan regional dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia, umumnya masih hanya sebatas Pendapatan Domestik Regional, sehingga angka Pendapatan Domestik Regional yang disajikan di sini adalah angka Pendapatan Domestik Regional Per kapita. Secara rinci pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat pada Diagram 2.2.

Diagram 2.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

Terlihat bahwa masih minimnya peningkatan hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk menjadi kegiatan *home industry*. Kondisi ini harus menjadi perhatian bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap potensi unggulan Kabupaten Buru Selatan pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan melalui *home industry* agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, karena jika anggaran pemerintah daerah kecil untuk sektor ini maka kemiskinan akan semakin tinggi.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020–2022

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	521.778,78	530.146,88	591.435,70	348.124,04	351.469,19	375.511,80
Pertambangan dan Penggalian	10.873,91	11.559,27	12.320,67	7.022,21	7.365,10	7.570,83
Industri Pengolahan	54.378,34	55.527,17	63.733,10	33.531,73	33.892,88	37.714,37
Pengadaan Listrik dan Gas	148,41	159,57	170,44	111,39	117,76	122,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	275,13	288,26	301,48	208,51	214,75	220,24
Konstruksi	122.486,07	135.536,52	143.787,20	70.927,69	76.675,02	78.244,30
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	105.514,98	114.284,20	129.264,22	73.918,54	78.775,57	84.091,97
Transportasi dan Pergudangan	34.557,25	37.179,28	45.327,90	23.885,83	25.216,65	26.656,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.828,56	7.170,26	7.913,03	4.325,68	4.496,71	4.792,96
Informasi dan Komunikasi	7.524,07	8.137,30	8.949,86	5.727,66	6.068,44	6.478,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.787,38	12.221,62	12.485,57	7.168,77	7.678,01	7.149,47
Real Estat	7.591,34	7.898,40	8.481,53	5.406,42	5.587,58	5.909,79
Jasa Perusahaan	336,27	355,70	389,37	244,48	254,61	272,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	374.409,19	392.614,76	417.551,49	204.164,05	213.229,22	220.321,71
Jasa Pendidikan	73.364,03	77.098,84	82.086,91	47.853,07	49.756,59	52.360,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70.570,08	75.716,53	83.618,96	48.095,23	50.937,82	54.580,55
Jasa Lainnya	17,136,71	17,657,79	19.410,01	11.287,28	11.508,61	12.297,76
Total	1.418.560,52	1.483.552,34	1.627.227,44	892.002,59	923.244,53	974.295,57

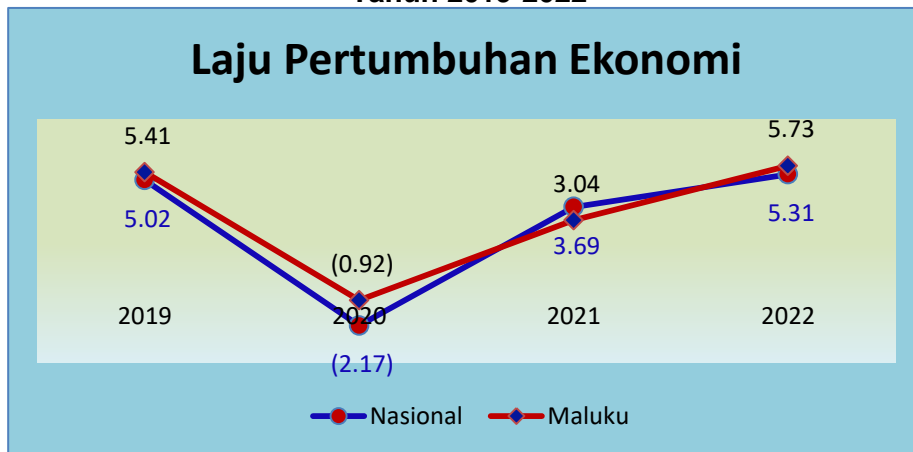
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,02 persen adalah perolehan tertinggi dari lima tahun ke depannya. Sejak tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dan kontraksi tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar -0,01, kondisi ini baru pertama kali terjadi sejak berdirinya Kabupaten Buru Selatan.

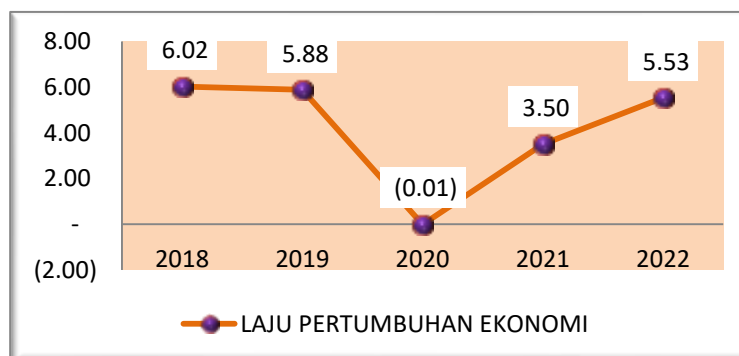
Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2018-2022 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami pertumbuhan yang menurun sejak tahun 2018-2022, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Musrenbang Provinsi Maluku , 2023

Grafik 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2018-2022 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sejak tahun 2018-2022, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2022 mencapai 5,73 persen.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2020- 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2018 - 2022**

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5.04	5.15	2.16	0.96	6,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4.94	5.61	-0.04	4.88	2,79
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5.47	4.22	-0.95	1.08	11,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7.75	0.25	4.75	5.72	4,07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3.56	2.82	1.75	2.99	2,55
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7.11	7.62	-1.03	8.10	2,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8.32	7.56	-2.04	6.57	6,75
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5.32	5.59	-12.04	5.57	5,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	2.73	3.08	-0.46	3.95	6,59
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5.65	3.53	1.95	5.95	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5.31	3.70	4.35	7.10	-6,88
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1.81	1.27	-0.05	3.35	5,77
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2.38	2.79	-0.71	4.14	6,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7.42	7.04	-1.98	4.44	3,33
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5.05	4.95	-0.02	3.98	5,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5.85	5.43	4.44	5.91	7,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2.58	3.04	1.08	1.96	6,86
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Produk		6.02	5,88	-0,01	3,50	5,53

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,50 persen di tahun 2021, lebih tinggi dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,01. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang membaik di tahun 2021 mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan sektor mulai giat yang menghasilkan kegiatan produksi dan konsumsi. Kondisi giatnya kegiatan sektor ditahun 2021 terlihat dari sebagian besar atau 16 (Enam belas) sektor pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi 8,10 persen, diikuti oleh sektor keuangan dan asuransi sebesar 7,94 persen dan sektor perdagangan 6,57 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni 0,96 persen, walaupun di tahun 2020 bertumbuh masih positif sebesar 2,16 persen, karena sektor yang masih mampu beradaptasi tinggi terhadap keadaan covid-19 adalah sektor primer ini, pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel: 2.9 PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020-2022

No.	Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konsumsi Rumah Tangga	1.231.025,13	1.284.162,50	1.398.698.400,68	751.805,57	757.906,02	793.053.688,03
2.	Konsumsi LNPRT	50.470,95	53.852,62	57.097.838,87	30.320,50	31.279,45	31.727.608,62
3.	Konsumsi Pemerintah	1.003.450,57	1.026.551,35	911.517.205,49	587.870,38	594.308,00	508.430.791,47
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	750.823,91	814.139,35	828.110.272,95	457.153,51	485.068,17	476.072.750,75
5.	Perubahan Inventori	24.686,22	23.440,31	24.853.617,26	14.559,85	13.661,08	13.725.398,85
6.	Ekspor/Impor	9.185.021,98	114.717,42	-1.593.049.891,85	79.784,16	71.101,70	-848.714.663,06
Total PDRB		1.418.560,52	1.483.552,34	1.627.227.443,41	892.002,59	923.244,53	974.925.574,67

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar dalam 3 tahun (2020-2022) diberikan oleh Konsumsi Rumah Tangga, walaupun mengalami fluktuasi dalam tiga tahun. Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2021 sebesar 757.906 atau berkontribusi sekitar 82,09 persen di tahun 2021. Sedangkan kelompok pengeluaran perubahan inventori merupakan pengeluaran yang paling kecil di tahun 2021, bahkan sejak tahun 2018.

2.2.1.3. PDRB Per kapita

Secara konstan, PDRB Per kapita di Kabupaten Buru Selatan dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2017 besarnya PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan sebesar 13.530 rupiah selanjutnya menurun menjadi 12.035 rupiah di tahun 2021 dan Tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan menjadi 12.410 rupiah. Namun laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,4 ditahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan kata lain laju pertumbuhan PDRB Per kapita di tahun 2022 masih lebih tinggi dari tahun 2021. Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada tabel berikut ini.

Tabel: 2.10 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2022 Nilai PDRB (Miliar Rupiah)

	2018	2019	2020*	2021*	2022**
ADHK	842,55	892,11	892,00	923,24	974,30
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHK	13.530	14.415	11.904	12.035	12.410
Pertumbuhan PDRB per KapitaADHK 2010 (%)	4,40	6,53	-17,94	1,74	3,11

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

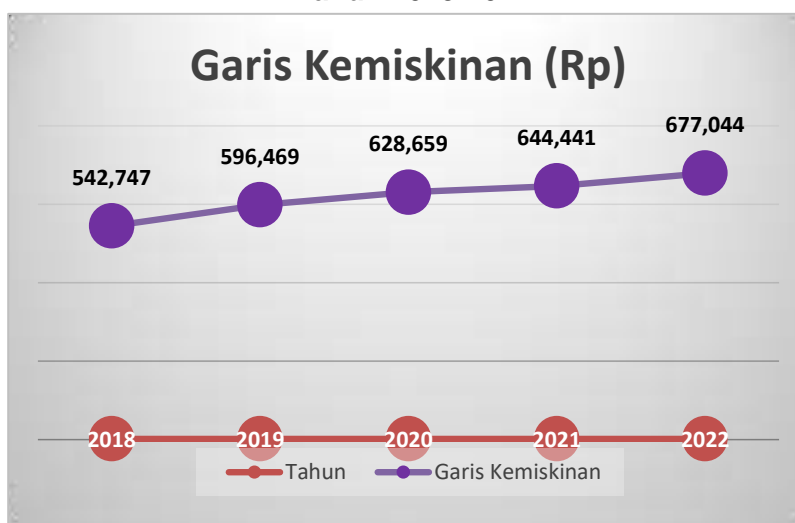
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 perkembangan Garis Kemiskinan mencapai Rp. 542.747,- meningkat menjadi Rp. 677.044,- pada tahun 2022, hal tersebut dapat diartikan pada tahun 2022 pengeluaran per kapita/bulan penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan yang berada pada Garis Kemiskinan mencapai Rp. 677.044,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat Grafik 2.3.

**Grafik 2.3. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan
Tahun 2018-2022**

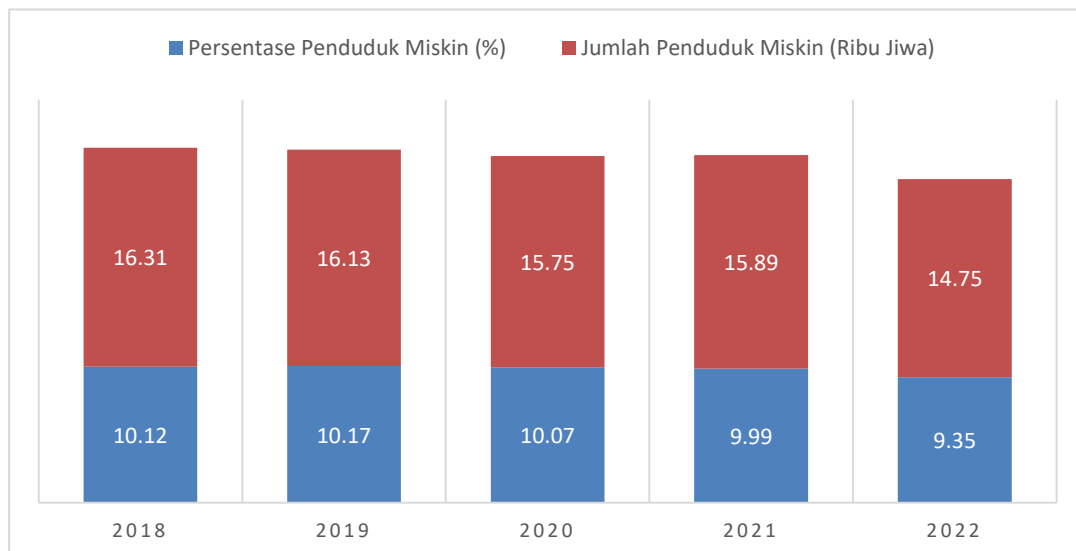


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Buru Selatan, 2022

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu indikator ekonomi, sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Berbagai macam Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Persentase kemiskinan di Buru Selatan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan sebesar 15,89 persen menjadi 14,75 persen di tahun 2022. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 9,99 ribu menurun menjadi 9,35 ribu Jiwa pada tahun 2022. Penurunan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat (kebijakan makro) seperti kenaikan harga komoditi tertentu secara bersamaan menyebabkan kenaikan inflasi dan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan perbaikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun Tingkat Kemiskinan yang meningkat menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.

Diagram 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Buru Selatan, 2022

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2020 yang merujuk pada data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Kepmensos Nomor 8/HUK/2019, jumlah penduduk miskin yang menjadi skala prioritas untuk diintervensi dengan program dan kegiatan di Kabupaten Buru Selatan mencapai 20.771 jiwa (kondisi kesejahteraan 10 persen terendah), dimana jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat pada kecamatan Kepala Madan yaitu sebesar 4.541 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Leksula yaitu sebesar 4.256 jiwa, sementara sebaran penduduk miskin yang terkecil terdapat pada Kecamatan Fenafafan yaitu sebanyak 2.099 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

Tabel 2.11. Analisis Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin (Jiwa)				Jumlah Total Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4		
Kepala Madan	12.311	4.541	664	256	146	5.607	45,54
Leksula	14.636	4.256	1.274	754	593	6.877	46,99
Fenafafan	4.090	2.099	281	135	88	2.603	63,64
Namrole	20.614	2.928	1.201	636	851	5.616	27,24
Waesama	15.618	3.069	549	387	292	4.297	27,51
Ambalau	9.631	3.878	628	206	140	4.852	50,38
Jumlah	76.900	20.771	4.597	2.374	2.110	29.852	38,82

Sumber : Kepmensos Nomor 8/HUK/2019

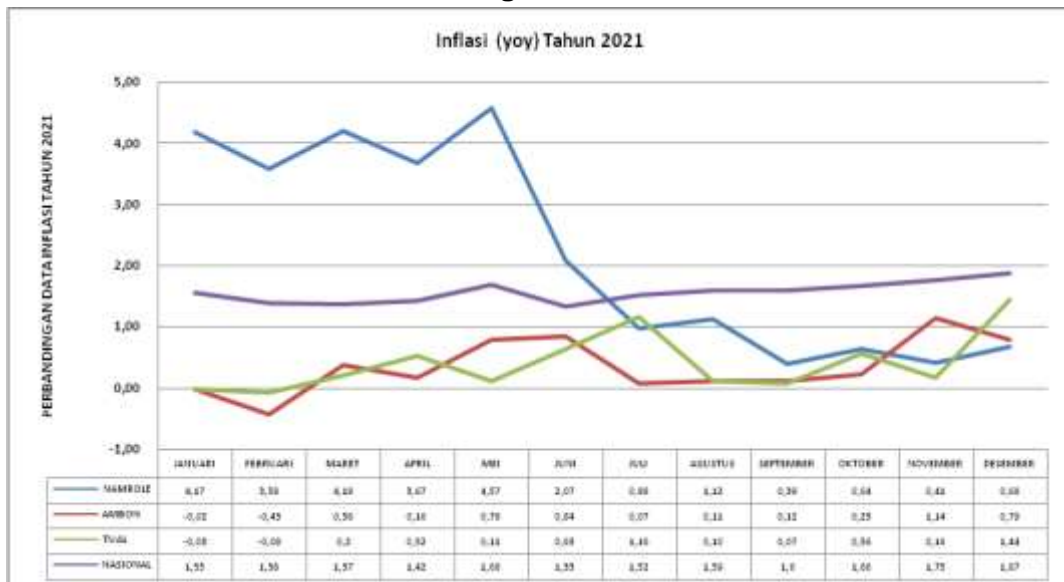
2.2.1.5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi Buru Selatan pada bulan Januari sampai Desember 2021 mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari inflasi Buru Selatan sebesar 4,17 persen, Februari sebesar 3,58 persen, Maret 4,19 persen, April 3,67 persen, Mei 4,57, Juni 2,07, Juli 0,98 persen, Agustus 1,12 persen, September sebesar 0,39 persen, Oktober 0,64 persen, November 0,41, dan bulan Desember 0,68 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan beberapa indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Dari sebanyak 339 komoditas yang dipantau per bulan di Kota Namrole, tercatat 10 (sepuluh) komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kota Namrole pada Agustus 2021 diantaranya adalah : beras, ketela pohon, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ikan kembung/ ikan gembung/ ikan banyar/ ikan gembolo/ ikan aso-aso, ikan tuna, ketimun, kacang panjang, anggur, wortel, dan buah naga.

Grafik 2.4 Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Terhadap Provinsi Maluku, Nasional dan Target RPJMD Tahun 2021

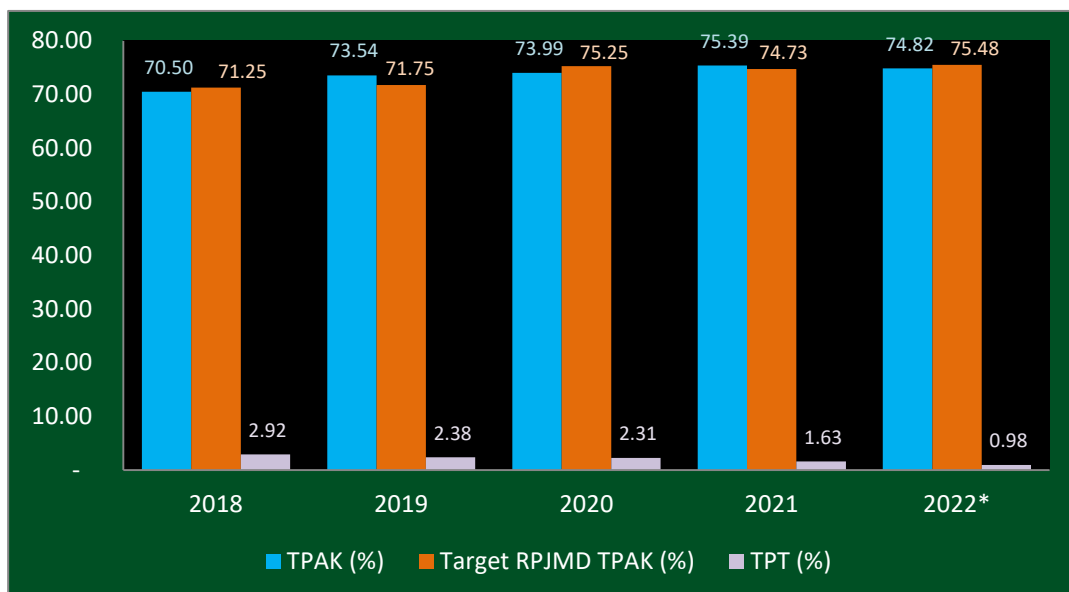


Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Buru Selatan, 2022

2.2.1.6. Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam Angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum bisa memperolehnya. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah Angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih masuk dalam kategori hasil yang baik, mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni 2018-2022. Tahun 2018 TPT sebesar 2,92 persen, turun menjadi 0,98 pada bulan Agustus tahun 2022.

Diagram 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Target RPJMD TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka 2023 dan RPJMD Kab. Buru Selatan Tahun 2021-2026

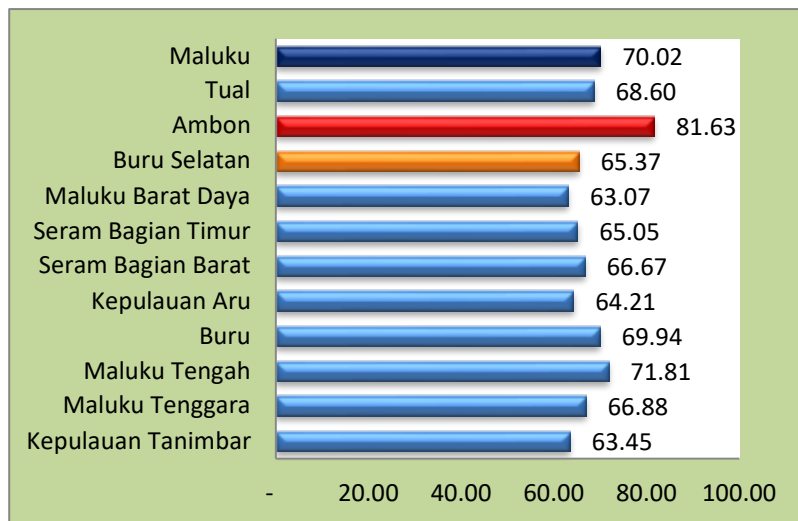
2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Nilai IPM tahun 2021 di masing-masing kabupaten/kota hanya Kota Ambon dan Maluku Tengah yang memiliki nilai IPM di atas nilai Provinsi sedangkan Kabupaten Buru Selatan dan 8 Kabupaten lainnya di bawah nilai Provinsi. Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya (2017-2021) dengan rata-rata IPM sebesar 64,8, merupakan urutan ke 7 (tujuh) tertinggi dari 11 (sebelas) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, secara jelas terlihat pada Diagram di bawah ini.

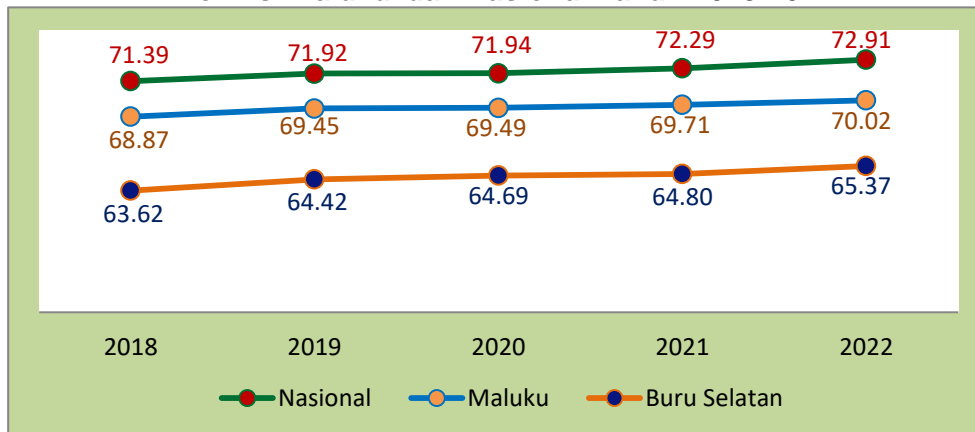
Diagram 2.5 Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022



Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka, 2023

Pada Diagram di atas Kota Ambon memiliki IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki IPM paling rendah, 62,37, kondisi ini berkorelasi positif dengan angka kemiskinan yang juga Maluku Barat Daya sebagai kantong kemiskinan tertinggi. Sedangkan posisi IPM Kabupaten Buru Selatan, secara regional dan nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Grafik 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Nasional 2023 dan Provinsi Maluku Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita. Walaupun di tahun 2020 Pengeluaran per kapita mengalami penurunan sebesar 61 poin, namun kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 34 poin. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2017-2022**

No.	Komponen IPM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,74	65,92	66,13	66,27	66,36	66,69
2.	Angka Harapan Lama Sekolah(Tahun)	12,28	12,48	12,68	12,69	12,70	12,83
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,13	7,42	7,70	7,94	7,95	8,06
4.	Pengeluaran Per kapita (Rp.Juta)	7,330	7.500	7.627	7.566	7.600	7.716

Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka, 2023

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan wajib dasar diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sosial.

2.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

Secara umum, pencapaian Kabupaten Buru Selatan pada semua indikator bidang pendidikan dari tahun 2016 sampai 2022 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2021**

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (APK)							
APK SD/SDLB (%)	109,05	109,32	115,26	115,26	114,64	116,10	116,10
APK SMP/SMPLB (%)	98,96	85,51	86,27	86,27	88,48	86,80	86,80
Angka Partisipasi Murni (APM)							
APM SD/SDLB (%)	93,62	96,86	98,37	98,37	97,86	97,83	97,83
APM SMP/SMPLB (%)	74,46	76,06	77,56	77,56	82,93	80,13	80,13
Angka Partisipasi Sekolah (APS)							
APS usia 7 -12 (%) (SD/MI)	99,60	98,80	98,42	98,25	98,00	-	98,10
APS usia 13-15 (%) (SMP/MTS)	95,10	96,21	95,70	95,50	95,21	-	96,33
Angka Putus Sekolah							
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,00	0,00	0,00	0,78	0,75	-	0,73
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	3,74	4,00	2,12	5,00	4,80	-	2,20
Angka Kelulusan							
Angka Kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
Fasilitas Pendidikan							

Sekolah SD/SDLB Kondisi Bangunan Baik (%)	70,00	80,00	90,00	74,77	83,18	-	75,7
Sekolah SMP/SMPLB Kondisi Bangunan Baik (%)	70,00	80,00	90,00	86,96	85,11	-	87,23
Rasio Ketersediaan Sekolah							
Rasio Ketersediaan Sekolah SD sederajat terhadap penduduk usia sekolah	83,55	84,82	84,82	97,63	97,77	-	95,50
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP sederajat terhadap penduduk usia Sekolah	99,98	105,65	105,91	89,29	94,47	-	109,25
Rasio Pendidik dan Peserta Didik per Kelas Rata-Rata							
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD /SDLB per kelas rata-rata	49,14	52,55	52,55	53,76	54,50	-	46,63
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMP/ SMPLB per kelas rata-rata	433,95	439,84	455,81	45,50	45,60	-	70,70
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah							
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)	6,96	7,13	7,42	7,70	7,94	7,95	-
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,22	12,28	12,48	12,68	12,69	12,70	12,83

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, 2023

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja sektor kesehatan umumnya mengalami perbaikan hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2018-2022, walaupun pada beberapa indikator kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2018 misalnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup ada selisih peningkatan tahun 2018-2019 sebesar 425 jiwa namun jika dilihat data tahun 2020 justru angka kematian ibu mengalami penurunan sebesar 273 jiwa, data ini menunjukkan bahwa program pemerintah sangat baik dilakukan. Adapun sejumlah indikator urusan kesehan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.14. Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	213,00	638,00	365,80	0,0001	-
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	2,10	7,20	8,70	0,012	-
4.	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (%)	73,60	91,70	91,00	93,12	64,16
5.	Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	70,20	73,60	89,30	-	-
6.	Pelayanan kesehatan bayi (%)	72,30	75,70	82,20	82,64	82,70
7.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	14,00	5,50	8,70	-	-
8.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk/kurus (%)	10,10	4,60	3,20	0,22	0,05
9.	Menurunnya Prevalensi Balita Stunting (%)	7,40	2,60	3,80	39,1	41,6
10.	Desa/Kelurahan UCI (%)	60,50	51,90	43,00	43,04	71,43
11.	Jumlah Kasus HIV/AIDS (Kasus)	4,00	6,00	6,00	-	-
12.	Rasio Posyandu per satuan balita	-	-	-	14,21	18,36
13.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per	-	-	-	0,66	0,66

	satuan penduduk					
14.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	-	-	-	66,67	66,67
15.	Rasio Dokter per satuan penduduk (/1.000)	-	-	-	30,43	34,78
16.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1.000)	-	-	-	5,75	5,95
17.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	-	-	2,42	-
18..	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	-	-	-	80	100
19.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	-	-	-	73,37	100
20.	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	-	-	-	0,92	0,94
21.	Cakupan Puskesmas	-	-	-	0,02	0,02
22.	Cakupan pembantu Puskesmas	-	-	-	0,49	0,49
23.	PHBS (%)	-	-	-	38,26	73,67
24.	Rasio akseptor KB (%)	-	-	-	37,19	37,20
25.	Cakupan peserta KB aktif (%)	-	-	-	55,26	55,27

Sumber : SSGI Tahun 2021 & 2022, dan Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2023.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau setiap elemen masyarakat hingga ke seluruh penjuru desa di Kabupaten Buru Selatan. Realitanya fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih perlu ditingkatkan. Tabel berikut menampilkan data tenaga Kesehatan, fasilitas Kesehatan, jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.15. Tabel Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik	Posyandu Aktif	Polindes
1.	Kepala Madan	1	3	7	-	9	-
2.	Leksula	-	3	9	2	12	-
3.	Namrole	1	2	7	2	22	-
4.	Waesama	-	2	8	-	25	-
5.	Ambalau	-	2	4	-	5	-
6.	Fena Fafan	-	1	2	-	3	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2023

Berikut jumlah kematian ibu maternal dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.16 Tabel Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021	2022
1.	Kematian ibu hamil	1	0
2.	Kematian ibu bersalin	1	4
3.	Kematian ibu nifas	2	5
4.	Kematian bayi	11	7
5.	Bayi Lahir Mati	26	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.1.3. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

a. Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Pada tahun 2022 jumlah pasangan usia subur sebanyak 13.984 pasangan, jumlah peserta KB aktif 3.269 orang dengan persentase peserta program KB aktif sebesar 23,4%. Berikut data jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022.

Tabel 2.17 Tabel Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	2022
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	13.984
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Pasangan	3.269
3.	Persentase Peserta Program KB Aktif	%	23,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.1.4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Akses Air Bersih

Persentase pengguna air bersih di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 sebesar 63,29 persen dengan jumlah penduduk sebesar 49.692 jiwa dari 78.515 jiwa jumlah penduduk yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan tahun 2022, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih(jiwa)	-	49.692
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	76.715	78.515
3.	Presentase jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih	-	63,29

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Buru Selatan, 2023

b. Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 sebesar 56,58 persen dengan jumlah penduduk 44.502 jiwa dari 78.515 jiwa jumlah penduduk yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan tahun 2022, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel: 2.19 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Jumlah penduduk bersanitasi (jiwa)	-	44.502
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	76.715	78.515
3.	Presentase jumlah penduduk yang mendapat akses sanitasi	-	56,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan, 2023

c. Kondisi Jalan

Kondisi jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten di Buru Selatan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sepanjang 118,384 Km meningkat menjadi 283,198 Km pada tahun 2022. Kondisi jalan Kab. Buru Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

Tahun	Jalan Kabupaten				
	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	Panjang jalan dengan kondisi baik (Km)		Panjang jalan dengan kondisi rusak (Km)	
		Km	(%)	Km	(%)
2021	465,95	118,384	25,41	347.566	74,59
2022	465,95	283,198	60,78	182,752	39,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Buru Selatan, 2023

2.3.1.5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan perumahan di Buru Selatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan capaian 100% di tahun 2022. Indikator selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	20 Unit	20 Unit	100
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	2 Paket	2 Paket	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.1.6. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tahun 2022 pada indikator peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercapai 100%, sementara persentase kepatuhan terhadap produk hukum daerah tercapai 80%.

Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	75	75	100
2.	Persentase Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100	80	80

Sumber : Dinas Satpol-PP Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.1.7. Bidang Urusan Sosial

a. Bantuan

Secara umum bantuan sosial di Buru Selatan menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Bantuan pangan dengan capaian 32,19% di tahun 2021 menjadi 33,73% di tahun 2022. Indikator bantuan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Bantuan Pangan	32,19%	33,73%
2.	Program Indonesia Pintar (PIP)	Pendidikan	Pendidikan
3.	Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	39,30%	42,83%
4.	Program keuangan harapan	29,15%	31,65%
5.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan tunai	29,15%	31,65%
6.	Persentase PMKS yang tertangani	49,73%	50,73%
7.	Persentase PMKS skala yang yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	17,73%	19,19%

8.	Persentase panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	14,91%	16,20%
9.	Persentase panti social yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	-	-
10.	Persentase wahana kesejahteraan social berbasis mesyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	-	-
11.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100%	100%
12.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	17,89%	9,18%
13.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensi yang telah menerima jaminan sosial	14,90%	16,86%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, serta Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja terdapat peningkatan data tenaga kerja yang terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja yakni sebanyak 2.300 tenaga kerja di tahun 2021 meningkat menjadi 3.576 tenaga kerja di tahun 2022. Indikator urusan tenaga kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro	250	250	250	250
2.	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Dalam BPJS Tenaga Kerja	2.300	2.300	4.106	3.576
3.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	67	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak ada jumlah KDRT yang terjadi di Buru Selatan sehingga capaian target sebesar 100%. Indikator lainnya tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	20 Kelompok	-	-
2.	Jumlah PKK Aktif	500 Orang	500 Orang	100
3.	Jumlah KDRT	-	-	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.3. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buru Selatan terjadi peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 2.26 Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Ketersediaan Pangan Utama	1.556	2.013
2.	Jumlah Penduduk	76.715	78.515
3.	Rasio Ketersediaan Pangan Utama (%)	64,83	83,88

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buru Selatan, 2023

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dengan melihat skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan dari aspek konsumsi. Skor PPH Kabupaten Buru Selatan menunjukkan adanya perkembangan dari tahun 2021-2022. Capaian skor PPH sebagai berikut:

Tabel: 2.27 Skor PPH Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tahun	
		2021	2022
1.	Target	100	100
2.	Realisasi	55,78	63,82
3.	Capaian (%)	55,7	63,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

Urusan bidang lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun capaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak ada pada tahun 2021 dan terlaksana di tahun 2022.

Tabel 2.28 Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Tidak ada	Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Tidak ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2023

Tabel 2.29 Tabel Pemberian penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada
2.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota, likasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	24,69%	40%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat yang melakukan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meningkat menjadi 40% di tahun 2022.

Tabel 2.30 Tabel Cakupan Area Pelayanan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase cakupan area pelayanan	0.45	0.45	0.45	0.45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2023

Tabel 2.31 Tabel Timbulan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/TPST/SPA Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Timbulan sampah yang ditangani	100	24	100	26
2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74	15	73	16
3.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	50	2.95	60	0.40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.5. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP

Rasio penduduk ber KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP (17 Tahun keatas atau telah menikah). Capaian rasio penduduk ber KTP per 2021 mencapai 97% dan tahun 2022 mencapai 99%.

Tabel 2.32 Tabel Rasio Penduduk ber-KTP

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	97	99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

b. Presentase Rasio Bayi Berakte ber-Akta Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran yang dimaksud adalah Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran dibagi Jumlah keseluruhan bayi lahir yang dilaporkan. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada Tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 2.33 Tabel Rasio Bayi berakte Kelahiran

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

c. Pasangan Berakte Nikah (%)

Capaian rasio pasangan berakte Nikah pada tahun 2021 adalah sebesar 76% dan tetap sama pada tahun 2022. Masih rendahnya capaian rasio pasangan berakte nikah ini oleh masih banyaknya masyarakat khususnya pasangan non muslim yang hanya melakukan pernikahan secara agama dan tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pasangan muslim banyak yang belum memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Tabel 2.34 Tabel Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	76	76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

d. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi kependudukan maupun instansi pengguna lain

serta data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun sistem error. Oleh karena itu, administrasi kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi pengguna maupun secara statistik data menggunakan Konsolidasi Data Bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali. Adapun ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten telah tersedia dan Instansi Pemerintah maupun swasta dapat melakukan Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data kependudukan.

Tabel 2.35 Tabel Database Skala Kabupaten Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Tidak ada (terpusat)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

e. KTP Nasioanl berbasis NIK

Pada tahun 2021 dan 2022 Disdukcapil Kab. Buru Selatan telah menggunakan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.36 Tabel KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat desa secara umum mencapai 100%, salah satunya persentase pelaksanaan ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksanakan dengan baik. Capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	Jumlah desa Berkembang	65	31	48
2.	Peresentase pelaksanaan ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan yang terlaksanakan dengan baik	100	100	100
3.	Jumlah desa yang melakukan penetapan RPJMDes, MusrenbangDes, RKPDes, dan APBDDes tepat aktu.	81	81	100

4.	Jumlah aparatur desa yang terlatih	162	0	0
5.	Persentase penggunaan dana desa untuk infrastruktur dan PKTD	40%	40%	100
6.	Jumlah desa yang memiliki produk unggul	6 desa	3 Desa	50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.7. Bidang Urusan Perhubungan

Pada urusan perhubungan, pencapaian kinerja umumnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Jumlah arus penumpang angkutan umum meningkat dari 57.044 orang di tahun 2021 menjadi 88.938 orang di tahun 2022. Begitupun indikator lain yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.38 Tabel Indikator Kinerja Daerah Perhubungan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	57.044	88.938
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	86	92
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10	10
5.	Persentase layanan angkutan darat (%)	12,59	12,77
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	26	28
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	6,12
9.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15.548	23.192
10.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan fery (orang)	38.470	56.936
11.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	3.089	8.810

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2023

Dalam hal aksesibilitas, di Buru Selatan terdata rasio panjang jalan meningkat dari 6,04 km per jumlah kendaraan menjadi 6,12 km per jumlah kendaraan di tahun 2022.

Tabel 2.39 Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	6,12

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Bur Selatan , 2023

Demikian juga dengan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.40 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	57.044	88.938
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	4.899,37	6.038,81

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2023

Jumlah pengguna fasilitas perhubungan di Buru Selatan tercatat meningkat di tahun 2022, salah satunya pengguna dermaga per tahun sebanyak 38.470 orang di tahun 2021 menjadi 56.936 orang di tahun 2022. Indikator lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	38.470	56.936
2.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	4.568,5	5.565
3.	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	3.089	8.810
4.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	10,87	37,01
5.	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	15.548	21.840
6.	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	312	436,8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2023

Begitupun dengan penumpang pesawat yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 berjumlah 1.359 orang menjadi 4.338 orang di tahun 2022. Data jumlah penumpang pesawat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Datang	1.359	4.338
2.	Pergi	1.730	4.472
Total		3.089	9.810

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2023

2.3.2.8. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan komunikasi dan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bidang urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Buru Selatan melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berikut merupakan capaian bidang urusan komunikasi dan informatika tahun 2021-2022:

**Tabel 2.43 Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022**

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	14,63	82,92

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Buru Selatan , 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat cakupan layanan telekomunikasi Kabupeten Buru Selatan mengalami kenaikan yang cukup besar walaupun belum menginjak angka 100% dalam kurung waktu satu tahun (2021-2022) yaitu sebesar 68,29%.

Alat komunikasi merupakan semua media atau alat yang saling terhubung yang digunakan untuk pertukaran informasi antar individu ataupun kelompok. Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah telepon genggam. Telepon genggam atau biasa disebut dengan *Handphone* ini merupakan alat komunikasi yang berkembang seiring dengan berkembangnya zaman sehingga banyak dimiliki orang-orang saat ini. Berikut Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang menggunakan Handphone/Telepon Genggam:

Tabel 2.44 Persentase penduduk Kabupatenn Buru Selatan yang Menggunakan Handphone/Telepon Genggam Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone	-	54,62
2.	Jumlah Penduduk	76.715	78.515
3.	Jumlah Penduduk yang Menggunakan Handphone	-	42.885

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Buru Selatan, 2023

Akses internet adalah jalur masuk suatu individua atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal kpeneomputer, komputer atau perangkat lainnya.Berikut persentase proporsi rumah tangga dengan akses internetd di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022:

Tabel: 2.45 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	1,28	1,45

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Buru Selatan , 2023

2.3.2.9. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Buru Selatan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 meskipun tidak signifikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Jumlah Koperasi Aktif	147	149
2.	Jumlah Seluruh Koperasi	208	212
3.	Persentase Koperasi Aktif	70,6%	70%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru Selatan , 2023

b. Usah Mikro dan Kecil

Tabel 2.47 Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Usaha Mikro	3.003	3.303
2.	Usaha Kecil	78	78

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru Selatan , 2023

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM

No.	Indikator	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	30	30	30	30
2.	Jumlah koperasi dan UKM penerima bantuann hibah	1 Koperasi dan 1 UKM	1 Koperasi dan 1 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM
3.	Jumlah produk UKM yang dipromosikan	10	10	15	15

4.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta design dan teknologi	12	12	15	15
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	----

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Buru Selatan , 2023

2.3.2.10. Bidang Urusan Penanaman Modal

Adapun jumlah investor di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 meningkat menjadi 538 yang sebelumnya berjumlah 271 di tahun 2021, begitupun jumlah investasi yang juga meningkat dan diikuti oleh rasio daya serap tenaga.

Tabel 2.49 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Jumlah Investor	271	538
2.	Nilai Investasi (Rupiah)	65.017.000.100	133.295.000.000
3.	Rasio Daya Serap Tenaga	289	1369

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buru Selatan , 2023

2.3.2.11. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Kepemudaan bertanggung jawab untuk mengembangkan organisasi pemuda dan wirausaha muda. Kabupaten Buru Selatan memiliki beberapa organisasi pemuda aktif dan wirausaha muda yang telah terealisasi dari beberapa jumlah yang telah ditargetkan, berikut persentase organisasi yang aktif dan wirausaha muda di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022:

Tabel 2.50 Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Organisai Pemuda (%) (Target 100%)	87,5	88,24
2.	Wirausaha Muda (%) (Target 41,33%)	35,01	31,61

Sumber : Dinas Kepeemudaan dan Olahraga Kab.Buru Selatan , 2023

Kabupaten Buru Selatan tidak hanya memiliki indikator kinerja dalam bidang kepemudaan saja, namun juga memiliki indikator kinerja dalam bidang olahraga. Namun di bidang olahraga ini sedikit berbeda dikarenakan ada telah terealisasi penuh sesuai dengan angka yang ditargetkan dan juga ada yang terealisasi dengan belum ditentukannya target. Berikut persentase Target dan Realisasi dari indikator kinerja bidang olahraga tahun 20221-2022:

Tabel 2.51 Persentase Bidang Olahraga Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Cakupan pembinaan Olahraga (%)	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat (%)	0.00	0.00	1.00	5.00
3.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	100.00	100.00	100.00	100.00
4.	Jumlah atlet berprestasi	0.00	31.00	1.00	52.00
5.	Jumlah prestasi olahraga	0.00	31.00	1.00	52.00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Buru Selatan, 2023

2.3.2.12. Bidang Urusan Perpustakaan

Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2021 mencapai 30,41 persen dan tidak mengalami peningkatan ditahun 2022. Sedangkan persentase pengunjung mengalami peningkatan di tahun 2022 yakni sebesar 3,85 persen atau naik 3,26 persen dari tahun 2021 yang hanya sebesar 0,59 persen. Kedepan dapat direncanakan basis data dengan menyediakan sumber buku-buku yang dapat diinformasikan kepada masyarakat tetapi harus berbasis internet, sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%)	2,36	0,59	2,48	3,85
2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (%)	50	30,41	55	30,41
3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk/1.000 (%)	0,013	0,069	0,013	0,073
4.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	100	3969	100	3969
5.	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki	66,3	33,33	67,63	33,33

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.13. Bidang Urusan Perpustakaan

Bidang Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah. Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan di daerah. Tabel berikut merupakan rincian data arsip Kabupaten Buru Selatan tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 2.53 Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	100	100	100	100
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	2	0	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Bidang Layanan Kelautan Dan Perikanan

Produksi perikanan adalah keseluruhan hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan ataupun hewan air lainnya yang diambil dari sumber perikanan alami maupun tempat . Pada Kabupaten Buru Selatan produksi perikanan dilakukan dengan keduanya yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Berikut jumlah produksi perikanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022:

Tabel 2.54 Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Produksi perikanan tangkap (ton)	12.000	12.086,2	13.000	12.407,2
2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	3,5	3,2	3,5	1

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2023

Mendasar dari produksi perikanan, Kabupaten Buru Selatan juga mengukur nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkap untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Berikut nilai tukar nelayan dan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022:

Tabel 2.55 Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Tukar Nelayan	117	117	118	118
2.	Jumlah Konsumsi ikan (ton)	4.200	3.171	4.500	5.153

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2023

Selain Nilai Tukar Nelayan, juga terdapat cakupan bina kelompok nelayan yang terealisasi sebesar 80% pada tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Bina Kelompok Nelayan	60	74	68	80

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.3.2. Urusan Bidang Pertanian

Pada urusan bidang pertanian, Kabupaten Buru Selatan mencapai indikator sebesar 100% di tahun 2022. Indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 32.57 Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Bahan Perlengkapan dan Bahan Pertanian yang di Beli	1 Paket	1 Paket	100
2.	Jumlah Pembangunan Lantai Jemur, Jalan Usaha Tani, dan Asapan Kopra	12 Unit	12 Unit	100
3.	Jumlah Bibit Tanaman, Obat-obatan dan Bahan Pertanian Yang Dibeli	1 Paket	1 Paket	100
4.	Jumlah Bibit/Tanaman, Obat-obatan, dan bahan Pertanian Yang dibeli	1 Paket	1 Paket	100
5.	Jumlah Bahan Obat-obatan dan Pupuk Yang Dibeli	1 Paket	1 Paket	100
6.	Jumlah Bahan Perlengkapan Pertanian Yang Dibeli	1 Paket	1 Paket	100
7.	Jumlah Obat-obatan dan Pakan Ternak Yang Dibeli	1 Paket	1 Paket	100
8.	Jumlah Bibit Tanaman Cengkeh Dan Pala	5.650 Anakan	5.650 Anakan	100
9.	Jumlah Asapan Kopra dan Mesin Potong Rumput	105 Unit	105 Unit	100

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.3.3. Bidang Urusan Pariwisata

Bidang urusan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan bertanggungjawab atas 2 sub urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata. Pada urusan kebudayaan terdapat 4 indikator kinerja yang telah terealisasi di tahun 2021-2022 yaitu (1)penyelenggaraan festival seni dan budaya, (2)benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan, (3)sarana penyelenggaraan seni dan budaya, (4)cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Berikut tabel capaian keempat indikator kinerja urusan kebudayaan:

**Tabel 2.58 Tabel Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2021-2022**

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya (Event)	2	1	2	1
2.	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (BCB)	-	-	15	7
3.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan (unit)	2	1	2	1
4.	Jumlah Cagar Budaya yang di Kelola Secara Terpadu (BCB)	12	5	12	5

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2023

Tabel. 2.59 Tabel Target Capaian Urusan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahunan			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	19,205	17,334	19,205	11,692
2.	Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	7	5	-	-
3.	Jumlah event promosi pariwisata (event)	2	2	4	4
4.	Jumlah pengembangan obyek wisata unggulan (destinasi)	2	1	3	2
5.	PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)	75.000.000	-	75.000.000	2.528.000
6.	Jumlah SDM Profesional Bidang Pariwisata (orang)	40	25	30	19
7.	Jumlah tenaga kerja pelaku usaha pariwisata	173	81	150	113

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

Untuk urusan perdagangan, semua indikator tercapai 100% pada tahun 2022. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan serta jumlah bantuan peralatan yang tersalurkan	30 Orang	30 Orang	100
2.	Jumlah pasar yang dikelola dan pedagang yang membayar retribusi pasar	1 Kecamatan	1 Kecamatan	100
3.	Jumlah pelaksanaan kegiatan Bazar di Namrole	1 Paket	1 Paket	100

4.	Jumlah pameran yang diikuti	1 Lokasi	1 Lokasi	100
5.	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ada di masyarakat serta jumlah alat ukur yang di awasi.	600 Unit	600 Unit	100
	Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan serta jumlah bantuan peralatan yang tersalurkan	30 Orang	30 Orang	100

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buru Selatan, 2023

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestic maupun internasional untuk kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha.

Tabel 2.61 Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2021

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berdasarkan jenis pengeluaran	2020	2021
Makanan (Rp)	419.416	423.318
Non Makan (Rp)	294.637	329.762
Total Pengeluaran rata-rata per kapita (Rp)	714.053	752.081
Presentase Makanan (%)	58,74	56,29
Presentase Non Makanan (%)	41,26	43,71

Sumber : Buru Selatan dalam Angka 2022, Data diolah Bappelitbang

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur khususnya pada bidang perhubungan merupakan hal yang penting dalam rangka mempermudah konektivitas antar wilayah, baik antar kecamatan, kecamatan dan Kabupaten maupun Kabupaten dan Provinsi. Berikut indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
Perhubungan :			
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	57.044	88.938
2.	Rasio ijin trayek	-	-
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	86	92



4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10	10
5.	Persentase layanan angkutan darat (%)	12,59	12,77
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	26	28
7.	Pemasangan Rambu-rambu	-	-
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	6,12
9.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15.548	23.192
10.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	38.470	56.936
11.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	3.089	8.810
Aksesibilitas Daerah			
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	6,12
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum			
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	57.044	88.938
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	4.899,37	6.038,81
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			
1.	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	38.470	56.936
2.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	4.568,5	5.565
3.	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	3.089	8.810
4.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	10,87	37,01
5.	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	15.548	21.840
6.	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	312	436,8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buru Selatan, 2023

Dalam hal konektivitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya, berikut data jumlah orang yang masuk dan keluar dari Kab. Buru Selatan berdasarkan jumlah penumpang pesawat Tahun 2021-2022.

Tabel 2.63 Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Datang	1.359	4.338
2.	Pergi	1.730	4.472
Total		3.089	8.810

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buru Selatan, 2023

a. Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan akan listrik di Kabupaten Buru Selatan sangatlah penting bagi masyarakat karena sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2022 pasokan listrik yang ada di wilayah Kabupaten Buru Selatan, pada umumnya dipasok oleh cabang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ulp Namrole, Kp Wamsisi, Kp. Leksula, Kp Ambalau.

**Tabel 2.64 Daya Tersambung pada PT. PLN (Persero)
Cabang/Ranting PLN tahun 2021-2022**

No.	Unit	Daya Terpasang Tahun 2021	Daya Terpasang Tahun 2022
1.	PLN Ulp. Namrole	1.870 KW	5.517KW
2.	PLN Kp. Wamsisi	960 KW	2.885KW
3.	PLN Kp. Leksula	340 KW	2.913KW
4.	PL Kp. Ambalau	370 KW	1.074KW
5.	PL Kp. Fena Fafan	100 KW	2.913KW
Jumlah		3.640 KW	12.390KW

Sumber : PLN Ranting Namrole, 2023

**Tabel 2.65. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Buru Selatan 2022**

No.	Unit	Jumlah Pelanggan Tahun 2022
1.	PLN Ulp. Namrole	5.654
2.	PLN Kp. Wamsisi	2.957
3.	PLN Kp. Leksula	2.985
4.	PL Kp. Ambalau	1.101
5.	PL Kp. Fena Fafan	2.985
Jumlah		12.697

Sumber : PLN Ranting Namrole, 2023

b. Hotel dan Restoran

Untuk hotel dan restoran di Buru Selatan tergambar dalam tabel 2.66. dimana jumlah penginapan/hotel sebanyak 16 unit di tahun 2022 dan 1 unit hotel berbintang.

**Tabel 2.66. Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran
di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022**

No.	Indikator Kinerja	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran (Unit)	-	-
2.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel (Unit)	-	16 Unit
3.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Berbintang (Unit)	-	1 Unit
4.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Melati (Unit)	-	-
5.	Jumlah dan Macam Pajak Daerah (Jenis)	-	9 Jenis
6.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi	-	-
7.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)	-	5 Buah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

c. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank

Fasilitas perbankan dan lembaga keuangan non bank di Buru Selatan terdata sebanyak 5 unit, dengan rincian bank cabang sebanyak 4 unit dan perusahaan asuransi sebanyak 1 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian/Realisasi	
		2021	2022
1.	Jenis dan Jumlah Bank Cabang (Unit)	-	4 Unit
2.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit)	-	1 Unit

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Lama Proses Perijinan

Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru Selatan beserta lama pembuatannya sebagai berikut.

Tabel 2.68 Tabel Jenis-jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan Di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi	Keterangan
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	Sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
4.	Izin Trayek	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
5.	Izin Operasi Angkutan	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
6.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	-	Sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
7.	Izin Mendirikan Bangunan	5 hari	11		Biaya tergantung perhitungan jenis dan luas bangunan
8.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJKN)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
9.	Izin Usaha Industri	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
10.	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko

11.	SIUP MB (Minuman Beralkohol)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
12.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
13.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	Sudah tidak berlaku
14.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	Diajukan lewat PB UMKU sistem OSS
15.	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)	5 hari	9	Rp.200.000	-
16.	Izin Apotek	5 hari	5	Rp.600.000	-
17.	Izin Depot Air Isi Ulang			Rp.200.000	Dikeluarkan oleh sistem OSS
18.	Izin Kosmetik		-	Rp.300.000	Dikeluarkan oleh sistem OSS
19.	Izin Praktek Bidan	5 hari	9	Rp.150.000	
20.	Izin Salon Kecantikan	-	-	Rp.300.000	Dikeluarkan oleh sistem OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
21.	Izin took obat	5 hari	5	Rp.300.000	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Buru Selatan, 2023

b. Angka Kriminalitas

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Buru Selatan, jumlah perkara pidana yang dilaporkan di Buru Selatan pada tahun 2022 sebanyak 28 kasus, perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 13 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian/ Realisasi
		2022
1.	Jumlah perkara pidana yang dilaporkan	28 Kasus
2.	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	13 Kasus

Sumber : Polres Kab. Buru Selatan, 2023

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan potensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Buru Selatan. Berikut persentase tingkat Pendidikan penduduk Kabupaten Buru Selatan berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.70 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat/ Ke Atas
Jenis Kelamin				
Laki-laki	15,21	28,10	24,57	32,13
Perempuan	18,15	27,68	24,89	29,28
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	23,23	29,25	22,41	25,12
40 Persen Tengah	13,62	30,01	25,79	30,58
40 Persen Teratas	11,72	22,25	26,50	39,54
Buru Selatan	16,67	27,89	24,73	30,71

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2022

2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.71 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan

No.	Urusan	Permasalahan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran guru belum merata pada sebagian besar sekolah di Kabupaten Buru Selatan khususnya di wilayah pedalaman dikarenakan belum adanya media Informasi, akses jalan, dan tidak adanya semangat pengabdian guru; b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), ruang kelas, Perpustakaan, TIK, lab Komputer; c. Sumber daya tenaga pengajar masih belum semuanya berkualitas; d. Masih rendahnya mutu siswa pada jenjang SD, SMP; e. Belum optimalnya pengembangan Pendidikan anak usia dini (PAUD);
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian stunting belum optimal b. Masih terdapat kasus kematian ibu melahirkan dan bayi (AKI/AKB) c. Belum optimal pelayanan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal e. Belum optimal pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan lansia f. Minimnya sarana dan prasarana transfusi darah



		<p>g. Masih Tingginya Angka Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terjadi di Masyarakat</p> <p>h. Belum Optimal Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di daerah pesisir</p> <p>i. Belum Optimal Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit</p> <p>j. Belum adanya sarana transportasi umum sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau RSUD</p> <p>k. Masih tingginya tenaga medis yang tidak menetap pada lokasi yang ditugaskan</p> <p>l. Belum optimalnya penanganan dan pencegahan stunting karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas sektor yang masih minim/lemah • Alokasi anggaran untuk stunting masih sangat terbatas • Masih terdapat daerah yang sulit untuk dijangkau, serta kultur masyarakatnya (terkait Adat) <p>m. Kesadaran /pengetahuan masyarakat terkait stunting masih rendah</p>
3.	Pekerjaan Umum	<p>a. Belum Optimalnya Pembangunan Jalan dalam kota, antar kecamatan, wilayah berbasis ekonomi dan wilayah permukiman adat terpencil</p> <p>b. Belum optimalnya pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dan sanitasi bagi masyarakat</p> <p>c. Terbatasnya aksesibilitas transportasi pada wilayah terpencil.</p> <p>d. Terbatasnya sarana prasarana jalan dan jembatan.</p>
4.	Perumahan	<p>a. Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dinas sarana dan prasarana pendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</p> <p>b. Minimnya sarana pendukung Dinas sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan aktifitas pelayanan publik</p> <p>c. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan pemukiman belum memadai</p> <p>d. Masih banyak rumah tidak layak huni</p> <p>e. Masih banyak pemukiman kumuh</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih belum layak atau kurang maksimal</p> <p>g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau</p> <p>h. Kurangnya pemahaman masyarakat dan cara penanggulangan bahaya kebakaran sehingga mengakibatkan kerugian material maupun jiwa</p> <p>i. Ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang belum memadai</p>
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perbup</p> <p>b. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya anggota LINMAS</p> <p>d. Luasnya wilayah kerja dan penduduk yang heterogen</p> <p>e. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur</p> <p>e. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat</p>
6.	Sosial	<p>a. Belum maksimalnya prosedur Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar bidang sosial kepada Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar ke dalam penganggaran Dinas</p>
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		



1.	Tenaga Kerja	a. Kurangnya tenaga kerja yang terampil/ kurangnya kompetensi tenaga kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kemiskinan b. Tingginya pengaruh sistem sosial dan budaya masyarakat adat c. Rendahnya pendidikan dan pelatihan perempuan di berbagai bidang (politik, pemerintahan dan swasta serta ekonomi) d. Rendahnya Partisipasi Angka Kerja Perempuan e. Kurangnya pemenuhan hak anak termasuk anak yang berkebutuhankhusus
3.	Lingkungan Hidup	a. Kurangnya kebersamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan b. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas c. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional d. Belum adanya kerjasama antar unit organisasi di Lingkup Kabupaten Buru Selatan e. Keterbatasan daya yang akurat f. Kurang tersedianya armada (truck) pengangkutan sampah sehingga mobilitas pengangkutan sampah menjadi terbatas yang g. menyebabkan sering terjadinya penumpukan di beberapa titik TPS (Tempat Pembuangan Sampah) h. Kurangnya Tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah terkadang masyarakat melakukan pembuangan sampah pada tempat yang tidak terdapat bak sampah
4.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kemampuan sumber daya manusia dan pelaksanaan teknis yang tidak merata b. Upaya kearah terintegrasinya peraturan antara sektor dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan c. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan d. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Desa-desa masih di jabat oleh pejabat kepala Desa bukan kepala Desa Defenitif b. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Masih Kurang c. Kurangnya bimtek terhdap aparaturn Pemerintahan Desa dan BPD yang disebabkan karena Minimnya Anggaran d. Kualitas Sumber Daya Manusia di tingkat desa yang Minim e. Belum adanya Administrasi Desa tentang tapal batas desa (peta desa) f. Belum adanya Profil yang dimiliki oleh Desa g. Kurangnya Koordinasi antara Desa, Kecamatan dan Pihak Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan Masyarakat Desa h. Kurangnya peran aktif Masyarakat Desa dalam lembaga kemasyarakatan i. BUMDES yang dibentuk oleh Desa tidak sesuai dengan potensi Desa yang dimiliki. j. Tidak adanya data tentang Potensi Desa k. Keterbatasan SDM dalam mengelola BUMDES
6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kurangnya Advokasi pemanfaatan data pembangunan keluarga di lintas sektor b. Kurangnya edukasi dari instansi terkait lintas sektor tentang program KB c. Terbatasnya sarana penunjang penyuluhan KB



		<p>d. Belum adanya pelatihan khusus tenaga pelaksana pelayanan KB di lapangan (Bidan dan Dokter)</p> <p>e. Kualitas tenaga PPKBD masih kurang dikarenakan belum dilatih sehingga proses penggerakan program dibidang KB khususnya tidak maksimal</p> <p>f. Terbatasnya sarana penyimpanan Alokon di Faskes</p>
7.	Perhubungan	<p>a. Masih belum efisiennya pergerakan barang maupun penumpang antar wilayah</p> <p>b. Belum optimalnya konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Buru Selatan</p>
8.	Komunikasi dan Informatika	<p>a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan</p> <p>b. Kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur serta keterbatasan SDM yang membidangi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten Buru Selatan mengingat keterbatasan anggaran yang diterima oleh Dinas</p> <p>c. Kebutuhan akan pengumpulan data (statistik) masih terkendala dengan kebutuhan akan infrastruktur dan SDM serta belum adanya integrasi data antar OPD.</p> <p>d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan</p> <p>e. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan</p>
9.	Koperasi dan UKM	<p>a. Keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tidak tercover semua koperasi yang tersebar di 6 kecamatan untuk dilakukan pendataan dan pengawasan</p> <p>b. Penambahan Pos anggaran untuk kegiatan diklat perkoperasian dan kewirausahaan dalam pengembangan SDM bagi aparatur</p> <p>c. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi serta usaha mikro dan kecil belum optimal</p> <p>d. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi serta usaha mikro dan kecil</p>
10.	Penanaman Modal	<p>a. Kurangnya Sumber Daya Manusia berupa Sarjana IT, Sarjana Bahasa Inggris dan Sarjana Desain Grafis</p> <p>b. Untuk Sarana dan Prasarana berupa belum adanya Mobil Operasional Layanan Perizinan, laptop dan Komputer/PC, Meubeler Meja Eselon IV, Kamera dan Drone serta Tempat Parkir</p> <p>c. Anggaran pengembangan dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Buru Selatan</p>
11.	Kepemudaan dan Olahraga	<p>a. Terbatasnya sarana prasarana olahraga yang representatif;</p> <p>b. Kurangnya Pembinaan olahraga berbakat</p> <p>c. Masih belum optimalnyanya Penguatan kelembagaan kepemudaan</p>
12.	Perpustakaan dan Arsip	<p>a. Kurangnya jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan penggunaan media sosial (Internet) sebagai bahan pembelajaran.</p> <p>b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan</p>
Urusan Pilihan		
1.	Perikanan	<p>a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang;</p> <p>b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sektor Perikanan Baik Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Maupun Pelatihan;</p> <p>c. Kurangnya sarana prasana budidaya perikanan;</p> <p>d. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perikanan untuk pendapatan daerah.</p>



		e. Belum optimalnya Pengembangan infrastruktur untuk pasar lelang.
2.	Pertanian	a. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi pertanian; b. Masih kurangnya regulasi dan sarana prasarana mendukung pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian c. Sistem pengolahan ternak belum memenuhi standar pengolahan yang baik d. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular (PHMS) serta zoonosis e. Masih rendahnya mutu hasil panen mengakibatkan hasil panen belum mampu bersaing dengan produk pertanian dari luar f. Belum optimalnya fungsi kelompok tani sebagai wahana kerja sama dan unit produksi
3.	Pariwisata	a. Belum optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pariwisata b. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan c. Belum optimalnya kerjasama kemitraan antar stakeholder di sektor pariwisata d. Belum memadainya basis data (database) yang dimiliki dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata dan pelayanan di Kabupaten Buru Selatan e. Belum optimalnya strategi promosi/pemasaran pariwisata serta pemanfaatan media massa (cetak dan elektronik) sebagai sarana promosi pariwisata nasional f. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata g. Masih kurangnya kerja sama dalam pengembangan kepariwisataan masyarakat tentang kepariwisataan dalam lingkungan kawasan daerah wisata h. Lokasi/ medan yang sulit
4.	Perindustrian	a. Jumlah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak seimbang dengan jumlah pelaku usaha sehingga diperlukan adanya bantuan yang maksimal sesuai jumlah pelaku usaha yang ada b. Belum optimalnya pengelolaan produk pasca produksi/peningkatan kualitas mutu produk
5.	Perdagangan	a. Fasilitas jumlah kios/toko yang disiapkan oleh pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal b. Tera dan tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Penera dan Sarana Prasarana Tera dan Tera Ulang belum ada c. Pelaksanaan pemantauan kebutuhan pokok dan pengawasan barang kadaluarsa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan adanya keterbatasan anggaran
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1.	Pertanahan	a. Terhambatnya proses penerbitan sertifikasi aset tanah pemda akibat dari tidak lengkapnya dokumen pengadaan tanah pemda
2.	Statistik	a. Belum optimalnya sistem satu data b. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaannya c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada rendahnya data terolah spasial dan aspaspial



		d. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok, fungsi serta peran wali data sektoral pemerintah Kabupaten Buru Selatan
3.	Pengawasan	a. Terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan dikerjakan oleh masing-masing Pejabat Pengawasan Pemerintah dan Auditor c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pengawasan d. Disiplin dan kinerja dalam pembuatan Laporan Pemeriksaan (LHP) belum optimal, hal ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat dipengaruhi oleh banyaknya penugasan di luar PKPT terutama menangani Kasus Pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan terlambatnya Auditor dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan
4.	Perencanaan	a. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan c. Optimalisasi perencanaan terintegrasi masih belum terlaksana secara komprehensif dengan dukungan <i>software</i> serta SDM perencana yang berkualitas
5.	Keuangan	a. Perubahan regulasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Terbatasnya Pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah
6.	Kepegawaian	a. Mekanisme kenaikan pangkat bagi pegawai yang belum tertata dengan baik; b. Pengisian Jabatan masih belum dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme; c. Mekanisme Pengembangan Karir PNS guna mendorong profesionalitas PNS belum berjalan efektif karena kesenjangan kualifikasi, dan kompetensi pegawai sangat besar; d. Pola karir bagi PNS belum jelas dan masih belum ada komitmen yang kuat dari para stakeholder untuk melaksanakan pola karir sesuai ketentuan; e. Pengisian Jabatan belum memperhatikan kualifikasi pendidikan, spesialisasi keilmuan dan kompetensi; f. Banyak PNS yang belum memahami kewenangan dalam menegakkan disiplin; g. Belum optimalnya Peningkatan kesejahteraan ASN melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
7.	Penelitian dan Pengembangan	a. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal
8.	Penanggulangan Bencana Daerah	a. Belum Optimalnya Pembangunan sarana mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam bagi keamanan masyarakat
9.	Fungsi Lainnya	a. Masuknya perilaku sosial dan budaya luar yang negatif mengaburkan nilai budaya lokal dan kearifan lokal b. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintahan c. Rentang kendali dan pelayanan publik belum optimal

		<p>d. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat</p> <p>e. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah</p> <p>f. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. EVALUASI RKPD KABUPATEN BURU SELATAN

Tabel 2.72 Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022

No.	Urusan	Anggaran APBD 2022	Realisasi Anggaran Triwulan I-IV	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Dinas Pendidikan	127,050,082,440	73,394,652,455	76.01	T	57.77	R
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	77,356,534,638	71,498,770,513	97.29	ST	92.43	ST
3	Rumah Sakit Umum Daerah	18,747,041,000	18,214,607,205	81.35	T	97.16	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,557,417,000	61,584,860,595	95.68	ST	76.45	T
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9,213,037,100	8,853,612,954	81.71	T	96.10	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2,978,958,047	2,935,955,997	95.73	ST	98.56	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,840,321,200	9,368,580,011	99.54	ST	63.13	R
8	Dinas Sosial	4,182,589,000	4,146,840,424	99.88	ST	99.15	ST
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
9	Dinas Ketahanan Pangan	5,328,635,217	5,175,463,145	100.00	ST	97.13	ST
10	Dinas Lingkungan Hidup	19,185,910,408	16,099,758,499	87.92	T	83.91	T
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3,602,951,600	3,548,156,181	99.42	ST	98.48	ST
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,256,766,000	4,123,219,442	99.97	ST	96.86	ST
13	Dinas Perhubungan	7,441,051,900	6,654,902,074	82.88	T	89.43	T
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,027,546,400	2,974,971,984	99.99	ST	98.26	ST
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,790,508,200	5,545,613,606	99.99	ST	95.77	ST
16	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,791,072,000	3,696,100,363	96.98	ST	97.49	ST



17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5,444,980,479	5,320,124,742	99.97	ST	97.71	ST
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2,207,491,000	2,195,292,030	94.98	ST	99.45	ST
Urusan Pilihan							
19	Dinas Perikanan	7,799,855,000	7,510,334,072	98.50	ST	96.29	ST
20	Dinas Pariwisata	4,208,260,500	4,001,762,929	96.46	ST	95.09	ST
21	Dinas Pertanian	9,155,028,800	9,015,782,628	99.08	ST	98.48	ST
22	Dinas Perdagangan	5,045,042,000	4,513,086,594	96.17	ST	89.46	T
Urusan Fungsi Penunjang Urusan							
23	Inspektorat	5,217,247,000	5,017,516,328	97.76	ST	96.17	ST
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,928,298,000	9,784,676,922	96.19	ST	98.55	ST
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	129,481,574,750	11,733,842,565	91.99	ST	9.06	SR
26	Badan Pendapatan Daerah	3,902,240,950	3,714,061,446	96.22	ST	95.18	ST
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,392,349,000	9,738,867,486	93.14	ST	93.71	ST
Urusan Fungsi Pendukung							
28	Sekretariat Daerah	23,586,472,000	23,228,996,171	98.30	ST	98.48	ST
29	Bagian Pemerintahan	1,432,948,000	1,428,067,400	100.00	ST	99.66	ST
30	Bagian Perekonomian dan SDA	1,737,100,000	1,729,388,826	99.21	ST	99.56	ST
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10,912,059,950	10,605,748,750	95.71	ST	97.19	ST
32	Bagian Hukum	1,355,200,052	1,342,791,172	97.14	ST	99.08	ST
33	Bagian Umum	19,990,321,275	19,731,976,273	99.47	ST	98.71	ST
34	Bagian Organisasi Tata Laksana	1,200,599,500	1,168,980,984	83.45	T	97.37	ST
35	Bagian Humas	1,182,900,000	1,176,278,401	96.15	ST	99.44	ST
36	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1,139,700,000	1,136,009,927	94.34	ST	99.68	ST
37	Bagian Administrasi Pembangunan	1,134,891,590	1,112,159,100	100.00	ST	98.00	ST
38	Sekretariat DPRD	34,734,121,858	33,799,574,299	96.88	ST	97.31	ST
Urusan Pemerintahan Umum							
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,942,618,130	5,764,709,442	98.63	ST	97.01	ST
Urusan Kewilayahan							
40	Kecamatan Namrole	1,455,562,000	1,454,373,806	95.91	ST	99.92	ST
41	Kecamatan Leksula	3,042,287,972	3,015,596,664	98.08	ST	99.12	ST
42	Kecamatan Waesma	1,730,576,000	1,667,188,716	99.16	ST	96.34	ST
43	Kecamatan Ambalau	1,664,005,000	1,540,504,225	91.58	ST	92.58	ST



44	Kecamatan Kepala Madan	1,869,413,000	1,816,855,026	99.47	ST	97.19	ST
45	Kecamatan Fena Fafan	1,653,871,000	1,606,317,025	100.00	ST	97.12	ST

Sumber : Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2022

Keterangan : ST : Sangat Tinggi
T : Tinggi
S : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

Tabel 2.73 Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023

No.	Urusan	Anggaran APBD 2023	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.	Dinas Pendidikan	173.723.210.900	13.511.459.675	5,09	SR	7,78	SR
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	86.316.069.600	6.579.067.910	13,71	SR	7,62	SR
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	20.806.050.000	1.621.808.730	2,81	SR	7,79	SR
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.363.330.928	2.538.997.716	1,80	SR	5,60	SR
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.228.151.000	514.024.561	9,39	SR	8,25	SR
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.985.482.000	515.496.467	16,00	SR	17,27	SR
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.290.463.968	4.434.961.866	2,60	SR	60,83	R
8.	Dinas Sosial	3.862.666.800	572.244.124	10,20	SR	14,81	SR
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
9.	Dinas Ketahanan Pangan	4.157.104.000	468.204.889	11,69	SR	11,26	SR
10.	Dinas Lingkungan Hidup	9.588.931.300	1.207.124.551	16,99	SR	12,59	SR
11.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3.228.868.000	536.631.426	55,47	R	16,62	SR
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.007.347.400	595.683.574	3,45	SR	14,86	SR
13.	Dinas Perhubungan	32.045.146.962	447.610.611	3,29	SR	1,40	SR
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.650.209.000	437.999.823	19,27	SR	16,53	SR
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.223.116.200	415.343.684	0,34	SR	5,05	SR



16.	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.022.490.000	1.052.046.279	11,10	SR	26,15	SR
17.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.389.503.000	278.305.313	1,21	SR	6,34	SR
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.310.530.710	405.089.678	13,88	SR	17,53	SR
Urusan Pilihan							
19.	Dinas Perikanan	4.903.706.800	474.098.234	40,72	SR	9,67	SR
20.	Dinas Pariwisata	3.463.178.000	407.664.171	10,78	SR	11,77	SR
21.	Dinas Pertanian	7.850.886.740	918.090.669	9,75	SR	11,69	SR
22.	Dinas Perdagangan	4.649.789.000	342.010.285	4,25	SR	7,36	SR
Urusan Fungsi Penunjang Urusan							
23.	Inspektorat	3.822.834.000	765.321.502	8,71	SR	20,02	SR
24.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.650.308.000	1.233.812.070	10,36	SR	12,79	SR
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	8.954.992.900	1.718.216.685	27,09	SR	19,19	SR
26.	Badan Pendapatan Daerah	4.218.362.000	506.579.293	16,03	SR	12,01	SR
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.777.276.000	534.464.803	10,62	SR	6,09	SR
Urusan Fungsi Pendukung							
28.	Sekretariat Daerah	19.472.900.000	3.627.115.568	18,71	SR	18,63	SR
29.	Bagian Pemerintahan	1.862.399.600	588.502.200	20,43	SR	31,60	SR
30.	Bagian Perekonomian dan SDA	1.003.600.000	200.133.000	22,73	SR	19,94	SR
31.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.741.600.000	314.200.000	10,27	SR	2,93	SR
32.	Bagian Hukum	969.000.000	102.509.200	14,58	SR	10,58	SR
33.	Bagian Umum	12.554.800.000	2.249.616.129	10,05	SR	17,92	SR
34.	Bagian Organisasi Tata Laksana	1.091.869.000	83.745.555	15,03	SR	7,67	SR
35.	Bagian Humas	1.117.000.000	149.260.600	18,75	SR	13,36	SR
36.	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.168.400.000	79.400.000	24,79	SR	6,80	SR
37.	Bagian Administrasi Pembangunan	931.000.000	123.079.000	19,18	SR	13,22	SR
38.	Sekretariat DPRD	29.799.684.000	6.736.740.826	10,34	SR	22,61	SR
Urusan Pemerintahan Umum							
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.489.421.200	426.018.537	10,06	SR	6,56	SR
Urusan Kewilayahan							
40.	Kecamatan Namrole	1.546.668.800	317.140.270	10,73	SR	20,50	SR
41.	Kecamatan Leksula	2.874.395.000	534.092.413	20,00	SR	18,58	SR
42.	Kecamatan Waesma	1.522.971.000	271.321.573	16,57	SR	17,82	SR



43.	Kecamatan Ambalau	1.635.929.000	181.329.516	9,18	SR	11,08	SR
44.	Kecamatan Kepala Madan	1.759.615.000	301.160.600	10,85	SR	17,12	SR
45.	Kecamatan Fena Fafan	1.690.802.000	286.401.165	20,89	SR	16,94	SR
TOTAL		575.722.059.808	59.604.124.741				

Sumber : Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2023

Keterangan : ST : Sangat Tinggi
T : Tinggi
S : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

BAB III

KERANGKA

EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN

DAERAH



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026. Arah Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 searah dengan tema Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 yaitu “Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Mitigasi Bencana dan Pemerintah Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis”, serta berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 yang merupakan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tema arah kebijakan yaitu “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Buru Selatan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

3.1.1. Isu Perekonomian Global

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “*Is a Global Recession Imminent?*” memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 ini. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi.

Ketidakpastian global saat ini sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi menjadi melonjak. Sudah terdapat 5 negara dengan lonjakan inflasi hingga di atas 80%. Sementara inflasi Indonesia sampai akhir Desember 2022 mencapai 5,51% dan diprediksi akan meningkat di tahun selanjutnya. Ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global, berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, dihadapkan juga dengan tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun ini, yaitu:

1. Pandemi Covid-19, walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun pada saat meluasnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani Covid-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi Covid-19;
2. Perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 ini;
3. Turunnya permintaan logam dan energi global dari Tiongkok;
4. Tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 ini dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat;
5. Kenaikan suku bunga acuan;
6. Investasi melambat;
7. Dampak perubahan iklim menyebabkan disrupsi rantai pasok global akibat krisis sumber daya

Dari beberapa faktor pemicu diatas, resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Selain karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga menyebabkan ekonomi menjadi stagnan atau dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi, resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau deflasi. Situasi ini disebut bisa membuat ekonomi tahun 2023 akan lebih gelap.

Dampak lain dari terjadinya resesi adalah sebagai berikut :

1. Perlambatan ekonomi akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan sering terjadi bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi.
2. Kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman.
3. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu.

Hingga akhir tahun 2022, perusahaan di banyak negara mulai mengurangi hasil produksinya karena permintaan global mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kelesuhan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global akan berkontraksi.

3.1.1.1. Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Tahun 2023

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejala ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain.

Ancaman resesi ekonomi global terhadap Indonesia akan ditandai, antara lain:

1. Permintaan ekspor produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan menurun, terutama dari AS, Eropa, dan Tiongkok;
2. Penurunan harga beberapa komoditas minyak mentah, minyak sawit mentah (CPO), dan logam dasar;
3. Kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri;
4. Pertumbuhan ekonomi melambat;
5. Meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah.

Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Walaupun kinerja perekonomian nasional saat ini cukup positif, namun jika resesi ekonomi global benar-benar terjadi maka Indonesia diyakini akan terkena dampaknya dan dapat menyeret Indonesia ke dalam “jurang” resesi ekonomi tersebut.

Dengan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Daerah, pengusaha dan masyarakat, kondisi perekonomian Indonesia mampu menahan laju inflasi dan melalui badai resesi di tahun 2023. Masyarakat diharapkan tidak panik untuk menarik dananya di bank-bank, tetap melakukan investasi dalam negeri guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor. Selain itu, menunda membeli barang impor dan mencintai produk domestik dan tidak

membeli mata uang asing secara berlebihan karena akan berdampak meningkatkan inflasi.

3.1.2. Kondisi dan Target Perekonomian Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yakni : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Visi Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

Aspek pembangunan ekonomi nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,31% (yoy) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022. Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga ditengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Berdasarkan data BPS tercatat bahwa laju inflasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,64 poin yaitu 5,51% (yoy) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,87% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar PDB dengan mampu tumbuh tinggi sebesar 5,30% (yoy), sementara konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tumbuh signifikan mencapai 1,20 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mampu tumbuh sebesar 30,49 persen sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha. Adanya peningkatan realisasi program perlindungan sosial sebesar 12,46% (yoy) dan peningkatan realisasi subsidi BBM sebesar 111,96% (yoy) mendorong meningkatnya daya beli masyarakat. Mobilitas masyarakat yang semakin pulih menjadi determinan utama pendorong aktivitas ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun sisi sektoral. Di saat yang sama, Pemerintah juga mengambil langkah-langkah responsif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan inflasi global.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik pada Triwulan III-2022 juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar US\$14.92 miliar, atau tumbuh sebesar 12,58% (yoy). Indonesia juga masih mendapatkan windfall profit akibat tingginya harga beberapa komoditas unggulan yang didominasi oleh batu bara 13,31%, kemudian minyak kelapa sawit 8,95%, serta besi dan baja di angka 6,38%. Hasilnya, sektor ekspor mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy).

Sementara itu, impor juga tumbuh tinggi sebesar 22,98% (yoy) selama Triwulan III-tahun 2022 dengan didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi, sehingga masing-masing mampu tumbuh 34,22% dan 44,08% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III tahun 2022. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% (yoy). Sektor utama lainnya, seperti Sektor Pertambangan dan Pertanian mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,22% (yoy) dan 1,65% (yoy). Di saat yang sama, Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 25,81% (yoy), diikuti Akomodasi dan Makanan Minuman 17,83% (yoy) dan Administrasi Pemerintahan 12,42% (yoy).

Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2022 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tercatat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 68,63% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,86%, lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Secara spasial, seluruh daerah di Indonesia juga melanjutkan pertumbuhan positif pada Triwulan III-2022. Meski masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,30%, kelompok provinsi di Pulau Sulawesi mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 8,24% secara (yoy) di mana industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian menjadi sumber pertumbuhan utama.

Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan semakin cerah yang tercermin dari berbagai *leading indicators*, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus berada di level optimis.

Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga semakin bergeliat dan tergambar dari level *Purchasing Managers' Index* (PMI) Indonesia pada September 2022 yang kembali melanjutkan level ekspansif selama 14 bulan beruntun dengan berada di tingkat 51,8. Nilai PMI Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand (51,6), Vietnam (50,6), Malaysia (48,7), dan Myanmar (45,7).

Di tengah beragam tantangan, kinerja APBN tetap positif dan terkendali, ditopang pendapatan yang sangat baik. Hingga September 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp1.974,7 triliun atau 107,0 persen dari Pagu, tumbuh 45,7 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp1.310,5 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp232,1 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp431,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi PNBP tumbuh 34,4 persen (yoy) yang terutama didorong dari Pendapatan SDA, KND, dan PNBP Lainnya. Realisasi PNBP SDA migas tumbuh 76,8 persen (yoy), terutama didorong kenaikan rata-rata ICP selama delapan bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 100,7 persen (yoy), terutama disebabkan kenaikan pendapatan pertambangan minerba. Selanjutnya, realisasi PNBP dari KND tumbuh 37,6 persen, terutama berasal dari dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9 persen. Realisasi PNBP lainnya tumbuh 41,1 persen, didorong Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU berkontraksi 27,2 persen akibat turunnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit.

Belanja negara tumbuh, namun perlu tetap terus diakselerasi. Pengelolaan fiskal yang inklusif dan pruden di tengah kondisi kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar, mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan. Realisasi pembiayaan utang hingga September 2022 mencapai Rp478,9 triliun atau 50,7 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 26,0 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan implementasi SKB I dan III, sekaligus sebagai tahun terakhir pelaksanaan SKB. Hingga 18 Oktober 2022, SKB I (BI sebagai standby buyer) telah tercapai sebesar Rp41,5 triliun, sementara realisasi SKB III mencapai Rp95,4 triliun. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile. Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang baik dan langkah antisipatif pengadaan utang antara lain:

1. Penyesuaian target penerbitan utang tunai;
2. Penerbitan SBN Valas menyesuaikan kondisi market yang volatile dan kondisi kas yang masih cukup ample;
3. Optimalisasi SBN domestik melalui SKB III;
4. Penerbitan SBN Ritel sebagai upaya perluasan basis investor domestik;
5. Fleksibilitas Pinjaman Program.

Secara keseluruhan kinerja APBN cukup baik dan masih mencatatkan surplus ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan. Peran masyarakat dalam membantu penguatan perekonomian dan ketahanan ekonomi Indonesia sangat diharapkan. Inflasi diikuti oleh kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang diambil bank sentral di negara lainnya.

Kebijakan dan strategi pemerintah akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga inflasi di level yang stabil. Kebijakan fiskal masih menjadi instrumen utama sebagai *shock absorber*, sementara stabilitas harga akan dijaga melalui Program kebijakan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Untuk jangka menengah panjang, Pemerintah akan terus memperkuat fundamental ekonomi bangsa melalui peningkatan kualitas SDM, dan melanjutkan reformasi struktural. Kondisi dan target perekonomian nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Kondisi dan Target Perekonomian Nasional

No.	Indikator	Capaian 2022	Target 2023 (RKP)	Target 2024 (RPJMN)	Target 2024 (RKP)
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,31	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	7,5-8,5	6,0-7,0	6,5-7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
4	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	72,91	73,31-73,49	75,54	73,99-74,02
5	Indeks Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	26,87	27,02	27,3	27,27
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	107,33	105-107	105	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106,5	107-108	107	107-110

Sumber : - Sambutan Kepala Bappenas pada Musrenbang RKPD Prov. Maluku TA. 2024, 2023
- RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan data World Bank dan IMF (data Produk Domestik Bruto-Paritas Daya Beli), di tahun 2024 Indonesia diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia, ini dibuktikan dengan Kerja keras bangsa ini dalam penanganan Covid-19 tahun 2020 yang merupakan kunci penentuan pemulihan di tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, pada tahun 2024 akan terjadi pergeseran susunan perekonomian terbesar di dunia. Asia akan semakin mendominasi posisi 5 teratas, menggeser posisi beberapa negara Eropa. Setelah Tiongkok dan Jepang yang saat ini sudah berada di posisi 5 besar, Indonesia dan India diprediksi akan menggantikan posisi Inggris dan Jerman. Salah satu alasan dibalik pergeseran dominasi ekonomi ini adalah pertumbuhan kelompok kelas menengah di Asia.

Selain kelas menengah, sisi demografi juga berkontribusi positif pada pergeseran dominasi Asia. Menurut World Economic Forum, di saat Tiongkok diprediksi terus melandai pertumbuhannya seiring populasi penduduknya yang menua, Indonesia, Filipina, diharapkan menjadi champion perekonomian Asia dengan motor pertumbuhan berupa meningkatnya angkatan kerja.

Prediksi ini perlu kita syukuri dan perlakukan sebagai motivasi bagi Indonesia. Pemerintah harus terus melakukan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, diharapkan dampak krisis dapat diminimalisir, perekonomian segera bangkit, dan Indonesia dapat terus merealisasikan aspirasinya menjadi perekonomian besar dan maju di dunia.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2024 melanjutkan kebangkitan 2023 yang diperkirakan tumbuh 4,5 persen sampai 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi 2024 tersebut dibarengi dengan tingkat inflasi yang diyakini turun ke level 2,5 plus minus 1 persen dari proyeksi normalnya inflasi 2023 ke level normal yakni 3 plus minus 1 persen.

Stabilitas eksternal pada 2024 juga akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan yang diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,2 sampai defisit 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara dari sisi ketahanan sistem keuangan akan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit dan likuiditas dengan kredit yang diprediksikan tumbuh pada kisaran 10 sampai 12 persen pada 2023 dan 2024. Untuk ekonomi dan keuangan digital pun akan meningkat pada 2024 dengan nilai transaksi e-commerce diprakirakan mencapai Rp.689 triliun, uang elektronik Rp.640 triliun dan digital banking lebih dari Rp.87 ribu triliun.

3.1.2.1. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas perlu dilakukan diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

3.1.2.2. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya

penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

3.1.2.3. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

3.1.3. Kondisi Perekonomian dan Target Provinsi Maluku

Visi pembangunan Provinsi Maluku yakni “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”, merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2019 – 2024. Sedangkan Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; (3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; (5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; (6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Tabel 3.2 Kondisi dan Target Perekonomian Provinsi Maluku

No.	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,11**	6,55 - 6,93	6,10 – 6,71
2	Inflasi (% , yoy)	6,28%	3,45 - 4,25	2,09-2,99
3	Tingkat Kemiskinan (%)	16,23 (September)	14,73	15,73
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,88% (Agustus)	5,65	6,05
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70,22 (Deesember)	69,81	70,69
6	Indeks Rasio Gini (poin)	0,306 (September)	0,317	0,295

Sumber : - RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
 - Provinsi Maluku Dalam Angka 2023
 - Bappeda Provinsi Maluku, 2023
 - Ket : ** Angka Sangat Sementara

3.1.3.1. Perkembangan Ekonomi Regional Maluku

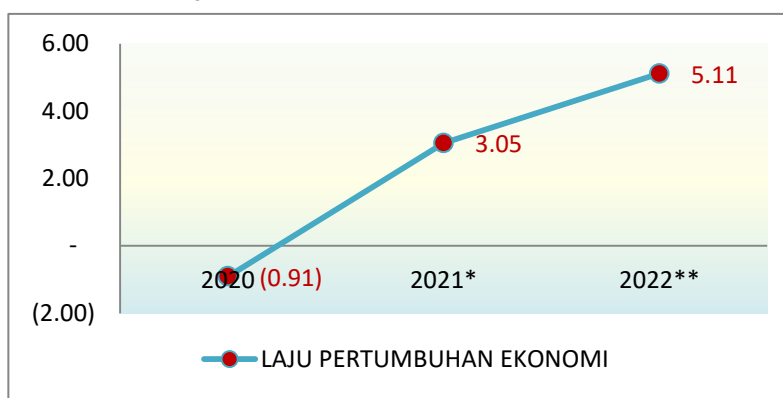
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2022 sebesar 5,11 persen (yoy) yang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sebesar 4,85 persen. Sehingga, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan kuat untuk menghadapi tantangan di tahun 2023 ini.

Secara nominal, pada triwulan III 2022, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp.13,64 triliun. Sedangkan, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tercatat sebesar Rp.8,43 triliun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku secara tahunan ini dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Ada dua faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Di antaranya, yaitu didorong oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga serta Konsumsi Pemerintah. Mengingat tahun 2023 berpotensi mengalami krisis global sekaligus domestik, maka pemerintah daerah perlu membuat perencanaan untuk mengantisipasi prediksi tersebut diantaranya dapat memperkuat komponen pendorong lainnya agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku tidak anjlok.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2023 diprediksi akan semakin menguat dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun lapangan usaha yang berpotensi menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, administrasi pemerintahan, dan perdagangan besar.

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku



Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2023

Ket : * = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

B. Inflasi

Inflasi Provinsi Maluku di tahun 2022 tercatat sebesar 6,28 persen (yoy). Capaian inflasi tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2021, yang tercatat hanya sebesar 4,01 persen (yoy). Tingginya inflasi Maluku tidak lepas dari gejolak harga energi global yang berdampak pada penyesuaian harga BBM. Selain itu, kondisi pandemi covid-19 yang berangsur-angsur pulih, juga mendorong meningkatnya permintaan masyarakat, sehingga turut memberikan tekanan inflasi dari sisi permintaan, dimana tekanan inflasi dari sisi komoditas bahan makanan yang sempat terdampak oleh penyesuaian harga BBM, dapat direda melalui upaya sinergis dan intensif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Inflasi Bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022, tercatat sebesar 0,56 persen (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,13 persen (mtm) dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi dibulan Desember empat tahun terakhir, yang tercatat sebesar 0,061 persen (mtm).

Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas dan inovasi, guna mengarahkan pencapaian inflasi Provinsi Maluku kembali pada rentang sasaran 3,0+1 persen (yoy) di tahun 2023. Untuk itu, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang telah dituangkan kedalam roadmap pengendalian inflasi 2022 – 2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi. Salah satunya dengan program unggulan yang akan dijalankan, yakni Perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organik dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD) dengan Provinsi lain di Indonesia yang akan didorong secara optimal.

C. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku pada September 2022 sebesar 16,23 persen, menurun 0,07 persen poin terhadap September 2021 dan turun 1,64 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 296,66 ribu orang, turun 1,69 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 26.84 ribu orang terhadap Maret 2021. Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp.672.456,-/kapita/bulan naik Rp.66.547,- terhadap September 2021.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 868.581 orang, naik 8.237 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,29 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 808.844 orang, naik sebanyak 8.089 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11.864 orang). Sebanyak 296.834 orang (36,70 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,11 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,95 persen poin dan 0,08 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 6,88 persen, turun sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 14.388 orang (1,08 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2.236 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (781 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (617 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (10.754 orang).

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2022 mencapai 70,22, meningkat 0,51 poin (0,73 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selama tahun 2010 hingga tahun 2022, IPM Provinsi Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,74 persen. Peningkatan IPM Provinsi Maluku tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini bersamaan dengan peningkatan IPM Provinsi Maluku pada tahun sebelumnya yang didukung oleh semua dimensi. Pada tahun 2022, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,20 persen.

Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 14,00 tahun, atau setara dengan lamanya waktu menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma II. angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,97 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,16 tahun, dari 10,03 tahun menjadi 10,19 tahun pada tahun 2022.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 66,45 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

F. Rasio Gini

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,306. Angka ini naik 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,301 dan menurun 0,010 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,316. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,309, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,297 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,302. Gini Ratio di daerah perdesaan

pada September 2022 tercatat sebesar 0,261, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,259 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,250. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada September 2022, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,40 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,36 persen dan untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,45 persen, yang berarti keduanya tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

3.1.3.2. Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku

Pendapatan regional Maluku sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.517,04 Miliar atau naik 17,11% (yoy) dengan komponen pendapatan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.157,96 Miliar atau 14,82% (yoy) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp359,08 Miliar atau 25,14% (yoy). Seperti periode Agustus 2022 sebelumnya, kenaikan terbesar dari pendapatan disumbang oleh Pajak Penghasilan (Non Migas) dengan nilai realisasi sebesar Rp690,07 Miliar atau sebesar 38,31% (yoy).

Pada September 2022 ini, belanja K/L turut mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp5.575,54 Miliar atau 0,91%. Penyebab kenaikan belanja tersebut adalah meningkatnya realisasi Belanja Modal akibat beberapa termin kontrak Belanja Modal yang sudah dibayarkan. Selanjutnya, realisasi TKDD juga mengalami kenaikan sebesar 6,23% (yoy) dengan signifikansi peningkatan DAK Fisik sebesar 11,60%.

3.1.4. Kondisi Perekonomian dan Target Kabupaten Buru Selatan

3.1.4.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan 2022

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

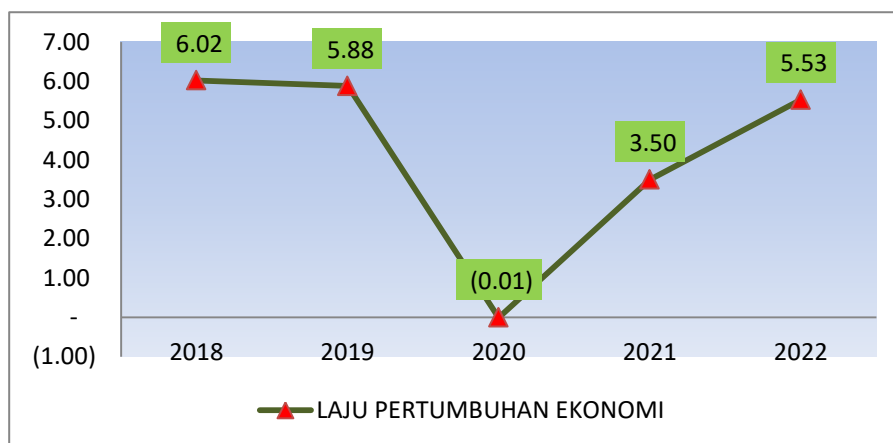
Perekonomian Buru Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB merupakan

indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Buru Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 1.627,23 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 143,68 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1.483,55 milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh jumlah produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Selain itu, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan dari 923,24 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 974,30 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Buru Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,53 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh jumlah produksi produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Laju pertumbuhan PDRB Buru Selatan tahun 2022 mencapai 5,53 persen; sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Buru Selatan sebesar 3,50 persen. Pada tahun 2022, tercatat semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 11,28 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,15 persen. Sedangkan untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu -6,88 persen.

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

**Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2018 - 2022**

No.	Lapangan/Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,04	5,15	2,16	0,96	6,84
2	Pertambangan dan Penggalian	4,94	5,61	-0,04	4,88	2,79
3	Industri Pengolahan	5,47	4,22	-0,95	1,08	11,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,75	0,25	4,75	5,72	4,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,56	2,82	1,75	2,99	2,55
6	Konstruksi	7,11	7,62	-1,03	8,10	2,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran	8,32	7,56	-2,04	6,57	6,75
8	Transportasi dan Pergudangan	5,32	5,59	-12,04	5,57	5,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,73	3,08	-0,46	3,95	6,59
10	Informasi dan Komunikasi	5,65	3,53	1,95	5,95	6,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,31	3,70	4,35	7,10	-6,88
12	Real Estat	1,81	1,27	-0,05	3,35	5,77
13	Jasa Perusahaan	2,38	2,79	-0,71	4,14	6,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,42	7,04	-1,98	4,44	3,33
15	Jasa Pendidikan	5,05	4,95	-0,02	3,98	5,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,43	4,44	5,91	7,15
17	Jasa Lainnya	2,58	3,04	1,08	1,96	6,86
Produk Domestik Regional Bruto		6,02	5,88	-0,01	3,50	5,53

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), struktur perekonomian Buru Selatan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buru Selatan.

Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020–2022

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	521.778,78	530.146,88	591.435,70	348.124,04	351.469,19	375.511,80
Pertambangan dan Penggalian	10.873,91	11.559,27	12.320,67	7.022,21	7.365,10	7.570,83
Industri Pengolahan	54.378,34	55.527,17	63.733,10	33.531,73	33.892,88	37.714,37
Pengadaan Listrik dan Gas	148,41	159,57	170,44	111,39	117,76	122,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	275,13	288,26	301,48	208,51	214,75	220,24
Konstruksi	122.486,07	135.536,52	143.787,20	70.927,69	76.675,02	78.244,30
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	105.514,98	114.284,20	129.264,22	73.918,54	78.775,57	84.091,97
Transportasi dan Pergudangan	34.557,25	37.179,28	45.327,90	23.885,83	25.216,65	26.656,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.828,56	7.170,26	7.913,03	4.325,68	4.496,71	4.792,96
Informasi dan Komunikasi	7.524,07	8.137,30	8.949,86	5.727,66	6.068,44	6.478,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.787,38	12.221,62	12.485,57	7.168,77	7.678,01	7.149,47
Real Estat	7.591,34	7.898,40	8.481,53	5.406,42	5.587,58	5.909,79
Jasa Perusahaan	336,27	355,70	389,37	244,48	254,61	272,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	374.409,19	392.614,76	417.551,49	204.164,05	213.229,22	220.321,71
Jasa Pendidikan	73.364,03	77.098,84	82.086,91	47.853,07	49.756,59	52.360,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70.570,08	75.716,53	83.618,96	48.095,23	50.937,82	54.580,55
Jasa Lainnya	17,136,71	17,657,79	19.410,01	11.287,28	11.508,61	12.297,76
Total	1.418.560,52	1.483.552,34	1.627.227,44	892.002,59	923.244,53	974.295,57

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

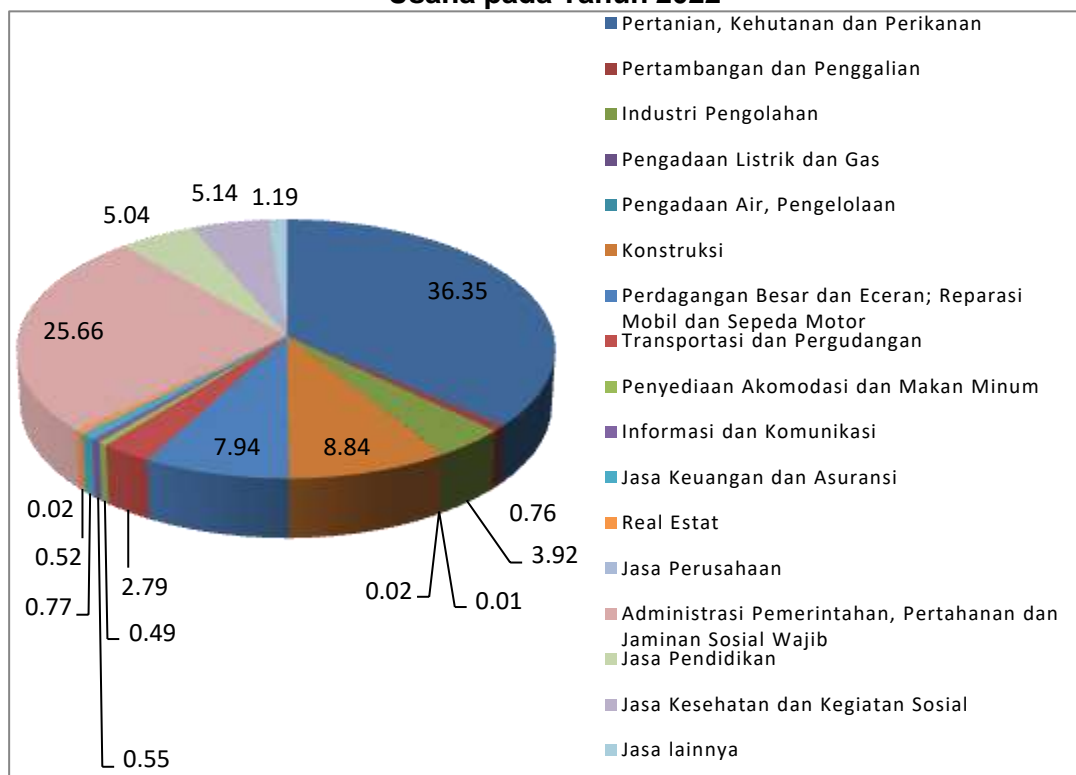
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Buru Selatan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 36,35 persen yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 35,73 persen. Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 25,66 persen (angka ini mengalami penurunan dari 26,46 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,84 persen (menurun dari 9,14 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,94 persen (meningkat dari 7,70 persen di tahun 2021).

Tabel 3.5 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020 -2022

Lapangan Usaha	Tahun		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,78	35,67	36,35
Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,78	0,76
Industri Pengolahan	3,83	3,74	3,92
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	8,63	9,14	8,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	7,70	7,94
Transportasi dan Pergudangan	2,44	2,51	2,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,48	0,49
Informasi dan Komunikasi	0,53	0,55	0,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,82	0,77
Real Estate	0,54	0,53	0,52
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,39	26,46	25,66
Jasa Pendidikan	5,17	5,20	5,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,97	5,10	5,14
Jasa lainnya	1,21	1,19	1,19
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan,2023

Diagram 3.1 Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2022



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan,2023

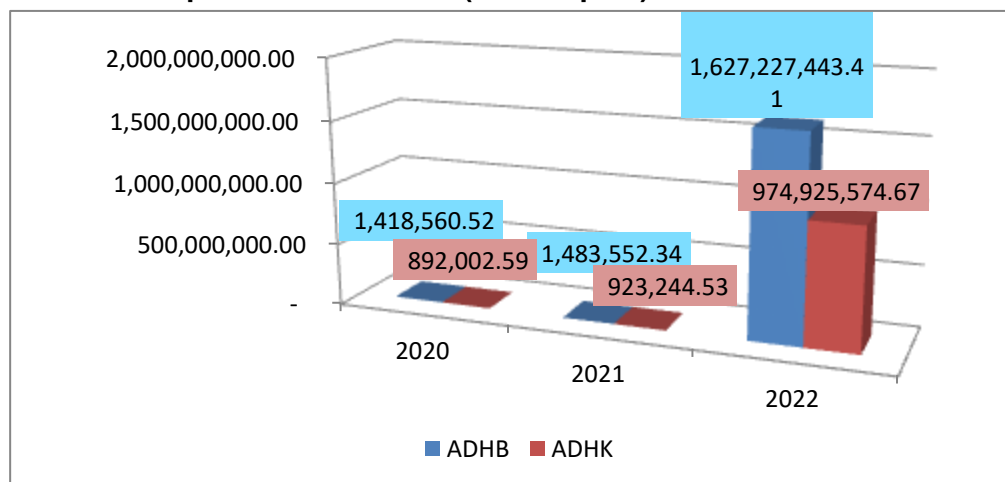
Selama periode 2020-2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 80 persen). Ekspor juga mempunyai peran sekitar 7 s.d 12 persen; demikian halnya impor sebagai komponen pengurang masih mempunyai peran yang relative besar, karena sekitar 119 s.d 125 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 46 s.d 55 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 69 -74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik sangat besar. Pada tahun 2020-2022 perdagangan Buru Selatan menunjukkan nilai ekspor relatif lebih rendah dari nilai impor yang mengindikasikan kondisi “defisit”.

Tabel 3.6. PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020-2022

No.	Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.231.025,13	1.284.162,50	1.398.698.400,68	751.805,57	757.906,02	793.053.688,03
2	Konsumsi LN/PRT	50.470,95	53.852,62	57.097.838,87	30.320,50	31.279,45	31.727.608,62
3	Konsumsi Pemerintah	1.003.450,57	1.026.551,35	911.517.205,49	587.870,38	594.308,00	508.430.791,47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	750.823,91	814.139,35	828.110.272,95	457.153,51	485.068,17	476.072.750,75
5	Perubahan Inventori	24.686,22	23.440,31	24.853.617,26	14.559,85	13.661,08	13.725.398,85
6	Ekspor/Impor	9.185.021,98	114.717,42	-1.593.049.891,85	79.784,16	71.101,70	-848.714.663,06
Total PDRB		1.418.560,52	1.483.552,34	1.627.227.443,41	892.002,59	923.244,53	974.925.574,67

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

Diagram 3.2. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Buru Selatan (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2022



Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2019 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2023

Pada Grafik dapat dilihat bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah diabaikan.

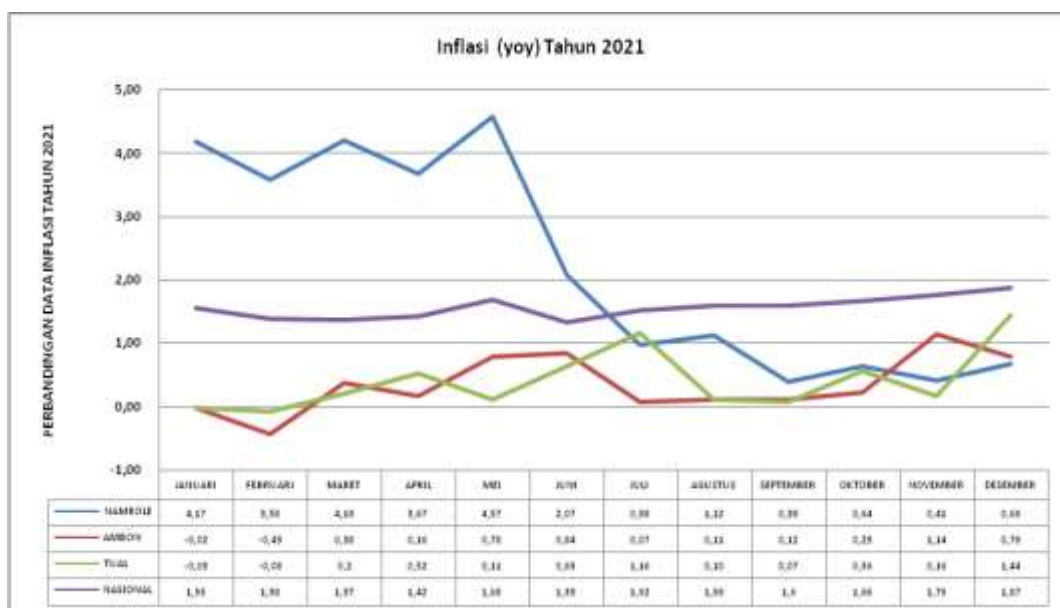
B. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi Buru Selatan pada bulan Januari sampai Desember 2021 mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari inflasi Buru Selatan sebesar 4,17 persen, Februari sebesar 3,58 persen, Maret 4,19 persen, April 3,67 persen, Mei 4,57, Juni 2,07, Juli 0,98 persen, Agustus 1,12 persen, September sebesar 0,39 persen, Oktober 0,64 persen, November 0,41, dan bulan Desember 0,68 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan beberapa indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Dari sebanyak 339 komoditas yang dipantau per bulan di Kota Namrole, tercatat 10 (sepuluh) komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kota Namrole pada Agustus 2021 diantaranya adalah : beras, ketela pohon, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ikan kembung/ ikan gembung/ ikan banyar/ ikan gembolo/ ikan aso-aso, ikan tuna, ketimun, kacang panjang, anggur, wortel, dan buah naga.

Grafik 3.3. Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan Terhadap Provinsi Maluku, Nasional dan Target RPJMD Tahun 2021



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Buru Selatan, 2022

Berdasarkan informasi di atas menggambarkan bahwa inflasi di Kabupaten Buru Selatan dapat terjaga, hal ini karena peran dari OPD terkhusus Tim Pengendali Inflasi Daerah.

C. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu 2018-2022, dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2018 sebesar 2,92 persen, dan sampai Agustus tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,98 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,50	73,54	73,99	75,39	74,82
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,92	2,38	2,31	1,63	0,98

Sumber : - Provinsi Maluku Dalam Angka, 2023
- BPS Kab. Buru Selatan, 2023

D. Kemiskinan

Hingga tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan terus mengalami penurunan. Namun, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan tercatat sebanyak 9,99 ribu jiwa atau sekitar 15,89 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin meningkat 0,14 persen. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga turut memengaruhi angka kemiskinan. Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan berbagai kegiatan penduduk terhambat, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, serta penurunan pertumbuhan (kontraksi) ekonomi.

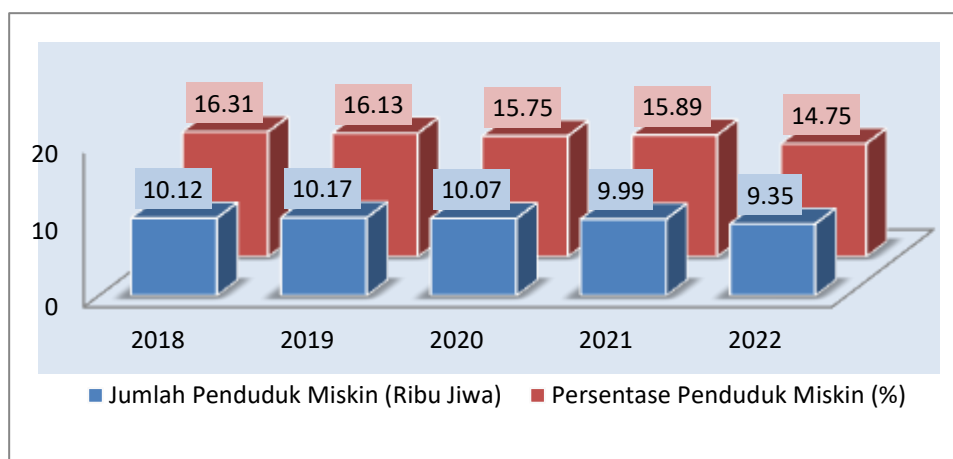
Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2021, persentase penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan dengan angka 14,75 persen atau turun 1.14 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan perilaku dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Buru Selatan pulih kembali pasca Pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 3.8 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2018	10.12	16.31
2	2019	10.17	16.13
3	2020	10.07	15.75
4	2021	9.99	15.89
5	2022	9.35	14.75

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan 2022

Diagram 3.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan 2022

Garis kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.628.629,00 perkapita perbulan atau meningkat sebesar 5,68 persen dibandingkan tahun 2021.

Tabel 3.9 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan, 2018-2022

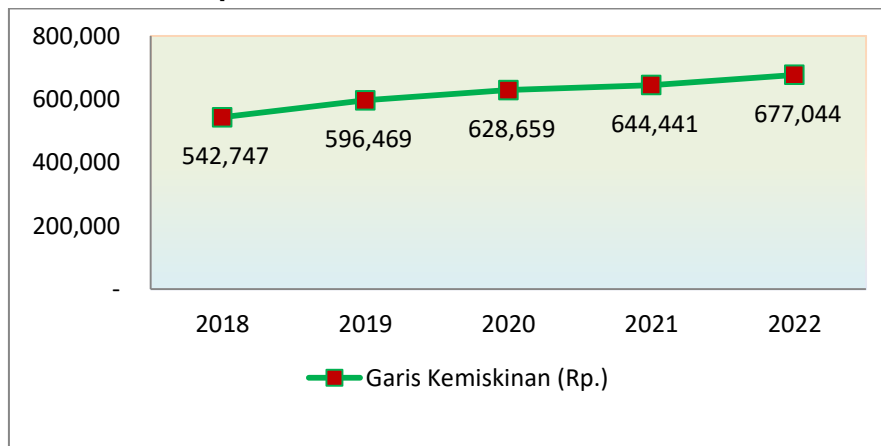
No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	2018	542.747	1,65	0,36
2	2019	596.469	2,07	0,47
3	2020	628.659	2,14	0,46
4	2021	644.441	2,36	0,53
5	2022	677.044	2,13	0,52

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan 2022

Selama dua tahun terakhir, terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan penurunan pada tahun 2022 baik pada indeks P1 maupun P2 . Bahkan penurunan indeks P1 pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2022, P1 Kabupaten Buru Selatan sebesar 2,13 atau turun sekitar 0,23 poin dibandingkan tahun 2021, sedangkan P2 sebesar 0,52 atau turun sekitar 0,01 poin. Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan menurun pasca pandemi COVID-19, penduduk yang mendekati garis kemiskinan meningkat dan variasi pengeluaran penduduk miskin masih tinggi. Untuk mengurangi jumlah penduduk yang

mendekati garis kemiskinan perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran dan berkelanjutan.

**Grafik 3.4 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2018 – 2022**



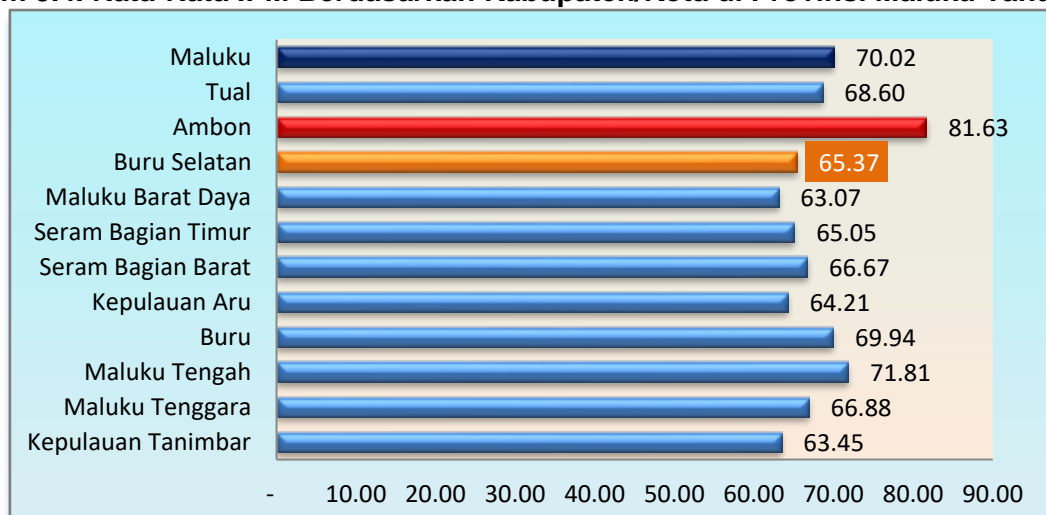
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan 2022

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Buru Selatan secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Buru Selatan dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.

Nilai IPM Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya (2018-2022) dengan rata-rata IPM sebesar 65,37, merupakan urutan ke 7 (tujuh) tertinggi dari 11 (sebelas) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku. secara jelas terlihat pada Diagram di bawah ini.

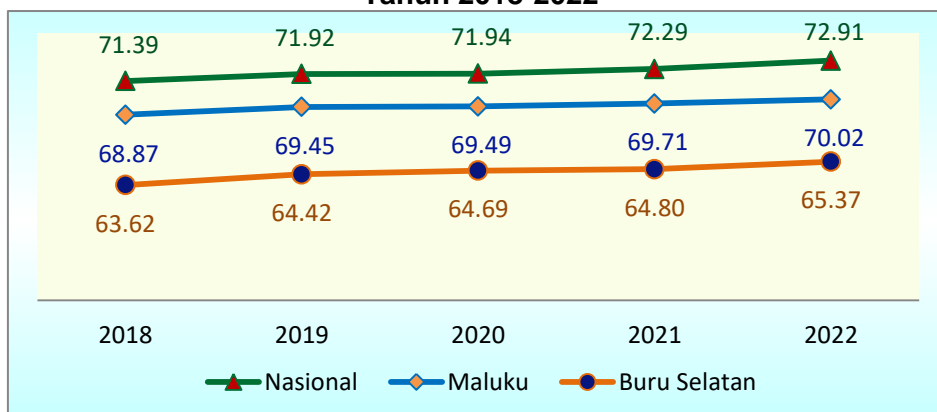
Diagram 3.4. Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2022



Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2023

Pada Diagram di atas Kota Ambon memiliki IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki IPM paling rendah yakni 63,07, kondisi ini berkorelasi positif dengan angka kemiskinan yang juga Maluku Barat Daya sebagai kantong kemiskinan tertinggi. Sedangkan posisi IPM Kabupaten Buru Selatan, secara regional dan nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Grafik 3.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Nasional 2023 dan Provinsi Maluku Dalam Angka 2023

3.1.4.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perekonomian daerah Kabupaten Buru Selatan terus berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Disamping memperlihatkan pola yang berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Buru Selatan juga masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku. Hal yang mendesak dilakukan untuk peningkatan daya saing produk dan jasa adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rangka penerapan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kepada pelaku usaha dalam distribusi dan peredaran produk barang dan jasa.

Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut ditahun 2023. Seperti perkiraan sebelumnya, pada tahun 2023 tekanan dampak Covid-19 diperkirakan berangsur menurun. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program vaksinasi, perkembangan kasus Covid-19 yang menurun, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2023 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk aktivitas leisure (rekreasi) yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Buru Selatan yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat juga akan berdampak positif untuk sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kabupaten Buru Selatan tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif.

Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini seiring dengan berangsurnya penurunan dampak pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Adapun tantangan yang diperkirakan akan dihadapi tahun 2024 meliputi :

1. Masih rendahnya daya saing industri, Koperasi dan UKM,
2. Masih rendahnya daya tarik pariwisata,
3. Terbatasnya investasi dan ekspor,
4. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya unggulan daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya konektivitas intra antar wilayah.
6. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri.
7. Masih rendahnya kualitas SDM dalam mendukung dan berpartisipasi untuk membangun daerah
8. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan permukiman
9. Belum optimalnya ketahanan lingkungan hidup, mitigasi dan ketahanan bencana
10. Belum optimalnya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Menjawab sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga

diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.10 Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan

No.	Indikator	Target Tahun 2024		
		Nasional	Provinsi Maluku	Kabupaten Buru Selatan
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,7 – 6,0	6,78 - 7,01	5,03
2.	Inflasi (%)	2,7+1%	3,45 - 4,25	3,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3	4,97	2,26
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	13,43	14,50
5.	IPM (Poin)	75,54	69,91	-
6.	Rasio Gini	0,360 – 0,374	0,314	0,28

Sumber : 1. RPJMN Tahun 2020-2024

2. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

3. RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perkembangan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 ditargetkan mengalami penurunan pada pos pendapatan dan mengalami peningkatan pada pos belanja. Realisasi pendapatan daerah pada 2022 yaitu sebesar Rp.641.418.118.954,-, sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.672.268.074.800,- sementara realisasi belanja daerah pada tahun 2022 sebesar Rp.650.270.827.582,- dan target tahun 2023 sebesar Rp.694.131.074.800,-.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besarnya pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penerapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Untuk lebih jelasnya struktur pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 dan target Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022,
Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

No.	URAIAN	APBD 2022				TARGET 2023*	PROYEKSI 2024*	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		TARGET	REALISASI	SELISIH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDAPATAN DAERAH	662.697.153.672	641.418.118.954	21,279,034,718	96,79	672.268.074.800	661.407.311.000	(10.860.763.800)	(1,64)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.896.788.672	18.882.962.973	12.013.825.699	61,12	39.549.746.800	31.642.983.000	(7.906.763.800)	(24,99)
1.1.1	Pajak Daerah	5.028.230.000	3.796.577.522	1.231.652.478	75,51	6.700.096.800	5.028.230.000	(1.671.866.800)	(33,25)
1.1.2	Retribusi Daerah	4.902.753.000	4.012.130.625	890.622.375	81,83	5.331.250.000	4.902.753.000	(428.497.000)	(8,74)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.253.594.672	2.487.405.328	(233.810.656)	110,38	2.800.000.000	3.000.000.000	200.000.000	6,67
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.712.211.000	8.586.849.498	10.125.361.502	45,89	24.714.400.000	18.712.000.000	(6.002.400.000)	(32,08)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	628.800.365.000	622.535.155.981	6.265.209.019	99,00	632.718.328.000	629.764.328.000	(2.954.000.000)	(0,47)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	616.400.365.000	609.273.512.422	7.126.852.578	98,84	617.364.328.000	617.364.328.000	-	0,00
	▪ Dana Perimbangan	541.462.975.000	534.336.298.203	(480.190.023.203)	98,68	550.172.004.000	550.172.004.000	-	0,00
	▪ Dana Insentif Daerah (DID)	3.587.861.000	3.587.861.000	0,00	100,00	-	-	-	0,00
	▪ Dana Desa (DD)	71.349.529.000	71.349.353.219	175.781	100,00	67.192.324.000	67.192.324.000	-	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.400.000.000	13.261.643.559	(861.643.559)	106,95	15.354.000.000	12.400.000.000	(2.954.000.000)	(23,82)
	▪ Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.400.000.000	13.261.643.559	(861.643.559)	106,95	15.354.000.000	12.400.000.000	(2,954,000,000)	(23,82)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000	-	-	0,00	-	-	-	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	-	-	0,00	-	-	-	0,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BOS)	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	TOTAL PENDAPATAN	662.697.153.672	641.418.118.954	21,279,034,718	96,79	672.268.074.800	661.407.311.000	(10.860.763.800)	(1,64)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan, 2023

Proyeksi pendapatan daerah untuk penganggaran Tahun 2024 turun sebesar 1,64 persen dari pendapatan daerah Tahun 2023 yakni sebesar Rp.661.407.311.000,-. Penurunan pendapatan ini terjadi hampir pada semua pos Pendapatan Daerah (PAD) kecuali pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimana pada pos ini naik 6,67 persen yakni sebesar Rp.3.000.000.000,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Modal

Belanja modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koordinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.



3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kebijakan dalam penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer terdiri atas :

- a) Belanja bagi hasil
- b) Bantuan Keuangan

Berdasarkan data realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta proyeksi Tahun 2024 maka Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022,
Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

No.	URAIAN	APBD 2022				TARGET 2023*	PROYEKSI 2024*	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		TARGET	REALISASI*	SELISIH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BELANJA DAERAH	695.897.420.956	650.270.827.582	45.626.593.374	93,44	694.131.074.800	708.199.854.897	14.068.780.097	1,99
2.1	BELANJA OPERASI	459.498.910.873	436.728.867.582	22.770.043.291	95,04	495.146.792.118	212.954.767.000	5.769.067.017	1,15
2.1.1	Belanja Pegawai	178.578.133.000	174.457.260.697	4.120.872.303	97,69	231.343.848.000	211.034.767.000	(20.309.081.000)	(9,62)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.261.601.577	231.914.917.524	17.346.684.053	93,04	210.861.137.214	231.947.250.935	21.086.113.721	9,09
2.1.3	Belanja Subsidi	1.440.000.000	1.147.200.000	292.800.000	79,67	1.920.000.000	1.920.000.000	-	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.072.980.200	14.343.891.300	729.088.900	95,16	36.020.398.200	38.141.427.500	2.121.029.300	5,56
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.146.196.096	14.865.598.061	280.598.035	98,15	15.001.408.704	17.872.413.700	2.871.004.996	16,06
2.2	BELANJA MODAL	121.605.375.252	99.804.806.729	21.800.568.523	82,07	76.100.504.241	83.400.217.321	7.299.713.080	8,75
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.707.953.500	2.706.490.500	1.463.000	99,95	4.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	20,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.707.953.500	2.706.490.500	1.463.000	99,95	4.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	20,00
2.4	BELANJA TRANSFER	112.085.181.331	111.030.662.771	1.054.518.560	99,06	118.883.778.441	118.883.778.441	-	0,00
TOTAL BELANJA		695.897.420.956	650.270.827.582	45.626.593.374	93,44	694.131.074.800	708.199.854.897	14.068.780.097	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan akan ditempuh melalui Peningkatan Penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak maupun penerimaan piutang lainnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.3.1. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup; pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo;
- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran;
- c) Pembentukan dan penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Buru Selatan diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Kabupaten Buru Selatan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :

- a) Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Buru Selatan;
- b) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan pihak swasta;
- c) Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
- d) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan



pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;

- e) Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas untuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal.

**Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022,
Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

No.	URAIAN	APBD 2022				TARGET 2023*	PROYEKSI 2024*	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		TARGET	REALISASI*	SELISIH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PEMBIAYAAN DAERAH					21.863.000.000	10.000.000.000	(11,863,000,000)	(118,63)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.610.267.284	28.294.953.169	7.315.314.115	79,46	25.363.000.000	10.000.000.000	(15,363,000,000)	(153,63)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.610.267.284	28.294.953.169	7.315.314.115	79,46	25.363.000.000	10.000.000.000	(15,363,000,000)	(153,63)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.610.267.284	28.294.953.169	7.315.314.115	79,46	25.363.000.000	10.000.000.000	(15,363,000,000)	(153,63)
3.2	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	(40,00)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	(40,00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	(40,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	33.110.267.284	25.794.953.169	7.315.314.115	77,91	21.863.000.000	7.500.000.000	(14.363.000.000)	(191,51)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Berbagai sektor strategis yang akan didorong antara lain; sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata dan sektor lain yang menunjukkan perkembangan potensial.

Sesuai ketentuan undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilu dan pilkada tetap diselenggarakan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 40 persen anggaran pilkada dari APBD tahun 2023 yang diusulkan untuk penyelenggara pemilu sedangkan sebanyak 60 persen kekurangannya dialokasikan dalam APBD tahun 2024. Berkaitan dengan dukungan daerah dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan agar menjamin keselarasan antara pusat, provinsi dan daerah, maka target pembangunan yang ingin dicapai dan keselarasannya terhadap target Nasional maupun Provinsi.

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2024 yang disusun berdasar: (1) isu strategis daerah 2021-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2021; (3) tantangan global, nasional dan regional seperti isu pandemi COVID-19, SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2024 dan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2024

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, dan program strategis nasional.

Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPJMD periode 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 mengacu pada Peraturan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJN Nasional.

4.1.1. Visi

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dituangkan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Kabupaten Buru Selatan adalah sesuai dengan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan Sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil Dan Sejahtera Berbasis Agro-Marine”

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh element masyarakat Kabupaten Buru Selatan (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Buru Selatan yang mandiri, rukun berbasis agro marine. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

🚧 Kemandirian : Mendayagunakan segenap asset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan derajat dan kualitas masyarakat;

Suatu keadaan dimana masyarakat Bursel dapat mendayagunakan segenap aset, potensi, dan kemampuan yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup mereka secara bebas dan mandiri, melalui dorongan, insentif, dan peranan aktif pemerintah selaku motivator, fasilitator dan dinamisator. Target dari kemandirian tersebut tentu saja adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Bursel, dimana segenap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memadai, baik kebutuhan yang sifatnya fisik dasar (lahiriah) seperti sandang, pangan, dan perumahan, maupun kebutuhan non-fisik (bathiniah) dan lainnya, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan, rasa keadilan, kebebasan berpendapat, kebebasan

menjalankan ibadah, dan sebagainya yang mencerminkan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga Negara;

✚ *Berkelanjutan : Pengembangan sektor unggulan potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan;*

Suatu upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan segala hasil pembangunan yang belum atau telah dicapai selama periode kepemimpinan yang lalu dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Bursel. Me-reaktualisasi program yang lebih konkrit dan riil menjadi solusi terdepan dalam kebijakan pembangunan kabupaten Buru Selatan yang merata dan berkesinambungan. Berkelanjutan juga dimaksudkan untuk mengkristalisasi seluruh simpul-simpul aktivitas masyarakat dan pengembangan sektor unggulan potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan, dengan jalan memaksimalkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah;

✚ *Kabupaten yang Rukun : Peningkatan hubungan dan toleransi antar umat beragama dalam perspektif Kai Wait Ina Ama;*

Terciptanya ketenangan dan ketenteraman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, peningkatan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dapat hidup bersama dalam perbedaan. Dalam perspektif *Kai Wait Ina Ama* yang selama ini melembaga di dalam pola hidup masyarakat Kabupaten Buru Selatan, peningkatan hubungan dan toleransi antar umat beragama, penghargaan dan penghormatan terhadap kearifan budaya lokal (*Lolik Lalen Fedak Fena*) yang merupakan perwujudan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan sebagai kabupaten yang berkarakter;

✚ *Agro-Marine : Mengoptimalkan potensi sumberdaya di darat maupun di laut yang dimiliki serta perluasan kesempatan kerja;*

Suatu upaya mendinamisasi aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Buru Selatan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya potensial di darat maupun di laut yang dimiliki, meliputi sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, pertanian (pangan dan holtikultura, perkebunan, dan peternakan), yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pengembangan multiproduk olahan, peningkatan nilai tambah dan nilai jual hasil pertanian dan perikanan, serta perluasan kesempatan kerja, melalui pengembangan produk-produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditempuh melalui 7 Misi Pembangunan yang merupakan kesinambungan sekaligus upaya pemantapan kualitas pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari 7 misi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. *Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat;*

Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan, Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integratif, Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/pulau kecil, Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha, Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan.

b. *Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah;*

Perancangan *master plan cluster* pengembangan produk perikanan dan pertanian, Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan di setiap wilayah, Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa, Menjamin sistem pemasaran dan *quality control* bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara profesional dan berkeadilan.

c. *Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;*

Membentuk kluster-kluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine, Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif, Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta

keringanan fiskal. Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi: RTRW, RDTR, RTBL dan Master Plan sektor lainnya. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, Peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus.

d. Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi unggulan daerah;

Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output, Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan dimasa depan, Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Buru Selatan, Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan profesional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi.

e. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat;

Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat, Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan.

f. Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah;

Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan, mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Buru Selatan yang kaya dan beragam, Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jati diri dan kearifan masyarakat, Memperkuat sistem kelembagaan adat, Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada



warga masyarakat dalam pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.

g. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN;

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional, Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat, Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Sejahtera Berbasis Agro-marine				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<i>Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat (MISI 1)</i>	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Terkoneksinya sistim perhubungan	1. Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan	Terbangunnya Jumlah pelabuhan laut (unit)
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)
			2. Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integratif	Peningkatan usaha mikro
			3. Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/ pulau kecil.	Peningkatan Produksi Perikanan
			4. Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha.	Peningkatan Kegiatan pelatihan Perikanan
		5. Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan	
<i>Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah (MISI 2)</i>	Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro marine	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian



			2. Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah
			3. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster- kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan disetiap wilayah	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah
			4. Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah
			5. Menjamin sistem pemasaran dan <i>quality control</i> bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara profesional dan berkeadilan	Terciptanya sistim dan quality control dalam pengembangan produk unggulan daerah
<i>Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah (MISI 3)</i>	Tumbuhnya pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	1. Membentuk kluster-kluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine.	Terbentuknya klaster usaha berbasis potensi wilayah
			2. Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutamagenerasi muda.	Terwujudnya jiwa kewirausahaan generasi muda
			3. Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif.	Terbentuknya sistim dan standarisasi akses permodalan



			4. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiskal.	
			5. Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi: RTRW, RDTR, RTBL dan Master Plan sektor lainnya.	Tersedianya dokumen perencanaan spasial
			6. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, Peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus	Tersedianya lahan untuk perumahan
<i>Pengembangan sektor pendidikan mendorong peningkatan daya saing daerah (MISI 4)</i>	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Terkelolanya potensi unggulan daerah	1. Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	Tingginya angka partisipasi sekolah
			2. Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan di masa depan.	Tersedianya lembaga PAUD
			3. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang Pendidikan	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang Pendidikan
			4. Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Buru Selatan	Terbangunnya sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah



				5. Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan professional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi.	Terselenggaranya sistim pendidikan tinggi di Buru Selatan
<i>Perluasan akses Kesehatan berkualitas terjangkau masyarakat (MISI 5)</i>	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Terlayannya kebutuhan Kesehatan masyarakat		1. Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Tersedianya infrastruktur, SDM dan pelayanan kesehatan memadai sampai ketingkat desa
				2. Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang Kesehatan
				3. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Terciptanya Lingkungan bersih
<i>Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah (MISI 6)</i>	Majunya pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal		1. Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan	Terkelolanya potensi wisata lokal secara professiona
				2. Memperkuat sistem kelembagaan adat	
				3. Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jatidiri dan kearifan masyarakat	
				4. Mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Buru Selatan yang kaya dan beragam	Adanya peraturan daerah tentang kearifan lokal dan aktifitas keagamaan



			<p>5. Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya.</p> <p>6. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>7. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial</p> <p>8. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat dalam pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan</p>	<p>Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, sosial seni, dan budaya</p> <p>Terpenuhinya sarana prasarana PMKS</p> <p>Terciptanya kepedulian masyarakat dalam investasi modal social</p>
<p><i>Reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN (MISI 7)</i></p>	<p>Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN</p>	<p>Adanya ASN Kabupaten Buru Selatan yang profesional</p>	<p>1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan professional</p>	<p>Tersedianya SDM ASN yang professional</p>
			<p>2. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat</p>	<p>Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas</p>
			<p>3. Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif</p>	<p>Terciptanya sistim pelayanan satu atap</p>
			<p>4. Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat</p>	<p>Tersedianya SDM ASN berbasis kearifan lokal</p>

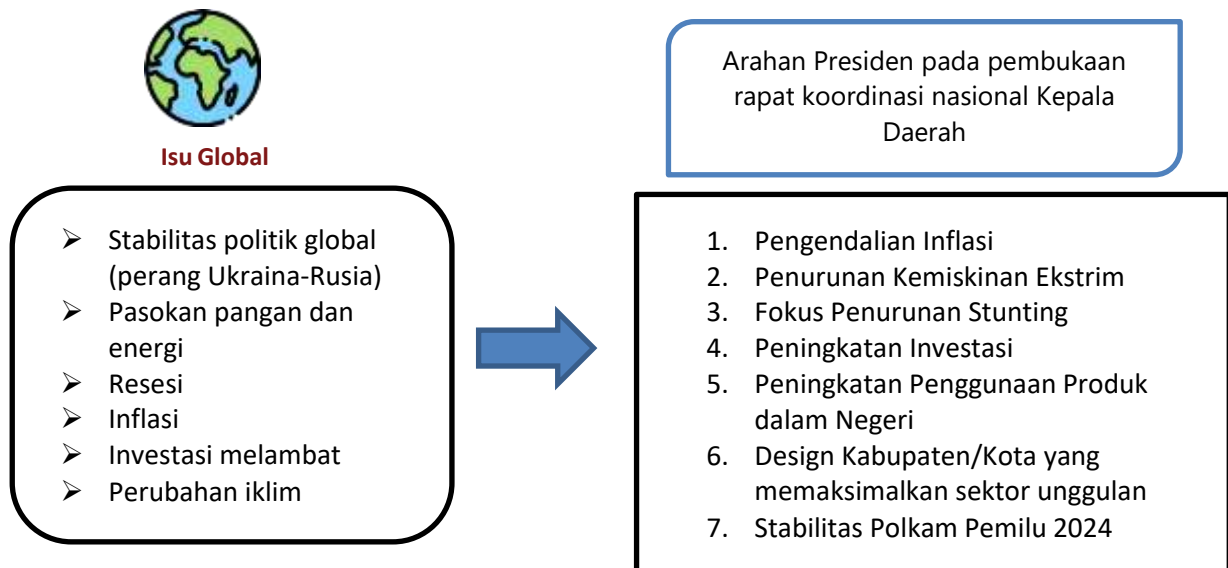


			5. Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

4.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

4.2.1. Identifikasi Isu Global dan Isu Nasional



4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional selanjutnya dituangkan ke dalam Prioritas Nasional (PN) yang merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah

Adapun tema RKP Nasional Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2024.

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan mengacu pada tema dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Nasional 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Arah Kebijakan Prioritas RKP Tahun 2024 :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 4) Penguatan daya saing usaha
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7%
- 2) Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0-5,7%
- 4) Rasio Gini 0,374-0,377
- 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02
- 6) Penurunan EMisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27
- 7) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110
- 8) Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108
- 9) Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6-7,0 %
- 10) Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4 %
- 11) Share Industri Pengolahan 21 %
- 12) Defisit Transaksi Berjalan 1,7 % ODB.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024

Mengacu kepada Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019 – 2024, penjabaran Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Prioritas Nasional serta Isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024 maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yaitu: **“Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”**.

Isu Strategis Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
- 3) Peningkatan Kualitas SDM
- 4) Infrastruktur dan Konektivitas
- 5) Reformasi Birokrasi
- 6) Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024
- 7) Pembangunan Berkelanjutan

Dalam mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, maka dirumuskan Prioritas Daerah Tahun 2024 yang meliputi :

- 1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan
- 3) Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata

- 4) Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
- 5) Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul
- 6) Pemantapan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas
- 7) Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*

Penjabaran Prioritas daerah Provinsi Maluku tahun 2024 ke dalam Fokus, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Dalam menjawab pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial, maka keterkaitan antara Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional dengan Isu Strategis maupun Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2024 perlu disinkronisasikan sehingga dapat mensinergikan arah kebijakan Pemerintah Pusat yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 dengan arah kebijakan daerah, secara garis besar penjabaran keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah tahun 2024.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024

4.3.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Maka program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional. **Isu strategis Kabupaten Buru Selatan tahun 2021 – 2026** masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan periode 2016-2021, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Reformasi dan Birokrasi
- 2) Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- 3) Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Sejalan dengan Program Prioritas yang menjadi fokus utama Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, meliputi :



4.3.2.1. Reformasi Birokrasi

Keberhasilan proses pembangunan daerah sangat berkorelasi dengan reformasi birokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu membangun aparatur yang berkualitas, kompeten, dan berkinerja baik menjadi syarat mutlak agar mampu mengimplementasikan semua bentuk cita-cita pembangunan daerah. Penting juga untuk membangun sistem pelayanan publik yang prima, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta manajemen pemerintahan yang akuntabel dan bersih. Dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan kedepan maka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) harus diimplementasikan, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator opini BPK, nilai SAKIP, dan indeks persepsi korupsi;
3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan profesionalitas ASN, dengan indikator indeks profesionalitas ASN dan rasio kelembagaan PD yang efektif dan efisien (persen).

Arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta terbuka yang didukung dengan profesionalitas aparatur dan kelembagaan yang efektif serta efisien. Strategi yang dilakukan

meliputi:

1. Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mendorong pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; VI-32 RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026.
3. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP;
5. Meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda;
6. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
7. Memperbaiki tata laksana organisasi;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
9. Menuju “keperantaraan dan enterpreneur” dalam tata kelola pemerintahan;

4.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama ini ditopang oleh tiga sektor unggulan yaitu sektor Administrasi pemerintahan, pertanian, dan jaminan social wajib, konstruksi, perdagangan dan jasa, serta pertanian, kehutanan [Type text] VI-15 RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026 dan perikanan. Dalam lima tahun kedepan, diproyeksikan sektor ini akan tetap memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Kabupaten Buru Selatan, serta didukung dengan sektor pariwisata dan investasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung daya saing ekonomi Kabupaten Buru Selatan yang berbasis pada sektor-sektor unggulan, kebijakan perekonomian daerah Buru Selatan dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan berkelanjutan yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sasaran yang dituju fokus pada dua hal yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata), dengan indikator laju pertumbuhan sektor pertanian, perikanan industri pengolah, perdagangan, dan kontribusi sektor pariwisata pada PAD;
2. Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah, yang diindikasikan dengan indikator kinerja dalam laju pertumbuhan investasi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buru

Selatan kedepan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor unggulan yang terintegrasi (produksi dan distribusi) dan mengarah pada digital ekonomi dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal.

Sedangkan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui :
 - a. Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah (*on farm menuju off farm*);
 - b. Penyediaan bibit, benih yang berkualitas, dan pupuk;
 - c. Penyediaan dan pemerataan alsintan;
 - d. Peningkatan prasarana irigasi;
 - e. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan;
 - f. Pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*);
 - g. Peningkatan mutu dan hasil ternak;
 - h. Peningkatan peran pemerintah dalam keperantaraan melalui revitalisasi peran pertanian (penyeimbang, penelitian pengembangan, pendapatan dan pengurangan kemiskinan).
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pengolahan perikanan melalui :
 - a. Peningkatan keterampilan nelayan;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, armada dan alat pancing tonda Keramba Jaring Apung, dll);
 - c. Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor;
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui:
 - a. Peningkatan nilai tambah diversifikasi produk, dan hilirisasi industry;
 - b. Mengembangkan inovasi teknologi produksi;
 - c. Fasilitasi akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan;
 - d. Meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi;
 - e. Pengembangan kawasan industri sesuai rencana tata ruang.
4. Mendorong pertumbuhan UMKM melalui :
 - a. Peningkatan kualitas tenaga kerja (tingkat pendidikan dan kualitas manajerial);
 - b. Memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM (perijinan, pajak);
 - c. Fasilitasi akses permodalan dari perbankan;
 - d. Meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan ekonomi digital; peningkatan infrastruktur produksi, distribusi, promosi, dan jejaring pemasaran;
 - e. Pengembangan inovasi dan teknologi;
 - f. Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.

5. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - b. Meningkatkan promosi wisata;
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata;
 - d. Meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
6. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui :
 - a. Pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan);
 - b. Memperbaiki sistem dan layanan perijinan;
 - c. Mengembangkan kebijakan investasi padat karya;
 - d. Mengembangkan digital investment promotion;
 - e. Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan.

4.3.2.3. Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan yang kompleks, yang tidak bisa ditangani secara instan tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan setiap unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat, serta unsur swasta dan masyarakat. Dalam agenda kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan kedepan. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi agenda utama yang harus dilakukan, yang bertujuan untuk menurunkan penduduk miskin di Buru Selatan. Sasaran utamanya adalah menurunnya penduduk miskin perdesaan (yang lebih dominan) dan penduduk miskin perkotaan secara proporsional. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam lima tahun kedepan akan difokuskan pada dua hal utama yaitu penyediaan basic life access dan penguatan sustainable livelihood. Kebijakan penyediaan basic life access mengarah pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak setiap masyarakat terutama masyarakat miskin. Kebijakan ini sifatnya “wajib” dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebagai bentuk kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan kedua yaitu penguatan sustainable livelihood yang mengarah pada penguatan mata pencaharian masyarakat miskin agar berkelanjutan. Bahkan diharapkan kebijakan ini mengarah pada konsep “menaikkan kelas” masyarakat miskin dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga kebijakan ini fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan pendampingan, serta perbaikan mental masyarakat agar mau “membangun” dirinya menuju pada kehidupan yang lebih baik.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan meliputi:
 - a. Akses rumah layak termasuk air bersih, sanitasi, listrik, komunikasi;
 - b. Penanganan kawasan permukiman kumuh;
 - c. Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan;
 - d. Perlindungan sosial bagi masyarakat;
 - e. Kepemilikan administrasi kependudukan;
 - f. Fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
2. Penguatan *sustainable livelihood* meliputi :
 - a. Fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen, dan pasar;
 - b. Penciptaan *start up* wirausaha baru;
 - c. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
 - d. Pemberdayaan ekonomi kelompok dan PMKS.
3. Dukungan implementasi strategi tersebut dengan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan pihak lain (non pemerintah).

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Buru Selatan dalam lima tahun kedepan adalah persentase penduduk miskin secara total maupun dilihat dari persentase penduduk miskin perdesaan dan perkotaan.

4.3.2.4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing Daerah

Salah satu pondasi dasar pembangunan yang menggerakkan setiap prosesnya adalah sumberdaya manusia. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penting untuk dilakukan dalam setiap proses pembangunan daerah. Dengan kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan saat ini, maka dalam lima tahun kedepan pembangunan Kabupaten Buru Selatan akan meletakkan sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek utama dalam pembangunan. Pembangunan sumberdaya manusia ditujukan untuk membangun sumberdaya manusia Buru Selatan yang berkualitas dan berdaya saing, yang diukur dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat, dengan ukuran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (tahun);



2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator, dengan indikator angka harapan hidup (tahun);
3. Meningkatnya serapan dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (persen) dan produktivitas tenaga kerja (rupiah per kapita).

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan maka kebijakannya mengarah pada:

1. Penguatan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis kompetensi.

Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui :
 - a. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis.;
 - b. Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude;
 - c. Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan di setiap kecamatan;
 - d. Meningkatkan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik;
 - e. Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - g. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
 - h. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - i. Peningkatan literasi (minat membaca dan menulis) masyarakat terutama anak usia sekolah.
 - j. Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah;
2. Perbaiki kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui upaya :
 - a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan;
 - c. Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat;
 - d. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga, dengan membangun gerakan perubahan cara pandang masyarakat tentang hak perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

4. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui :
 - a. Penguatan program pendidikan kompetensisesuai kebutuhan daerah;
 - b. Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi);
 - c. Memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya;
 - d. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan;
 - e. Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha pemuda;
 - f. Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru;
 - g. Mengembangkan budaya inovatif;
 - h. Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4.3.2.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pembangunan esensinya adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan ketimpangan wilayah menuju pada masyarakat yang sejahtera. Kondisi di Kabupaten Buru Selatan saat ini berdasarkan pada Indeks Williamson dapat digambarkan bahwa tingkat kesenjangan wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru Selatan masih cukup tinggi.

Oleh karena itu, pembangunan yang berorientasi pada pemerataan menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam lima tahun kedepan. Upaya pemerataan dapat dilakukan dengan mendistribusikan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal, yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Untuk itu, lima tahun kedepan salah satu tujuannya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, sasarannya :

1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah, dengan indikator rasio jalan dalam kondisi baik dan Indeks Pelayanan Transportasi (dalam persen);
2. Meningkatnya pemerataan fasilitas dasar untuk masyarakat, dengan indikator berupa laju penurunan backlog rumah, cakupan pemenuhan air minum layak, cakupan pemenuhan sanitasi perkotaan, dan cakupan pemenuhan sanitasi perdesaan (dalam persen);
3. Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana ekonomi, dengan indikator indeks sarana ekonomi wilayah.

Kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk penguatan konektivitas antar wilayah, didukung pemerataan prasarana dan sarana dasar dan ekonomi kecamatan dan pedesaan. Sedangkan strateginya meliputi :

1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam wilayah ibukota kabupaten Buru Selatan;
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
3. Mengembangkan angkutan umum lintas regional, perkotaan, Kecamatan dan pedesaan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana simpul dan pemanduan moda transportasi diantaranya terminal, pelabuhan dan bandara;
5. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
6. Meningkatkan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat;
7. Meningkatkan sanitasi layak melalui pengelolaan limbah komunal dan pengelolaan persampahan berbasis kawasan dan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya melalui penataan kawasan;

Upaya mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodisasi pemerintahan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2024 guna mencapai tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan tersebut. Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terdapat fokus utama Program Prioritas Desa Unggul, yaitu :

a. 5000 LAPANGAN KERJA BARU

- ✚ Penciptaan wirausaha baru desa
- ✚ Bantuan modal usaha
- ✚ Pelatihan tenaga kerja berbasis desa
- ✚ Pembentukan Kelompok Usaha Desa

b. DESA PINTAR, DESA SEHAT

- ✚ Satu Desa Satu Puskesmas
- ✚ Pelayanan Kesehatan Reproduksi Gratis
- ✚ Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- ✚ Uang Sekolah , buku dan seragam Gratis SD dan SMP
- ✚ 1000 Beasiswa Prestasi Pelajar dan Mahasiswa
- ✚ Pendidikan Orang Basudara pertukaran pelajar
- ✚ Sarana olahraga Desa

c. 1000 PEREMPUAN DESA MANDIRI

- ✚ Bantuan modal usaha perempuan mandiri
- ✚ Pelatihan usaha perempuan mandiri

d. DESA PRODUKTIF

- ✚ Satu desa satu Produk Unggulan
- ✚ Satu Desa Satu Badan Usaha
- ✚ Smart Desa

e. NELAYAN DAN PETANI UNGGUL

- ✚ Bantuan Kapal & Alat Tangkap
- ✚ Bantuan pupuk , Bibit dan Alat pertanian
- ✚ Bantuan Modal kerja Tani & Nelayan
- ✚ Membangun coldstorage pada zona tangkap
- ✚ Menyediakan akses pasar hasil tangkap.

Seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Buru Selatan, terdapat Program dan kegiatan penunjang prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan di tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
Prioritas 1 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penguatan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Program Pengembangan UMKM	1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi dan UKM
	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
	3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
	4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan

		<p>2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <p>3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>	
	4. Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal
	6. Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
	7. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
	9. Program Perekonomian dan Pembangunan	<p>1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <p>2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</p> <p>3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ B. Perekonomian dan SDA ▪ B. Administrasi Pembangunan B. Pengadaan Barang dan Jasa
Prioritas 2 : Penguatan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Dinas PUPR
	2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<p>1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</p>	Dinas PUPR



	3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	4. Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 6. Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan
	5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah 7. Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan



		<p>9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>10. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</p>	Dinas Perhubungan
	6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD
	7. Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<p>1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota.</p>	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3 : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan dan Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</p> <p>4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan ▪ RSUD



	2. Program Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 	Dinas Pendidikan
	3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 	BKPSDM
	4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian Pemerintahan ▪ Bagian Kesra ▪ Bagian Hukum ▪ Bagian Umum
	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 	Semua OPD



		<p>4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <p>5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>6. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	Semua OPD
		<p>10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</p>	▪ Sekretariat Daerah
		<p>12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>13. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p>	▪ Bagian Protokoler ▪ Sekretariat DPRD
<p>Prioritas 4 : Peningkatan Penguatan Wawasan Kebangsaan Jati Diri Masyarakat serta Pemantapan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Tertib, Taat Hukum dan Harmonis</p>	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
	2. Program Pendaftaran Penduduk	<p>1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Penataan Pendaftaran Penduduk</p> <p>3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3. Program Pemberdayaan Sosial	<p>1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</p> <p>2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p>	Dinas Sosial
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan</p> <p>3. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	Satpol-PP



	5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah 8. Fasilitasi Tugas DPRD 	Sekretariat DPRD
	6. Program Penataan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Penataan Desa 	Dinas Pemberdayaan
	7. Program Pembinaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Prioritas 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	Bappeda dan Litbang
	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 	BPKAD
	3. Penyelenggaraan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 	Inspektorat Daerah
	4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	Semua Kecamatan

		2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Semua Kecamatan
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Sumber : Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengambangan Daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Hasil penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Hasil Peneleahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024**

No.	OPD Pengampu	Jumlah		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Bagian Kesra (Setda)	1	1	1
2.	Dinas Pendidikan	1	2	7
3.	Dinas Kesehatan	1	1	3
4.	Dinas PUPR	3	3	4
5.	Dinas Pertanian	2	3	4
6.	Dinas Perikanan	2	2	2
7.	Dinas Koperasi dan UKM	1	1	1
8.	Dinas Perdagangan	1	1	1
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	1	1
10.	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	1
11.	BKPSDM	2	3	3
Total		16	19	28

Sumber : Sistem Infomasi Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Buru Selatan berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2024, serta mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka rancangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2024 disajikan pada tabel 5.1. berikut :

**Tabel 5.1. Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024**

URAIAN	APBD 2023	RANCANGAN APBD 2024
A. PENDAPATAN DAERAH	637.220.585.000	649.019.711.000
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39.549.746.800	24.124.245.000
- Pajak Daerah	6.700.096.800	5.028.230.000
- Retribusi Daerah	5.331.250.000	4.902.753.000
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.800.000.000	3.000.000.000
- Lain-lain PAD Yang Sah	24.718.400.000	18.712.000.000
2. Pendapatan Transfer/ Perimbangan	632.718.328.000	617.376.728.000
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	617.364.328.000	617.364.328.000
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.354.000.000	12.400.000
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-
- Pendapatan Hibah	-	-
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	637.220.585.000	649.019.711.000
B. BELANJA	694.131.074.800	708.199.854.897
1. Belanja Operasi	495.146.792.118	212.954.767.000
- Belanja Pegawai	231.343.848.000	211.034.767.000
- Belanja Barang dan Jasa	210.861.137.214	231.947.250.935
- Belanja Subsidi	1.920.000.000	1.920.000.000
- Belanja Hibah	36.020.398.200	38.141.427.500
- Belanja Bantuan Sosial	15.001.408.704	17.872.413.700
2. Belanja Modal	76.100.504.241	83.400.217.321
3. Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	5.000.000.000
- Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	5.000.000.000
4. Belanja Transfer	118.883.778.441	118.883.778.441
- Belanja Bagi Hasil	250.000.000	250.000.000
- Belanja Bantuan Keuangan	118.633.778.441	118.633.778.441



JUMLAH BELANJA	694.131.074.800	708.199.854.897
C. PEMBIAYAAN	21.863.000.000	7.500.000.000
1. Penerimaan Pembiayaan	25.363.000.000	10.000.000.000
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.363.000.000	10.000.000.000
2. Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	2.500.000.000
- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.500.000.000	2.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	21.863.000.000	7.500.000.000
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan, 2023

5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2024

Indikasi rencana program tahun 2024 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024. Musrenbang Tahun 2024 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2024, dimana pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan yaitu pihak akademis, dunia usaha, komunitas pemerintah dan masyarakat Buru Selatan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta merupakan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat diuraikan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2023 disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel lampiran 5.1.



5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Tabel 5.2. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Ket.
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35,201,330,000	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.875.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	800.000.000	
1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.300.000.000	
1.3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	800.000.000	
1.4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000	
1.5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000	
1.6	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	200.000.000	
1.7	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	400.000.000	
1.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000	
1.9	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000	
1.10	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	150.000.000	
1.11	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150.000.000	
1.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.500.000.000	
1.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	125.000.000	
2.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.226.330.000	
2.1	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	2.200.000.000	Dinas Pendidikan
2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000	
2.3	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.200.000.000	
2.4	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.000.000.000	
2.5	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.000.000.000	
2.6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.200.000.000	
2.7	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000	
2.8	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	600.000.000	
2.9	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	
2.10	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	400.000.000	
2.11	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000	
2.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	250.000.000	
2.13	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	200.000.000	
2.14	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	
2.15	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000	
2.16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	
2.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.676.330.000	
2.18	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	330.000.000	
2.19	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	600.000.000	
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.100.000.000	
3.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	400.000.000	



3.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	Dinas Pendidikan
3.3	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80.000.000	
3.4	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	120.000.000	
3.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	400.000.000	
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.386.722.500	Dinas Kesehatan
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.386.722.500	
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	330.750.000	
1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	203.643.750	
1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000.000	
1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	180.601.250	
1.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	220.500.000	
1.6	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	238.915.000	
1.7	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	496.125.000	
1.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.500.000.000	
1.9	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	416.745.000	
1.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	238.915.000	
1.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	254.393.750	
1.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	192.937.500	
1.13	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	502.490.000	
1.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.750.000.000	
1.15	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	550.000.000	
1.16	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	22.573.687.500	
1.17	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	600.000.000	
1.18	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	263.375.000	
1.19	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	273.643.750	
1.20	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	400.000.000	
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.150.000.000	Dinas PUPR
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.150.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300.000.000	
1.2	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	250.000.000	
1.3	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	750.000.000	
1.4	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.250.000.000	
1.5	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000	
1.6	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200.000.000	
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	850.000.000	
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	
1.2	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	300.000.000	



IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	245.000.000	Dinas Perumahan
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	45.000.000	
2.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	
V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.291.060.000	Dinas Satpol-PP
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	1.093.860.000	
1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	962.500.000	
1.2	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	131.360.000	
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122.200.000	
2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122.200.000	
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	75.000.000	
3.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	75.000.000	
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	184.518.000	Dinas Satpol-PP
1.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	184.518.000	
1.1	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.518.000	
1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	70.000.000	
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	890.000.000	BPBD
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000.000	
2.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	475.000.000	
2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.2	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	
2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	
2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	70.000.000	
2.7	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	
2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	70.000.000	
3.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	225.000.000	
3.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000	
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	
3.3	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	70.000.000	
4.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	90.000.000	
4.1	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	90.000.000	



7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	340.000.000	
1.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	40.000.000	
2.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	300.000.000	
2.1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	
2.2	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	200.000.000	
2.3	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	
B.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	664.882.000	
1.	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	264.410.200	
1.1	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	40.000.000	
1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	224.410.200	
2.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400.471.800	
2.1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	260.471.800	
2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	40.000.000	
C.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	70.000.000	
1.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	40.000.000	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000	
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.000.000	
TOTAL		76,273,512,500	Dinas Sosial

5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2024 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2024 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Rencana Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2024

No.	OPD	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	271.000.000.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.500.000.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.600.000.000
		Program Penyelenggaraan Jalan	462.805.636.000
2.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.910.000.000
		Program Pengelolaan Pelayaran	198.400.000.000
		Program Pengelolaan Penerbangan	-
3.	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.943.060.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	864.000.000
Total			963.022.696.000

BAB VI

K I N E R J A

P E N Y E L E N G G A R A A N

P E M E R I N T A H A N

D A E R A H



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2023 dapat tercapai

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2021 indikator kinerja daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci yang dilihat dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Sejumlah indikator target yang merupakan panduan dalam pencapaian Visi-Misi Bupati Periode 2021-2026.

6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun Target 2024

No.	Indikator	Kondisi Awal 2020	Tahun Target 2024	Kondisi Akhir 2026
1	2	3	4	5
1	Terkoneksinya sistim perhubungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (245,48 km)	270,03	282,30
		Panjang jalan dilalui roda 4 (385,76 Km)	399,84	407,07
2	Terbangunnya pelabuhan laut (unit)	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut (8 Unit)	8	8
3	Adanya pusat unggulan	NTN(115,00 %)	120,00	122,00
4	pertanian dan perikanan	NTP (139,59 %)	142,40	143,83
		Kontribusi sektor Pertanian Terhadap PDRB (36,60 %)	37,33	37,71



5	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (ada/tidak ada)	Ada	ada
6	Peningkatan Kegiatan Pelatihan Pertanian dan Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan (55,00 %)	80,00	90,00
		Cakupan bina kelompok petani (38,54 %)	71,72	88,40
7	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah	Produksi perikanan tangkap (14,933 ton)	15.234	15.387
		Produksi perikanan budidaya (3,050 ton)	3.111	3.143
		Kontribusi sector pertanian(palawija) terhadap PDRB (3,34 %)	3,50	3,58
8	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah	Luas irigasi dalam kondisi baik (100,00 %)	100,00	100,00
		Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (unit)	100,00	100,00
		Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (5,6 Km)	10	10
		Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan (24 Paket)	45	50
		Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (paket)	5	5
9	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan Daerah	Menurunkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (2,31%)	2,26	2,24
10	Terciptanya Tatakelola pemasaran produk unggulan daerah	Sistem Informasi Geografis Produk Unggulan Daerah (Ada, Tdk ada)	Ada	ada
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan Berbasis Digital (.Jumlah Produk)	2	2
11	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah UMKM (480 unit)	617	677



12	Terbentuknya UMKM berbasis pengembangan bisnis agro- marine	Terwujudnya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan prodak unggulan (paket)	1	1
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA) (Rp 20,59 M)	30,45	36,85
13	Daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio: 239)	292	322
14	Tersedianya lahan untuk perumahan swadaya dan perumahan khusus	Rasio permukiman layak huni (Rasio: 0,86)	1,05	1,15
15	Tersediannya SDM berbasis potensi Unggulan Daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (73,99 %)	76,99	78,54
16	Tingginya angka partisipasi sekolah	APM SD/MI (97,86 %)	98,25	98,45
		APM SMP/MTs(80,19 %)	80,51	80,67
17	Tersedianya lembaga PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA (3.415 siswa)	3.484	3.519
18	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang pendidikan	Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (83,18 %)	84,86	85,71
		Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs (85,11 %)	86,83	87,70
19	Terlayannya kebutuhan kesehatan masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita /1.000 (16,14%)	16,47	16,63
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk /1.000 (0,66 %)	0,80	0,88
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk /1.000 (0,03 %)	0,03	0,03
		Rasio dokter per satuan penduduk /1000 (0,20 %)	0,24	0,27
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (63,60 %)	77,31	85,23
20	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang kesehatan	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (50,00 %)	60,78	67,00
21	Terciptanya Lingkungan bersih	Jumlah rumah tangga bersanitasi (76,10 %)	78,88	80,30



22	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Kunjungan wisata (75,24 %)	76,76	77,53
23	Adanya peraturan daerah tentang Budaya Lokal	Perda Adat (ada/tidak ada)	Ada	ada
24	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengembangan objek wisata unggulan (jumlah)	1	1
25	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata (orang)	6	7
26	Jumlah kegiatan keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk (Rasio: 1,95)	1,99	2,01
27	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, social seni, dan budaya	Persentase organisasi pemuda yang aktif (100 %)	100,00	100,00
28	Terpenuhinya sarana prasarana dan kebutuhan PMKS	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	1	1
29	Terciptanya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor)	100,00	100,00
30	Tersedianya SDM ASN yang profesional	Pesentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM IV, III, II) (%)	28,59	29,74
31	Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas	Pesentase disiplin ASN (%)	100,00	100,00
32	Terciptanya sistim pelayanan satu atap	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak ada)	Ada	ada
33	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP/WDP)	WTP	WTP

Sumber : RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024

Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2024	2026
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,01	5,03	5,05
1.02	Laju inflasi (%)	2,70	3,5	3,5
1.03	PDRB per kapita (Rp.)	22,100,000	23,456,134	24,165,096
1.04	Indeks Gini	0,32	0,28	0,26
1.05	Rasio Penduduk miskin (%)	15,75	15,13	14,83
1.06	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,99	76,99	78,54
1.07	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,31	2,26	2,24
1.08	Rasio penduduk yang bekerja (%)	97,69	97,74	97,76
2 Kesejahteraan Sosial				
2.01 Pendidikan				
2.01.01	Angka melek huruf (%)	97,68	98,07	98,27
2.01.02	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,69	12,73	12,75
2.01.03	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,94	8,43	8,68
2.01.04	Angka Partisipasi Kasar			
	- SD/MI	114,64	100,00	100,00
	- SLTP/MTs	88,48	90,26	91,17
2.01.05	Angka Partisipasi Murni			
	- SD/MI	97,86	98,25	98,45
	- SLTP/MTs	80,19	80,51	80,67
2.02 Kesehatan				
2.03.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%)	99,14	100,00	100,00
2.03.02	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	66,27	67,61	68,28
2.03.03	Persentase Gizi buruk (%)	8,70	6,37	5,45
2.03 Kesempatan Kerja				
2.04.01	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	97,69	98,08	98,28
2.04.02	Angka Partisipasi Kerja (%)	63,53	67,43	69,47
2.04 Angka Kriminalitas				
2.05.01	Rasio Kriminalitas (%)	0,00	0,00	0,00
3 Fokus Seni dan Budaya				
3.01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	3	3	3
3.02	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	2	2	2
B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
1 Pelayanan Urusan Wajib				



1.01	Pendidikan			
1.01.01	SD/MI			
1.01.01.01	Angka Partisipasi Sekolah (%)	98,00	98,98	99,48
1.01.01.02	Rasio Ketersediaan Sekolah	97,77	98,75	99,25
1.01.01.03	Rasio guru/ murid	54,50	55,62	56,18
1.01.01.04	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	52,55	58,55	61,55
1.01.02	SMP/MTs			
1.01.02.01	Angka Partisipasi Sekolah (%)	95,21	96,17	96,65
1.01.02.02	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	94,47	95,42	95,90
1.01.02.03	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per- 10.000)	45,60	51,77	54,88
1.01.02.04	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (%)	97,68	98,07	98,27
1.01.03	Fasilitas Pendidikan			
1.01.03.01	Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	83,18	84,86	85,71
1.01.03.02	Sekolah kondisi bangunan baik SMP/Mts (%)	85,11	86,83	87,70
1.01.04	PAUD			
1.01.04.01	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	3.415	3.484	3.,519
1.01.05	Angka Putus Sekolah			
1.01.05.01	SD/MI (%)	0,75	0.,05	0,01
1.01.05.02	SMP/MTs (%)	4,80	0,30	0,08
1.01.06	Angka Kelulusan			
1.01.06.01	Angka Kelulusan SD/MI (%)	97,00	98,95	100,00
1.01.06.02	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	96,00	99,50	100,00
1.01.06.03	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96,00	100,00	100,00
1.01.06.04	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	95,15	97,07	98,04
1.02	Kesehatan			
1.02.01	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	16,14	16,47	16,63
1.02.02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)	0,66	0,80	0,88
1.02.03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0,03	0,03	0,03
1.02.04	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0,20	0,24	0,27
1.02.05	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	7,39	8,98	9,90
1.02.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	2,40	2,92	3,22
1.02.07	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	91,00	92,83	93,76
1.02.08	Cakupan kelurahan UCI (%)	43,00	43,87	44,31
1.02.09	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	96,31	98,25	99,24
1.02.10	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	50,00	60,78	67,00
1.02.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	63,60	77,31	85,23
1.02.12	Cakupan kunjungan bayi (%)	70,29	85,44	94,20
1.02.13	Cakupan puskesmas (%)	216,67	100,00	100,00
1.02.14	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46,91	79,23	100,00
1.02.15	PHBS (%)	60,50	61,72	62,34
1.03	Pekerjaan Umum			
1.03.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	63,89	75,28	82,64
1.03.02	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	76,10	78,88	80,30
1.03.03	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)	71,54	76,90	79,58
1.03.04	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	385,76	399,84	407,07



1.03.05	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	245,48	270,03	282,30
1.04	Perumahan			
1.04.01	Rasio rumah layak huni	0,12	0,18	0,21
1.04.02	Rasio permukiman layak huni	0,86	1,05	1,15
1.04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	41,61	49,72	53,60
1.04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	31,78	46,53	56,30
1.04.05	Persentase permukiman yang tertata (%)	95,46	96,30	96,66
1.04.06	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	4,54	3,70	3,34
1.04.07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	31,78	21,79	18,05
1.04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5,64	4,59	4,15
1.04.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	73,82	76,51	77,90
1.05	Penataan Ruang			
1.05.01	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	34,00	51,60	55,90
1.05.02	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	13,55	16,26	17,16
1.06	Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.06.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100,00	100,00	100,00
1.06.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100,00	100,00	100,00
1.06.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100,00	100,00	100,00
1.07	Perhubungan			
1.07.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	35.712	43.408	47.857
1.07.02	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/ Terminal Bis	9	9	9
1.07.03	Persentase layanan angkutan darat (%)	8,97	10,90	12,02
1.07.04	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	0,34	0,38
1.07.05	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15.548	18.899	20.836
1.07.06	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	12.995	15.796	17.415
1.07.07	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	7.169	8.714	9.607
1.08	Lingkungan Hidup			
1.08.01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Ada	Ada
1.08.02	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/ Kota	Tidak ada	Ada	Ada
1.08.03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten /Kota	Tidak ada	Ada	Ada



1.08.04	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	78,00	84,00	88,00
1.08.05	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina) / (Org.)	0	4	6
1.08.06	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (ada/tidak ada)	Tidak ada	Ada	Ada
1.08.07	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	45,00	60,00	70,00
1.08.09	Presentase cakupan area pelayanan (%)	0,40	3,00	5,00
1.08.10	Presentase jumlah sampah yang tertangani (%)	74,00	75,50	76,50
1.08.11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	50	80	90
1.09	Pertanahan			
1.09.01	Luas Lahan bersertifikat (%)	0,01	0,13	0,47
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil			
1.10.01	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	94,16	97,00	98,26
1.10.02	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	76,36	80,02	81,23
1.10.03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	62,72	65,01	66,18
1.10.04	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.10.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/ belum)	sudah	sudah	sudah
1.10.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	92,64	96,02	97,76
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.11.01	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,50	57,96	58,19
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1.12.01	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,42	0,51	0,56
1.12.02	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	2	2	3
1.12.03	Rasio akseptor KB (%)	16,87	20,51	22,61
1.12.04	Cakupan peserta KB aktif (%)	54,50	55,60	56,16
1.12.05	Keluarga Sejahtera I (%)	30,40	31,01	31,32
1.13	Sosial			
1.13.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,98	72,25	79,65
1.13.02	Persentase PMKS yang tertangani (%)	58,98	72,25	79,65
1.13.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58,98	72,25	79,65
1.14	Ketenagakerjaan			
1.14.01	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	8,80	10,70	11,79
1.14.02	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,81	5,85	6,45
1.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1.15.01	Persentase koperasi aktif (%)	67,9	76,49	81,15
1.16	Penanaman Modal			



1.16.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	227	383	633
1.16.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	20.594.242.289	30.456.595.506	36.852.481.276
1.16.03	Rasio daya serap tenaga kerja	239	292	322
1.16.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	20,43	30,45	36,85
1.17	Kebudayaan			
1.17.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	0	1	1
1.17.02	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	9	9	9
1.17.03	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10	10	10
1.18	Pemuda dan Olah Raga			
1.18.01	Persentase wirausaha muda (%)	41,33	50,24	55,39
1.18.02	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	0,00	1,00	1,00
1.18.03	Jumlah atlet berprestasi	0	1	1
1.18.04	Jumlah prestasi olahraga	0	1	1
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
1.19.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	1	1	1
1.19.02	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	1	1	1
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.20.01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,21	1,47	1,62
1.20.02	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1,40	1,70	1,88
1.20.03	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada
1.20.04	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	1,78	2,16	2,39
1.20.05	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	0,23	0,23	0,23
1.20.07	Indeks Resiko Bencana (%)	0,0065	0,0051	0,0039
1.20.08	Desa Rawan Bencana (desa)	37	32	29
1.20.09	Desa Tanggu Bencana (desa)	45	50	54
1.20.10	Jumlah Sistem Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada
1.20.11	Maturitas SPIP (Level)	2,29	2,66	2,94
1.20.12	Kapabilitas APIP (Level)	2,00	2,04	2,06
1.21	Ketahanan Pangan			
1.21.01	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras			
1.21.01.01	Ketersediaan pangan utama (%)	0,74	2,14	2,94
1.21.01.02	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	63,05	80,05	100,00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan			
1.22.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	50,00	65,00	90,00
1.22.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (%)	20,00	30,00	50,00
1.22.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	45,00	50,00	85,00
1.22.04	Persentase LSM aktif (%)	10,00	20,00	45,00
1.22.05	Persentase LPM Berprestasi (%)	20,00	25,00	50,00
1.22.06	Persentase PKK aktif (%)	50,00	75,00	100,00
1.22.07	Persentase Posyandu aktif (%)	80,00	95,00	100,00



1.22.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	25,00	30,00	50,00
1.22.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	20,00	30,00	50,00
1.23	Kearsipan			
1.23.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	1,00	2,00	2,00
1.24	Komunikasi dan Informatika			
1.24.01	Cakupan Layanan Telekomunikasi	59,02	82,72	92,72
1.24.02	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)	65,26	67,91	69,27
1.24.03	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15,33	18,63	20,54
1.25	Perpustakaan			
1.25.01	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2,25	2,73	3,02
1.25.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	50	65	75
1.25.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk /1.000	0,013	0,013	0,013
1.25.04	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	65,00	70,36	73,20
2	Pelayanan Urusan Wajib			
2.01	Pertanian			
2.01.01	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB (%)	36,60	37,33	37,71
2.01.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,34	3,50	3,58
2.01.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	1,21	2,81	3,81
2.01.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1,94	1,98	2,00
2.01.05	Cakupan bina kelompok petani (%)	38,54	71,72	88,4
2.01.06	Nilai tukar petani	139,59	142,4	143,83
2.02	Pariwisata			
2.02.01	Kunjungan wisata (%)	75,24	76,76	77,53
2.02.02	Lama kunjungan Wisata (kali)	52	52	52
2.02.03	PAD sektor pariwisata (%)	44,84	45,74	46,20
2.03	Kelautan dan Perikanan			
2.03.01	Konsumsi ikan (ton)	4.000	5.500	5.500
2.03.02	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	55	80	90
2.03.03	Nilai tukar nelayan	115	120	122
2.03.04	Produksi perikanan tangkap (ton)	14.933	15.234	15.387
2.03.05	Produksi perikanan budidaya (ton)	3.050	3.111	3.143
2.04	Perdagangan			
2.04.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,60	7,75	7,83
2.04.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	19,22	23,36	25,76
C	ASPEK DAYA SAING			
1	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	670.614	725.895	755.221
1.02	Pengeluaran konsumsi pangan perkapita (Rp)	380.918	412.318	428.976
1.03	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	289.696	313.576	326.245
1.04	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	1.438.432	1.557.005	1.619.908



1.05	Nilai Tukar Petani	139,59	142,40	143,83
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur			
2.01	Aksesibilitas Daerah			
2.01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	0,34	0,38
2.02	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			
2.02.01	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	35.712	43.408	47.857
2.02.02	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	1.893	2.301	2.537
2.03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			
2.03.01	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	69.208	84.123	92.746
2.03.02	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	3.704	4.503	4.964
2.03.03	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	23.499	28.563	31.490
2.03.04	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	235	286	315
2.03.05	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	1.918	2.332	2.571
2.03.06	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	9.592	11.659	12.854
2.04	Penataan Wilayah			
2.04.01	Luas wilayah kekeringan (%)	6,00	4,89	4,41
2.04.02	Luas wilayah perkotaan (%)	0,80	0,98	1,08
2.05	Hotel dan Restoran			
2.05.01	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (unit)	35	39	41
2.05.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	14	14	14
2.05.03	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel melati (unit)	14	14	14
2.06	Air Bersih, Listrik, Komunikasi dan Informasi			
2.06.01	Persentase RT pengguna air bersih (%)	71,54	76,90	79,58
2.06.02	Rasio ketersediaan daya listrik	1	1	1
2.06.03	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	86,84	88,59	89,48
2.06.04	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon (%)	65,26	67,91	69,27
3	Sumber Daya Manusia			
3.01	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,81	5,85	6,45
3.02	Rasio ketergantungan (%)	61,98	59,78	58,71

Sumber : RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

BAB VII

PENUTUP





BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan berbagai tahapan perencanaan dalam melengkapi dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 yang dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut dengan MUSRENBANG RKPD yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten, kemudian tingkat Provinsi dan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 sendiri merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu, dokumen RKPD juga berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelayanan publik maupun investasi pemerintah, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah kabupaten serta prioritas pembangunan daerah termasuk didalamnya rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Kecamatan, serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.



4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing Kepala OPD.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2024 setiap Kepala (OPD) wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2024.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala OPD, yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Sejalan dengan hal diatas, bahwasanya Pemerintah Daerah juga memperhatikan aspek pembiayaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 yang mencakup semua pembiayaan yang notabeneanya bersumber dari dana pemerintah maupun dari sektor swasta dan/atau masyarakat dalam bentuk skema kemitraan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan satu iklim yang kondusif bagi upaya pengelolaan sumber keuangan daerah secara kontinyu dan berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan tetapi juga ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, disiplin dan kejujuran dari para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Namrole, Maret 2023

TTD

BUPATI BURU SELATAN

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2024**

1. DINAS PENDIDIKAN																			
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Dinas Pendidikan											0			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											0			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											0			
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-					-		0			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-					-		0			
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dok.		30.000.000,00	Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-					-		0			
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1 Org. / Bln.		74.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Lap.		25.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-					-		0			
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Lap.		75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-					-		0			
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket		300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dok.		100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50 Org.		100.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS PENDIDIKAN	

1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Org.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.277.940.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	177.940.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					5 Dok.	75.000.000,00	Semua Kota/Kab.	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Lap.	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.485.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1.135.000.000,00	Kec. Namrole, Desa Labuang	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	7.200.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Lap.	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Lap.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Lap.	7.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	600.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Orang/Tahun Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	500.000.000,00	- Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Elara, Kec. Ambalau, Elara - Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
2	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	51.812.420.000,00							0		
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	28.226.330.000,00					Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					5 Ruang	1.000.000.000,00	Desa Batu Tulis, Kec. Namrole	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					6 Ruang	1.200.000.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa - Kec. Ambalau, Semua Desa - Kec. Leksula, Semua Desa	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					20 Unit	2.000.000.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa - Kec. Waesama,	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					6 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Ruang	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Ruang	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah															
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					5 Paket	500.000.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa - Kec. Leksula, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar															
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					200 Peserta Didik	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa															
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					7 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	

1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik				40 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				12 Satuan Pendidik an	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				107 Satuan Pendidik an	14.676.330.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK NON FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				107 Org.	330.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	600.000.000,00	- Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Slealale, Kec. Leksula - Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				107 Dok.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2.200.000.000,00	- Desa Batu Tulis dan Desa Oki Lama, Kec. Namrole - Desa Waesili, Kec. Waesama - Desa Walunghelat, Kec. Leksula	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				105 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					11 Ruang	1.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	16.986.090.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					4 Ruang	600.000.000,00	- Desa Waemasing, Kec. Waesama - Desa Elara, Kec. Ambalau - Desa Mepa & Desa Terkuri, Kec. Leksula	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					4 Ruang	1.000.000.000,00	- Desa Waemasing, Kec. Waesama - Desa Elara, Kec. Ambalau - Desa Kase & Desa Terkuri, Kec. Leksula	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium														
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					5 Ruang	1.250.000.000,00	- Desa Oki Baru, Kec. Namrole - Desa Waemasing, Kec. Waesama - Desa Elara, Kec. Ambalau - Desa Terkuri & Desa Kase, Kec. Leksula	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					5 Unit	1.450.000.000,00	- Desa Oki Baru, Kec. Namrole - Desa Waetawa, Kec. Waesama - Desa Lumoy, Kec. Ambalau - Desa Kase & Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					10 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				8 Paket	250.000.000,00	- Kec. Ambalau, Semua Desa - Kec. Leksula, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				40 Siswa Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				8 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi i/ Lomba Akademik dan Non Akademik				15 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				30 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				10 Satuan Pendidik an	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				47 Satuan Pendidik an	6.916.090.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK NON FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				47 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100 Dok.	220.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1.250.000.000,00	- Desa Elara, Kec. Ambalau - Desa Terkuri, Kec. Leksula - Desa Waelo, Kec. Fena Fafan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					40 Siswa Paket	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	-	-	5.500.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					12 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
					Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat					8 Unit	600.000.000,00	Kec. Ambalau, Semua Desa	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD														
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					20 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					12 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					50 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					30 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					30 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					125 Satuan Pendidik an	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK NON FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				125 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100 Dok.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0		
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan															
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan															
						Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidik an	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan															
						Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidik an	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK NON FISIK	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
						Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dok.	100.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	DINAS PENDIDIKAN	
J U M L A H											137.455.360.000,00								0	

2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						86.000.000.000,00							92.458.613.051	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.974.232.500,00							89.281.557.176	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						82.974.232.500,00							89.281.557.176	

1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	28.635.904.500,00						-	30.961.847.376		
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	22.152.000,00						Prioritas 5 (Kab.)	-	24.310.125	
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Lap.	22.152.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	24.310.125	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.093.712.500,00						Prioritas 5 (Kab.)	-	9.548.398.125	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			324 Org. / Bln.	9.000.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	9.450.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4 Dok.	93.712.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	98.398.125	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	416.745.000,00						Prioritas 5 (Kab.)	-	437.000.000	
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			30 Org.	416.745.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	437.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.632.403.750,00						Prioritas 5 (Kab.)	-	1.779.023.938	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	214.987.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	225.736.875	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	27.562.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	28.940.625	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	55.125.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	57.881.250	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dok.	34.728.750,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	36.465.188	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	1.430.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	8.126.875.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	8.898.218.750		
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			12 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	2.310.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	826.875.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		868.218.750	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		5.720.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.096.241.250,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	7.802.475.188	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	67.803.750,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		71.193.938	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap.	82.687.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		90.956.250	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	6.945.750.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		7.640.325.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.247.775.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	2.472.421.250	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	105.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		110.250.00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	276.625.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		289.406.250	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				10 Unit	166.150.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		182.765.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	1.700.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		1.890.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	52.677.456.500,00							56.551.349.025	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.890.734.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	20.779.807.400	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	7.531.921.500,00	Desa Waetawa, Kec. Waesama	DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		8.285.113.650	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 Unit	3.182.812.500,00	Kab. Buru Selatan	DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		3.501.093.750	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	8.176.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		8.993.600.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	33.386.722.500,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	35.331.541.625	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2475 Org.	330.750.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		347.287.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2475 Org.	203.643.750,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		224.008.125	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1012 Org.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		220.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1012 Org.	180.601.250,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		198.661.375	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				184 Org.	220.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		231.525.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Org.	238.915.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		262.806.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				4 Dok.	496.125.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		520.931.250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dok.	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		1.650.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dok.	416.745.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		458.419.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dok.	238.915.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		262.806.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dok.	254.393.750,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		279.833.125	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dok.	695.427.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU & NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		764.970.250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dok.	3.750.000.000,00	Kab. Buru Selatan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		3.937.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dok.	550.000.000,00	Desa Fogi, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		577.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				13 Dok.	22.573.687.500,00	Kab. Buru Selatan	DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		23.702.371.87	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				3 Unit	600.000.000,00	- Desa Biloro & Desa Waepandan, Kec. Kepala Madan - Desa Waemulang, Kec. Leksula	DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		660.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Lap.	263.375.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		291.912.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				95 Org.	273.643.750,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		301.008.125	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				77126 Org.	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		440.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi														
						-	-			-	400.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	440.000.000	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dok.	400.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		440.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
						-	-			-	956.970.000,00						-	1.004.818.500	

1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	956.970.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	1.004.818.500		
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			65 Org.	956.970.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	1.004.818.500	DINAS KESEHATAN	
4	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	300.000.000,00						-	330.000.000		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	300.000.000,00				-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	330.000.000	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1 Dok.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	330.000.000	DINAS KESEHATAN	
5	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	403.901.500,00						-	433.542.275		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	214.987.500,00				-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	225.736.875	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 Dok.	214.987.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	225.736.875	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	188.914.000,00				-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	207.805.400	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			4 Dok.	188.914.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK NON FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	207.805.400	DINAS KESEHATAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.012.537.500,00							3.163.164.375	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.012.537.500,00							3.163.164.375	
6	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	3.012.537.500,00						-	3.163.164.375		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	350.000.000,00				-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	367.500.00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK													
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			6 Lap.	350.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	367.500.000	DINAS KESEHATAN	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	2.315.250.000,00				-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	2.431.012.500	

2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				6 Unit	2.315.250.000,00	Kab. Buru Selatan	DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		2.431.012.500	DINAS KESEHATAN	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-			-	347.287.500,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	364.651.875		
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 Unit	347.287.500,00	Kab. Buru Selatan	DAK FISIK	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		364.651.875	DINAS KESEHATAN	
X					NON URUSAN					13.230.000,00								13.891.500	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					13.230.000,00								13.891.500	
7	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	13.230.000,00							13.891.500		
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	13.230.000,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	13.891.500		
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	13.230.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		13.891.500,00	DINAS KESEHATAN	
J U M L A H										86.000.000.000,00							92.458.613.051		

3. RSUD dr. SALIM ALKATIRI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD dr. Salim Alkatiri						25.000.000.000,00							28.082.350.000	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.000.000.000,00							28.082.350.000	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						25.000.000.000,00							28.082.350.000	
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		15.384.300.000,00						-	17.435.350.000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		6.000.000.000,00					Prioritas 4 (Kab.)	-	7.450.000.000	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			109 Org. / Bln.	6.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	7.450.000.000	RSUD
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		400.000.000,00					Prioritas 4 (Kab.)	-	437.000.000	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Org.	400.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	437.000.000	RSUD
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		548.900.000,00					Prioritas 4 (Kab.)	-	630.550.000	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		66.800.000	RSUD
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	113.700.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		119.400.000	RSUD
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	113.700.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		175.000.000	RSUD
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dok.	25.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		26.250.000	RSUD
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Lap.	231.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		243.100.000	RSUD
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1.197.600.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.318.000.000	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		900.000.000	RSUD
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	231.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		243.000.000	RSUD
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	166.600.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		175.000.000	RSUD
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	6.138.800.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	6.444.800.000	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	20.800.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		21.800.000	RSUD
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	118.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		123.000.000	RSUD
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	6.000.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		6.300.000.000	RSUD
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.099.000.000,00			-	Prioritas 2 (Kab.)	-	-	1.155.000.000	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	290.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		305.000.000	RSUD
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	115.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		121.000.000	RSUD
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				15 Unit	694.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		729.000.000	RSUD
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-		-	9.615.700.000,00							10.647.000.000	
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	8.865.700.000,00				Prioritas 2 (Kab.)	-	-	9.976.000.000	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 Unit	2.541.700.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		2.100.000.000	RSUD
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		1.100.000.000	RSUD
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
						Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		900.000.000	RSUD
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				15 Unit	694.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		729.000.000	RSUD
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	2.400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK FISIK	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		3.600.000.000	RSUD
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	330.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		347.000.000	RSUD
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1.100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		1.200.000.000	RSUD
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	750.000.000,00				Prioritas 4 (Kab.)	-	-	671.000.000	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dok.	300.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		243.000.000,00	RSUD

1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit							1 Dok.	450.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		428.000.000,00	RSUD
J U M L A H													25.000.000.000,00						28.082.350.000		

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								65.000.000.000,00							71.500.000.000	
1								65.000.000.000,00							71.500.000.000	
1	03							65.000.000.000,00							71.500.000.000	
1	1	03	01					6.470.737.000,00						-	7.117.414.700	
1	03	01	2.02					3.163.839.000,00				Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	-	3.480.222.900	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							12 Org. / Bln.	3.053.839.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-		-		3.359.222.900	DINAS PUPR
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							1 Lap.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							1 Lap.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		33.000.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							1 Dok.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-		-		33.000.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.03					62.730.000,00				Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	-	68.607.000	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							1 Lap.	62.730.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		68.607.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.05					415.762.500,00				Priortas 2 (Kab.)	-	-	457.338.750	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							15 Org.	415.762.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Priortas 2 (Kab.)	-		457.338.750	DINAS PUPR
1	03	01	2.06					1.402.220.500,00				Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	-	1.542.442.550	

1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	190.789.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	209.868.450	DINAS PUPR
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	417.799.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	459.578.900	DINAS PUPR
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok.	61.050.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	67.155.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap.	732.582.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	805.840.200	DINAS PUPR
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.228.785.000,00				Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	1.351.663.500	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	5.805.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	6.385.500	DINAS PUPR
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap.	29.040.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	31.944.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap.	16.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	18.150.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap.	1.177.440.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	1.295.184.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	197.400.000,00				Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	217.140.000	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	92.400.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	101.640.000	DINAS PUPR
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	105.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	115.500.000	DINAS PUPR
2	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	21.656.763.000,00					-	23.822.835.300	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.456.763.000,00				Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	23.602.835.300	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	5.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	5.500.000.000	DINAS PUPR
1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya										

						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				1 KM	4.300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		4.730.000.000	DINAS PUPR
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		1.650.000.000	DINAS PUPR
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
						Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,10 KM	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		1.100.000.000	DINAS PUPR
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				2 KM	9.156.763.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Priortas 2 (Kab.)	-		10.072.835.30	DINAS PUPR
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dok.	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		550.000.000	DINAS PUPR
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	200.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	-	220.000.000	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dok.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		220.000.000	DINAS PUPR
3	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	550.000.000,00							605.000.000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	550.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	-	605.000.000	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dok.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PUPR
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-		275.000.000	DINAS PUPR
4	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	850.000.000,00							935.000.000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	850.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Priortas 2 (Kab.)	-	-	935.000.000	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				20-30 M ³ /Hari	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PUPR	
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dok.	550.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		605.000.000	DINAS PUPR	
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	2.260.000.000,00						-	2.486.000.000		
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.260.000.000,00					Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	2.486.000.000	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan															
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				400 M	460.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		506.000.000	DINAS PUPR	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				500 Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		770.000.000	DINAS PUPR	
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				300 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PUPR	
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dok.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PUPR	
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				250-500 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		550.000.000	DINAS PUPR	
6	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	2.600.000.000,00						-	2.860.000.000		
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.600.000.000,00					Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	2.860.000.000	
	1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota															
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				1/2 Liter/ Detik	750.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		825.000.000	DINAS PUPR	

1	03	07	2.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				1/3 Liter/ Detik	1.250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		1.375.000.000	DINAS PUPR	
1	03	07	2.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				0 Unit	400.000.000,00	Kec. Waesama, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		440.000.000	DINAS PUPR	
1	03	07	2.01	0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				20-35 Unit	200.000.000,00	Kec. Waesama, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		220.000.000	DINAS PUPR	
7	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-		-	14.700.000.000,00						-	16.170.000.000		
	1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-		-	14.700.000.000,00				-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	16.170.000.000	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		220.000.000	DINAS PUPR	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				13 Dok.	14.400.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		15.840.000.000	DINAS PUPR	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dok.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS PUPR	
8	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-		-	800.000.000,00						-	880.000.000		
	1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	800.000.000,00				-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	880.000.000	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														

						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		880.000.000	DINAS PUPR
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	-	11.252.500.000,00						-	12.377.750.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11.252.500.000,00					Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	12.377.750.000
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dok.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PUPR
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan													
						Panjang Jalan yang Dibangun				1,5 KM	3.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.)	-		3.850.000.000	DINAS PUPR
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan													
						Jumlah Jembatan yang Dibangun				25-50 Jembatan	5.550.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		6.105.000.000	DINAS PUPR
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		880.000.000	DINAS PUPR
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	1.102.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		1.212.750.000	DINAS PUPR
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	-	250.000.000,00						-	275.000.000	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	-	-	250.000.000,00					Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	275.000.000
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Org.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		275.000.000	DINAS PUPR
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	3.610.000.000,00						-	3.971.000.000	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.610.000.000,00					Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	3.971.000.000
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dok.	3.610.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		3.971.000.000	DINAS PUPR
J U M L A H											65.000.000.000,00							71.500.000.000	

5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

	Target	Realisasi Capaian	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	
							Prioritas		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra OPD	Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan						6.500.000.000,00							7.075.250.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.060.000.000,00							4.723.000.000	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.060.000.000,00							4.723.000.000	
1	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-		2.645.000.000,00							3.023.000.000	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-		36.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		41.000.000	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dok.	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		6.500.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		13.500.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dok.	8.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		9.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Lap.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		12.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-		1.836.232.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		2.017.500.000	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Org. / Bln.	1.818.732.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		2.000.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		7.500.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Lap.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-		17.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		30.000.000	
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Org.	17.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		30.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	380.768.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	414.000.000	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		20.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.768.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dok.	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		9.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Lap.	350.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		375.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	80.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	110.000.000	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		75.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		35.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	181.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	274.500.000	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap.	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		25.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		12.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Lap.	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		37.500.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		200.000.000	DINAS PERUMAHAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	114.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	136.000.000	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		100.000.000	DINAS PERUMAHAN	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.000.000	DINAS PERUMAHAN	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		20.000.000	DINAS PERUMAHAN	
2	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	195.000.000,00							-	300.000.000	
	1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	45.000.000,00				Prioritas 5 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	75.000.000		
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana															
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dok.	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		75.000.000	DINAS PERUMAHAN	
	1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00				Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-	-	225.000.000		
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana															
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		225.000.000	DINAS PERUMAHAN	
3	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	1.470.000.000,00							-	425.000.000	
	1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	1.200.000.000,00				Prioritas 2 (Kab.)	-	-	100.000.000		
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dok.	650.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		100.000.000	DINAS PERUMAHAN	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh															
						Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dok.	550.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		0,00	DINAS PERUMAHAN	
	1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	270.000.000,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	325.000.000		
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Lap.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		175.000.000	DINAS PERUMAHAN	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh															

						Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				3 Dok.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		150.000.000	DINAS PERUMAHAN		
4	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	-	250.000.000,00						-	350.000.000			
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	250.000.000,00						-	350.000.000			
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	250.000.000,00	Kec. Leksula, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		350.000.000	DINAS PERUMAHAN		
5	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-	-	500.000.000,00						-	625.000.000			
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-	-	500.000.000,00						-	625.000.000			
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dok.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		75.000.000	DINAS PERUMAHAN		
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian															
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	350.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		400.000.000	DINAS PERUMAHAN		
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		150.000.000	DINAS PERUMAHAN		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.440.000.000,00							2.352.250.000	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.440.000.000,00							2.352.250.000	
6	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	-	1.240.000.000,00						-	2.100.000.000			
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.240.000.000,00						-	2.100.000.000			
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dok.	1.240.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-		2.100.000.000	DINAS PERUMAHAN		
7	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	-	-	200.000.000,00						-	252.250.000			
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	-	-	100.000.000,00						-	100.000.000			

2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				12 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 6 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-	-	100.000.000	DINAS PERUMAHAN
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	-	100.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-	-	152.250.000	
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong													
					Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				12 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) dan Prioritas 2 (Kab.)	-	-	152.250.000,00	DINAS PERUMAHAN
J U M L A H										6.500.000.000,00							7.075.250.000	

6. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran													3.960.000.000,00		4.061.879.000				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													3.960.000.000,00		4.061.879.000				
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													3.960.000.000,00		4.061.879.000				
1	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.484.422.000,00					-	2.569.831.000					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.017.800.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.068.440.000				
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															1.063.440.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															5.000.000	DINAS SATPOL-PP
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Lap.	5.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	5.000.000	DINAS SATPOL-PP			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	140.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	147.000.000				
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															94.500.000	DINAS SATPOL-PP
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	90.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	94.500.000	DINAS SATPOL-PP			
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															52.500.000	DINAS SATPOL-PP
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Org.	50.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	52.500.000	DINAS SATPOL-PP			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	326.822.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	343.016.000				
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															33.791.000	DINAS SATPOL-PP
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	32.322.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	33.791.000	DINAS SATPOL-PP			
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	32.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		33.600.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		6.825.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dok.	6.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		6.300.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		262.500.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	110.500.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	116.025.000	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	75.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		78.750.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		37.275.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	683.300.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	683.475.000	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Lap.	3.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		3.675.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	13.200.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		13.200.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	666.600.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		666.600.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	206.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	211.875.000	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		84.000.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	52.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		55.125.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		4.500.000	DINAS SATPOL-PP
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	65.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		68.250.000	DINAS SATPOL-PP
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		-	1.291.060.000,00							1.307.530.000	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1.093.860.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.100.470.000	
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			6 Dok.	131.360.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		137.970.000	DINAS SATPOL-PP
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan												
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			32 Lap.	962.500.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		962.500.000	DINAS SATPOL-PP
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-		-	122.200.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	128.310.000	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12 Lap.	122.200.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		128.310.000	DINAS SATPOL-PP
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-		-	75.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	78.750.000	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS												
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			3 Lap.	75.000.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		78.750.000	DINAS SATPOL-PP
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-		-	184.518.000,00							184.518.000	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	184.518.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	184.518.000	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12 Lap.	114.518.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		114.518.000	DINAS SATPOL-PP
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran												

							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				7 Org.	70.000.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		70.000.000	DINAS SATPOL-PP
J U M L A H												3.960.000.000,00							4.061.879.000	

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					3.891.738.000,00							4.281.738.000	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.891.738.000,00							4.281.738.000	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.891.738.000,00							4.281.738.000	
1	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			3.001.738.000,00						-	3.131.738.000	
1	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		15.000.000,00			-	-	-	-	16.500.000	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dok.	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	5.500.000	BPBD
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dok.	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	5.500.000	BPBD
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Lap.	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	5.500.000	BPBD
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1.418.738.000,00			-	-	-	1.418.738.000	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Org. / Bln.	1.418.738.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	1.418.738.000	BPBD
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			135.000.000,00			-	-	-	142.000.000	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	51.000.000	BPBD
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Org.	25.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	30.000.000	BPBD
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Org.	60.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	61.000.000	BPBD	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	328.000.000,00			-	-	-	-	343.500.000	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	7.500.000	BPBD	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	27.000.000	BPBD	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	11.000.000	BPBD	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	11.000.000	BPBD	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7 Dok.	25.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	27.000.000	BPBD	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	260.000.000	BPBD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	235.000.000,00			-	-	-	-	255.000.000	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	100.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	110.000.000	BPBD	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	65.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	75.000.000	BPBD	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	70.000.000	BPBD	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	670.000.000,00			-	-	-	-	674.000.000	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Lap.	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	12.000.000	BPBD	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	12.000.000	BPBD	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	650.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	650.000.000	BPBD	

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	200.000.000,00			-	-	-	-	282.000.000		
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	100.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	120.000.000	BPBD	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	12.000.000	BPBD	
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	60.000.000	BPBD	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	40.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	90.000.000	BPBD	
2	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	890.000.000,00							-	1.150.000.000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.000,00			-	-	-	-	-	115.000.000	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			400 Org.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	-	115.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	475.000.000,00			-	-	-	-	-	640.000.000	
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
					Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			20 Org. / Bln.	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	70.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi													
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			1 Dok.	70.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	90.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
					Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			150 Org.	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	-	70.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana													
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi			1 Dok.	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	-	90.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota													

						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Keg.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	95.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	75.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				15 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	75.000.000	BPBD	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				50 Kawasan	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	75.000.000	BPBD	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	-	225.000.000,00			-	-	-	-	280.000.000	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				6 Dok.	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	90.000.000	BPBD	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Org.	75.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-	100.000.000	BPBD	
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Lap.	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	90.000.000	BPBD	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	90.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Keg.	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	115.000.000	BPBD	
J U M L A H											3.891.738.000,00							4.281.738.000	

8. DINAS SOSIAL

	Target	Realisasi Capaian	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana
						Prioritas	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra OPD	Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Sosial						4.500.000.000,00							4.940.164.160	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.500.000.000,00							4.940.164.160	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.500.000.000,00							4.940.164.160	
1	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-		3.325.118.000,00						-	3.559.598.000	
	1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-		2.188.718.000,00				Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.198.718.000	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Org. / Bln.	2.178.718.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		2.188.718.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Lap.	10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-		7.500.000,00				Prioritas 4 (Kab.)	-	-	9.000.000	
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Org.	7.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		9.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-		227.000.000,00				Prioritas 4 (Kab.)	-	-	269.600.000	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		12.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap.	200.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		240.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dok.	3.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.600.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-		10.000.000,00				Prioritas 2 (Kab.)	-	-	12.000.000	
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		12.000.000	DINAS SOSIAL

1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	737.900.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	885.480.000		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap.	5.600.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	6.720.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	9.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				116 Lap.	724.800.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	869.760.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	154.000.000,00				Prioritas 2 (Kab.)	-	-	184.800.000		
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	84.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 2 (Kab.)	-	-	100.800.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 2 (Kab.)	-	-	84.000.000	DINAS SOSIAL
2	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	-	100.000.000,00								120.000.000	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	50.000.000,00				Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	60.000.000		
1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														
						Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				174 Keluarga	50.000.000,00	Kec. Waesama, Semua Desa	-	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	60.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50.000.000,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	60.000.000		
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	60.000.000	DINAS SOSIAL
3	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	-	380.000.000,00								456.000.000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	-	130.000.000,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	156.000.000		
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Org.	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	48.000.000	DINAS SOSIAL

	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Org.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		60.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan															
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Org.	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		48.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-					-	250.000.000,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	300.000.000	
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						25 Org.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		240.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan															
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						25 Org.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		60.000.000	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-					-	624.882.000,00						-	720.566.160	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-					-	224.410.200,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	240.000.000	
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar															
						Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota						126 Org.	224.410.200,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		240.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-					-	400.471.800,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	480.566.160	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						30509 Org.	260.471.800,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		312.566.160	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						3427 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		120.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga															
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Keluarga	40.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		48.000.000	DINAS SOSIAL
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-					-	70.000.000,00						-	84.000.000	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-					-	50.000.000,00				Prioritas 5 (Kab.)	-	-	60.000.000	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						500 Org.	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		48.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															

						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		12.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-		-	20.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	24.000.000	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Org.	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		24.000.000	DINAS SOSIAL
J U M L A H											4.500.000.000,00							4.940.164.160	

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak													5.295.183.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													5.295.183.000	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													279.559.000	
1	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-		-	100.000.000,00					-	100.000.000			
	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	100.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-	-	100.000.000		
2	08	02	2.02	0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
					Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Org.	100.000.000,00	- Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-		100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
2	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-		-	149.559.000,00					-	149.559.000			
	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	100.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-	-	100.000.000		
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dok.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-		100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	49.559.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-	-	49.559.000		

	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan					-	49.559.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-		49.559.000	DINAS PEMBERDAYAAN
3	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	30.000.000,00							30.000.000	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-	-	30.000.000	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dok.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 3 (Kab.)	-		30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.887.449.000,00								5.015.624.000	
4	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.145.824.000,00							3.195.624.000	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.212.724.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.212.724.000	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Org. / Bln.	2.202.724.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		2.202.724.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	150.000.000	
	2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Org.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	439.700.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	439.500.000	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.700.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN	
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dok.	16.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Lap.	325.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		325.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	50.000.000	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	293.400.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	293.400.000	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap.	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	3.600.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		3.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	283.800.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		283.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	50.000.000	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
5	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	191.625.000,00							0	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	191.625.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				7 Unit	191.625.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		0	DINAS PEMBERDAYAAN
6	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	1.125.000.000,00							1.245.000.000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	1.125.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	1.245.000.000	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				81 Dok.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				81 Dok.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN

2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					162 Org.	150.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		175.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					81 Lap.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					79 Dok.	100.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa					81 Lap.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					6 Dok.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 7 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
7	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	-	-	425.000.000,00							575.000.000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	425.000.000,00				Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	575.000.000	
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					10 Dok.	125.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					1 Lap.	100.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					81 Dok.	200.000.000,00	- Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 7 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN
J U M L A H											5.167.008.000,00							5.295.183.000	

10. DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target Akhir	Realisasi Capaian	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
							Target	Sumber	Prioritas		Daftar Indikator		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kode	Kode	Kode	Kode	Periode Renstra	RENJA OPD	Target RENJA	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Jumlah Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
1								4.200.000.000,00							4.648.671.000	
								4.200.000.000,00							4.648.671.000	
2	09							4.200.000.000,00							4.648.671.000	
1	2	09	01			-	-	2.700.304.000,00						-	2.999.080.000	
	2	09	01	2.01		-	-	13.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	14.300.000	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok.	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	7.150.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dok.	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	7.150.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		-	-	1.809.504.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	1.990.200.000	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org. / Bln.	1.797.504.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	1.977.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap.	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	8.250.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap.	4.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	4.950.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05		-	-	120.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	132.000.000	
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Org.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	132.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		-	-	326.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	358.600.000	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	175.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	192.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok.	16.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	17.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Lap.	135.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		148.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	321.800.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	353.980.000		
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Lap.	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		5.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		13.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Lap.	304.800.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		335.280.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	110.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	150.000.000		
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	-	-	150.000.000,00							-	175.000.000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	150.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	175.000.000		
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya															
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		175.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
3	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	1.073.174.455,00							-	1.179.191.000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	-	-	460.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	505.500.000		
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal															
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				6 Lap.	165.000.000,00	Kec. Waesama, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		181.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia															
						Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	85.000.000,00	- Desa Waelikut, Kec. Waesama, - Desa Leksula,	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		93.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota															

						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Lap.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		82.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				7 Dok.	135.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		148.000.000	DINAS KETAHANAN		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	218.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	239.000.000			
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	218.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		239.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	-	-	395.174.455,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	434.691.000			
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Lap.	395.174.455,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		434.691.000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
4	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	-	-	175.230.000,00								184.000.000		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	-	-	-	88.230.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	97.000.000			
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				6 Dok.	88.230.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		97.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	87.000.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	87.000.000			
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Lap.	87.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		87.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
5	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	-	-	101.291.545,00								111.400.000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	101.291.545,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-	-	111.400.000			
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dok.	101.291.545,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Priritas 5 (Kab.)	-		111.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
JUMLAH											4.200.000.000,00									4.648.671.000	

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

					Dinas Lingkungan Hidup					6.180.000.000,00								6.647.124.000	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.180.000.000,00								6.647.124.000	
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.180.000.000,00								6.647.124.000	
1	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				4.425.860.000,00								4.717.570.000	
	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				17.500.000,00								19.250.000	
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		8.250.000	DINAS LH
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Lap.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		11.000.000	DINAS LH
	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					1.383.160.000,00							1.386.160.000	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Org. / Bln.	1.353.160.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		1.353.160.000	DINAS LH
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		16.500.000	DINAS LH
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Lap.	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		16.500.000	DINAS LH
	2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					175.000.000,00							192.500.000	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS LH
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Org.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		82.500.000	DINAS LH
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Org.	50.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS LH
	2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					409.000.000,00							444.900.000	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		11.000.000	DINAS LH
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		22.000.000	DINAS LH
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		15.400.000	DINAS LH
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dok.	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		16.500.000	DINAS LH
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap.	350.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		380.000.000	DINAS LH
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	385.000.000	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS LH
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS LH
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.741.200.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	1.904.760.000	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		7.700.000	DINAS LH
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap.	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		38.500.000	DINAS LH
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	1.699.200.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		1.858.560.000	DINAS LH
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	385.000.000	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		385.000.000	DINAS LH
2	2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	750.000.000,00						-	825.000.000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	33.000.000,00	

	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													
						jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dok.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	33.000.000	DINAS LH	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-		-	720.000.000,00				Prioritas 1 (Kab.)	-	792.000.000,00		
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dok.	150.000.000,00	Semua Kota/ Kab,	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	165.000.000	DINAS LH	
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
						Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dok.	570.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	627.000.000	DINAS LH	
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-		-	295.000.000,00					-	324.500.000,00		
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-		-	180.000.000,00				Prioritas 1 (Kab.)	-	198.000.000		
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dok.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	33.000.000	DINAS LH	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dok.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	165.000.000	DINAS LH	
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-		-	65.000.000,00				Prioritas 1 (Kab.)	-	71.500.000,00		
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Lap.	65.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	71.500.000	DINAS LH	
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-		-	50.000.000,00				Prioritas 1 (Kab.)	-	55.000.000		
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
						jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Keg.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	55.000.000	DINAS LH	

4	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	-	209.140.000,00							-	230.054.000		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	209.140.000,00							-	230.054.000,00		
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dok.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		33.000.000	DINAS LH
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	179.140.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		197.054.000	DINAS LH
5	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	50.000.000,00								-	55.000.000	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000,00							-	55.000.000		
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dok.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS LH
6	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	90.000.000,00								-	99.000.000	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	90.000.000,00							-	99.000.000,00		
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		99.000.000	DINAS LH
7	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	20.000.000,00								-	22.000.000	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	20.000.000,00							-	22.000.000		
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		22.000.000	DINAS LH	
8	2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-		-	340.000.000,00						-	374.000.000		
	2	11	11	2.01			Pengelolaan Sampah	-	-		-	340.000.000,00				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	374.000.000	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan															
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kel.	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		22.000.000	DINAS LH	
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dok.	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		22.000.000	DINAS LH	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS LH	
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota															
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dok.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		220.000.000	DINAS LH	
J U M L A H												6.180.000.000,00								6.647.124.000	

12. DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														3.543.368.000,00			4.654.184.600
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														3.543.368.000,00			4.654.184.600
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														3.543.368.000,00			4.654.184.600

1	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.847.368.000,00						-	3.523.841.600	
	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.718.868.000,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	2.062.641.600
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Org. / Bln.	1.693.868.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	2.032.641.600	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Lap.	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	30.000.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	100.000.000,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	180.000.000
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Org.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	90.000.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Org.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	90.000.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	428.500.000,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	551.360.000
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	7.800.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	60.000.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	0	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	36.000.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dok.	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	14.400.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap.	275.000.000,00	Semua Kota/Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	433.160.000	DINAS CAPIL
	2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	90.000.000
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	90.000.000	DINAS CAPIL

2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	411.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	489.840.000	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10 Lap.	10.700.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		12.840.000	DINAS CAPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Lap.	17.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		21.000.000	DINAS CAPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			48 Lap.	382.800.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		456.000.000	DINAS CAPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	139.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	150.000.000	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		84.000.000	DINAS CAPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		30.000.000	DINAS CAPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		36.000.000	DINAS CAPIL
2	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	-	594.000.000,00							973.943.000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	544.000.000,00							883.943.000	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			3 Dok.	55.000.000,00	Kec. Waesama, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-		90.000.000	DINAS CAPIL
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk													
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			6 Dok.	32.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		38.400.000	DINAS CAPIL
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			6 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		180.000.000	DINAS CAPIL
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
						Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			6 Dok.	32.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		38.400.000	DINAS CAPIL
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
						Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			6 Lap.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		150.143.000	DINAS CAPIL
2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk													

							Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				6 Dok.	250.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	387.000.000	DINAS CAPIL	
	2	12	02	2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			-	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	90.000.000		
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				6 Lap.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	90.000.000	DINAS CAPIL	
3	2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-			-	87.000.000,00						138.400.000		
	2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	-			-	87.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	138.400.000		
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5 Dok.	32.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	38.400.000	DINAS CAPIL	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	100.000.000	DINAS CAPIL	
4	2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-			-	15.000.000,00						18.000.000		
	2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-			-	15.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	18.000.000		
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				10 Dok.	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	18.000.000	DINAS CAPIL	
J U M L A H												3.543.368.000,00							4.654.184.600	

13. DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								5.000.000.000,00							5.500.219.499				
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.000.000.000,00							5.500.219.499				
2	15						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.000.000.000,00							5.500.219.499				
1	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	2.722.115.808,00			-	2.994.546.888			
	2	15	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	59.410.600,00			-	65.351.660			
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dok.	47.406.600,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	52.147.260	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	5.782.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		6.360.200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Lap.	6.222.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		6.844.200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.526.901.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	1.679.090.600	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Og. / Bln.	1.513.021.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		1.664.323.100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Lap.	8.616.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		8.977.100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Lap.	5.264.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		5.790.400	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.153.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	77.168.300	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Org.	70.153.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		77.168.300	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	376.751.208,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	414.426.328	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.086.608,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		3.395.268	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	56.005.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		61.605.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.200.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		17.820.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.183.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		37.601.300	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	19.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		20.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Lap.	248.276.600,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		273.104.260	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	60.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	66.000.000	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25 Unit	60.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	484.900.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	534.110.000	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Lap.	4.900.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	5.390.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Lap.	7.200.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	7.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap.	472.800.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	520.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	144.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	158.400.000	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	129.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	141.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	15.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-	1.377.884.192,00			-		-	-	1.515.672.611	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	750.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	825.000.000	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		25 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		25 Unit	250.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	275.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	39.164.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	43.080.400	
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		3 Lap.	39.164.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	43.080.400	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	158.289.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	174.117.900	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota												

						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Lap.	58.289.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		64.117.900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Lap.	100.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	430.431.192,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	473.474.311	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Lap.	430.431.192,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		473.474.311	DINAS PERHUBUNGAN
3	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-	-	-	900.000.000,00							990.000.000	
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	100.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	110.000.000	
2	15	03	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dok.	100.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-	-	-	-	300.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	330.000.000	
2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				3 Lap.	300.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-	-	500.000.000,00			-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	550.000.000	
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	500.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-		550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H											5.000.000.000,00							5.500.219.499	

14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

								Realisasi	Prakiraan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Komunikasi dan Informatika						3.000.000.000,00							3.125.649.600	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.000.000.000,00							3.125.649.600	
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.968.155.000,00							3.125.649.600	
1	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					2.658.505.000,00							2.785.034.600	
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					7.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		7.700.000	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dok.	7.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		7.700.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					1.312.209.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		1.312.509.000	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Org. / Bln.	1.309.209.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		1.309.209.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	3.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		3.300.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					434.482.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		477.930.200	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		60.500.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		16.500.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.482.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		61.030.200	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	9.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		9.900.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	300.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS KOMINFO
	2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					362.614.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		398.875.400	
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	362.614.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		398.875.400	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	458.200.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	504.020.000,00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	8.400.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		9.240.000	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	100.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	349.800.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		384.780.000	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	84.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	84.000.000	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		84.000.000	DINAS KOMINFO
2	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	-	-	-	198.720.000,00							218.592.000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	198.720.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	218.592.000	
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dok.	52.320.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		57.552.000	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dok.	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		22.000.000	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				8 Org.	126.400.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		139.040.000	DINAS KOMINFO
3	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	-	-	110.930.000,00							122.023.000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	110.930.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	122.023.000	
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dok.	110.930.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		122.023.000	DINAS KOMINFO
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						31.845.000,00								0
4	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	-	-	31.845.000,00								0

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	31.845.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			5 OPD	31.845.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0	DINAS KOMINFO
J U M L A H									3.000.000.000,00							3.125.649.600	

15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						4.500.000.000,00							4.880.631.000	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.850.000.000,00							4.100.631.000	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						368.000.000,00							433.000.000	
1	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	100.000.000,00						-	130.000.000	
	2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	100.000.000,00				-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	130.000.000	
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro											
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro			30 Org.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	130.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	193.000.000,00						-	218.000.000	
	2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000,00				-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	140.000.000	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			30 Org.	55.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	60.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja											
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			30 Org.	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	80.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	68.000.000,00				-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	78.000.000	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja											
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			50 Org.	68.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	78.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
3	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	75.000.000,00						-	85.000.000	
	2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000,00				-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	85.000.000	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											

						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				50 Org.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		85.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.482.000.000,00							3.667.631.000	
4	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	2.153.631.000,00							2.196.631.000	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	36.000.000,00				-	-	-	38.000.000	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dok.	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		19.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		19.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	1.213.631.000,00				-	-	-	1.214.631.000	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Org. / Bln.	1.206.631.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		1.206.631.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		8.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	418.000.000,00				-	-	-	440.000.000	
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		35.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		30.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		19.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		16.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	330.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		340.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	80.000.000,00				-	-	-	90.000.000	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	80.000.000	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-	90.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	322.000.000,00			-	-	-	324.000.000	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Lap.	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	16.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Lap.	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	8.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Lap.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	300.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	90.000.000	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	84.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	-	-	90.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
5	2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	85.000.000,00						95.000.000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	85.000.000,00			-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	95.000.000	
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					25 Unit Usaha	85.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	95.000.000	DINAS KOPERASI& UKM
6	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	95.000.000,00						105.000.000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	95.000.000,00			-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	105.000.000	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					30 Unit Usaha	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	105.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
7	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	151.000.000,00						161.000.000	

	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	161.000.000		
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Org.	151.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	161.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
8	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	300.000.000,00							320.000.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	300.000.000,00				-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	320.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				30 Unit Usaha	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 8 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	320.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
9	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-	543.000.000,00							625.000.000		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	543.000.000,00				-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	625.000.000	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	103.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	115.000.000,00	DINAS KOPERASI & UKM
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	120.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	130.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
	2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil													
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	140.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
	2	17	07	2.01	0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro													
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				1 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	120.000.000	DINAS KOPERASI & UKM
10	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-	154.369.000,00							165.000.000		

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	154.369.000,00			-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	165.000.000		
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro													
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			30 Unit Usaha	154.369.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	165.000.000	DINAS KOPERASI & UKM	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				650.000.000,00								780.000.000	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				650.000.000,00								780.000.000	
11	3	32	02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-	650.000.000,00							-	780.000.000	
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	-	650.000.000,00				-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	780.000.000	
3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi													
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain			1 Dok.	550.000.000,00	Desa Fogi, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	650.000.000	DINAS KOPERASI & UKM	
3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan													
					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi			1 Kawasan Trans.	100.000.000,00	Desa Fogi, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 6 (Prov.) & Prioritas 2 (Kab.)	-	-	130.000.000,00	DINAS KOPERASI & UKM	
J U M L A H									4.500.000.000,00							4.880.631.000		

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						4.022.490.000,00							4.424.739.000		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.014.990.000,00							4.416.489.000		
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.014.990.000,00							4.416.489.000		
1	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.748.420.000,00						-	3.023.262.000		
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.400.000,00				-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	16.940.000	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dok.	7.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	8.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dok.	7.900.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	8.690.000	DINAS PENANAMAN MODAL
	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.563.800.000,00				-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.720.180.000	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Org. / Bln.	1.555.900.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		1.711.490.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	7.900.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		8.690.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	165.000.000	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	25.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		27.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Org.	125.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		137.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	413.450.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	454.795.000	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	27.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		29.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.550.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dok.	10.950.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		12.045.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap.	355.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		390.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	73.150.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	80.465.000	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	37.950.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		41.745.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	35.200.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		38.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL

2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	407.220.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	447.942.000	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Lap.	5.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	6.050.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Lap.	21.120.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	23.232.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			51 Lap.	380.600.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	418.660.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	125.400.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	137.940.000	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			3 Unit	92.400.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	101.640.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	33.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	36.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL
2	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	170.000.000,00							187.000.000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	170.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	187.000.000	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dok.	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	187.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL
3	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	197.000.000,00							216.700.000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	197.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	216.700.000	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2 Dok.	197.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	216.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL
4	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	380.000.000,00							418.000.000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	380.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	418.000.000	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						130.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-			143.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					100 Pelaku Usaha	75.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-			82.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					3 Keg. Usaha	175.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-			192.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL	
5	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		-				-	435.000.000,00									-	478.500.000	
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-				-	435.000.000,00									-	478.500.000	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					20 Keg. Usaha.	160.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-			176.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					216 Pelaku Usaha	200.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-			220.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				19 Keg. Usaha	75.000.000,00	- Kec. Waesama, Semua Desa - Kec. Kepala Madan, Semua Desa - Kec. Leksula, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	82.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL		
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-			-	84.570.000,00						-	93.027.000		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	84.570.000,00				-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	93.027.000	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					3 Dok.	84.570.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa - Kec. Waesama, Semua Desa - Kec. Leksula, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	93.027.000	DINAS PENANAMAN MODAL	
	X					NON URUSAN					7.500.000,00								8.250.000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					7.500.000,00								8.250.000	
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	7.500.000,00							-	8.250.000	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	7.500.000,00				-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	8.250.000	
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Lap.	7.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	8.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL	
J U M L A H											4.022.490.000,00								4.424.739.000	

17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga						4.500.000.000,00							4.795.401.805		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.500.000.000,00							4.795.401.805		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									4.795.401.805		
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	2.722.450.177,00				-	2.860.697.000	

2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	27.500.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	30.250.000	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dok.	16.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		18.150.000	DISPORA
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dok.	11.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		12.100.000	DISPORA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.445.503.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	1.518.528.000	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Org./ Bln.	1.430.503.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		1.502.028.000	DISPORA
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Lap.	15.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		16.500.000	DISPORA
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	120.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	126.000.000	
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Org.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		126.000.000	DISPORA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	426.847.177,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	448.189.000	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	49.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		51.450.000	DISPORA
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	48.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		50.400.000	DISPORA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	31.847.177,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		33.439.000	DISPORA
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dok.	10.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		10.500.000	DISPORA
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Lap.	288.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		302.400.000,00	DISPORA
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	256.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	268.800.000	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	86.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		90.300.000	DISPORA
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	75.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		78.750.000	DISPORA

2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5 Unit	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		99.750.000	DISPORA	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.600.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	380.730.000		
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	19.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		19.950.000	DISPORA	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Lap.	15.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		15.750.000	DISPORA	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				45 Lap.	328.600.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		345.030.000,00	DISPORA	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	88.200.000		
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		88.200.000	DISPORA	
2	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	665.549.823,00							-	714.604.805	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	475.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	505.000.000		
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula															
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Org.	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		330.000.000	DISPORA	
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi															
						Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				25 Org.	175.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		175.000.000	DISPORA	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	190.549.823,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	209.604.805		
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				12 Dok.	190.549.823,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		209.604.805	DISPORA	
3	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	1.092.000.000,00							-	1.199.100.000	

2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			650.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	735.000.000		
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dok.	350.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		367.500.000	DISPORA
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					2 Dok.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		210.000.000	DISPORA
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan														
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					150 Org.	100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		157.500.000,00	DISPORA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	262.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	275.100.000	
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah														
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi					30 Org.	132.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		138.600.000	DISPORA
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota														
					Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan					100 Org.	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		136.500.000	DISPORA
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	52.500.000	
2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota					1 Dok.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		52.500.000	DISPORA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	130.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	136.500.000	
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat					2 Dok.	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		136.500.000	DISPORA
4	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	20.000.000,00			-			-	21.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	20.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	21.000.000	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		21.000.000	DISPORA
J U M L A H											4.500.000.000,00							4.795.401.805	

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

			Target	Realisasi Capaian	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana					
													Prioritas							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra OPD	Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						2.500.000.000,00							3.339.883.781	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.500.000.000,00							3.339.883.781	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.078.350.000,00							2.875.233.781	
1	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-		1.522.350.000,00							2.261.733.781	
	2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-		1.108.850.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.234.410.000	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Org. / Bln.	1.105.600.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		1.226.160.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Lap.	3.250.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		8.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		63.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	111.023.781	
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		19.723.781	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dok.	10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		3.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		66.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-		132.500.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	335.500.000	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		5.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		242.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		88.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	110.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	352.000.000		
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	10.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	100.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		330.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	108.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	228.800.000		
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	108.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		228.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	556.000.000,00			-				613.500.000		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	385.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	423.500.000		
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik															
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	8.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		8.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpus.	30.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		33.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan															
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpus.	60.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		66.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Org.	80.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		88.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka															

						Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				2000 Eks.	200.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eks.	7.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		7.700.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	171.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	190.000.000			
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				6 Lokus	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		66.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				9 Org.	11.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		14.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpus.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									421.650.000,00						464.650.000	
3	2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	61.500.000,00							78.650.000,00			
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	19.800.000			
2	24	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	18.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		19.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	39.500.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	54.450.000			
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		8.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		13.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	24	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dok.	5.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN		
2	24	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dok.	15.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN		

	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.400.000,00	
	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Lap.	4.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	-	360.150.000,00							386.000.000	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	56.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	59.000.000	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Lap.	56.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	59.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	304.150.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	327.000.000	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			45 Pengguna	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	77.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			12 Lap.	234.150.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN
J U M L A H										2.500.000.000,00							3.339.883.781	

19. DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dinas Perikanan						5.000.000.000,00							5.495.650.000		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.000.000.000,00							5.495.650.000		
	3	25						5.000.000.000,00							5.495.650.000		
	1	3	25	01				3.030.000.000,00						-	3.258.650.000		
	3	25	01	2.02				1.550.350.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.660.000.000		
	3	25	01	2.02	0001												
									23 Org. / Bln.	1.540.350.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	1.649.000.000	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005												
									5 Lap.	10.000.000,00	Desa Waenono, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	11.000.000	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05				200.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	225.000.000		

3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						3 Org.	75.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	85.000.000	DINAS PERIKANAN
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan														
3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50 Org.	50.000.000,00	- Desa Labuang, Kec. Namrole - Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	55.000.000	DINAS PERIKANAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
3	25	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3 Org.	75.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	85.000.000	DINAS PERIKANAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	324.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	384.500.000
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	12.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	22.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	25.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						2 Paket	15.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	17.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	12.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	13.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						24 Dok.	15.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	16.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15 Lap.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	175.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	195.000.000
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						16 Unit	50.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						10 Unit	75.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	85.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	586.650.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	589.150.000,00

3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap.	7.250.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	7.250.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapo.	25.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	27.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	554.400.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	554.400.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	194.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	205.000.000	
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	84.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Desa Masnana, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	110.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	11.000.000	DINAS PERIKANAN
2	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	1.310.000.000,00						1.452.000.000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	1.070.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	1.177.000.000	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dok.	70.000.000,00	- Desa Oki Baru, Kec. Namrole - Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Siwar, Kec. Ambalau - desa Biloro, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	77.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													

						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				40 Unit	1.000.000.000,00	- Desa Fatmite, Kec. Namrole - Desa Pasir Putih, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	1.100.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	180.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	205.000.000	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Org.	70.000.000,00	- Desa Oki Baru, Kec. Namrole - Desa Pasir Putih, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	80.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya				4 Kel.	60.000.000,00	- Desa Fatmite, Kec. Namrole - Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Biloro, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	70.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	50.000.000,00	- Desa Labuang, Kec. Namrole - Desa Pasir Putih, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				-	60.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	70.000.000	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)													
						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				4 Layanan	60.000.000,00	Desa Masnana, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	70.000.000	DINAS PERIKANAN
3	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	400.000.000,00						495.000.000	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	100.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	165.000.000	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				30 Kel.	100.000.000,00	- Desa Waefusi, Kec. Namrole -Desa Leksula, Kec. Leksula - Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	165.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	300.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	330.000.000	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					4 Dok.	50.000.000,00	- Desa Waefusi, Kec. Namrole - Desa Waemasing, Kec. Waesama - Desa Leksula, Kec. Leksula - Desa Mangeswaen, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					5 Unit	200.000.000,00	- Desa Leku, Kec. Namrole - Desa Leksula, Kec. Leksula - Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		220.000.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																	
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat					13 Org.	50.000.000,00	- Desa Waefusi, Kec. Namrole - Desa Waemasing, Kec. Waesama - Desa Leksula, Kec. Leksula - Desa Mangeswaen, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS PERIKANAN	
4	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-					-	260.000.000,00							-	290.000.000	
	3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-					-	80.000.000,00							-	90.000.000	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko					4 Dok.	80.000.000,00	- Desa Labuang, Kec. Namrole - Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Pasir Putih, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		90.000.000	DINAS PERIKANAN	
	3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-					-	80.000.000,00							-	90.000.000	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	

						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	80.000.000,00	- Desa Labuang, Kec. Namrole - Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Pasir Putih, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	90.000.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			-	100.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	110.000.000	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	100.000.000,00	- Desa Labuang & Desa Fatmite, Kec. Namrole - Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Pasir Putih, Kec. Kepala Madan - Desa Nalbessy, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	110.000.000	DINAS PERIKANAN	
J U M L A H											5.000.000.000,00						5.495.650.000		

20. DINAS PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
		Dinas Pariwisata						3.499.661.000,00							5.623.765.000			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						369.000.000,00							1.250.000.000			
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						369.000.000,00							1.250.000.000			
1	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-			-	250.000.000,00				-	750.000.000		
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-	250.000.000,00		-	Prioritas 5 (Kab.)	-	750.000.000		
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5 Unit	250.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	750.000.000	DINAS PARIWISATA
2	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-			-	119.000.000,00				-	500.000.000		
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-			-	119.000.000,00		-	Prioritas 5 (Kab.)	-	500.000.000		
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya													
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	119.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	500.000.000	DINAS PARIWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.130.661.000,00							4.373.765.000			
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.130.661.000,00							4.373.765.000			

3	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.255.661.000,00						-	2.548.765.000		
	3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	15.000.000,00						-	Prioritas 5 (Kab.)	15.750.000,00	
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Lap.	15.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	15.750.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.324.361.000,00						-	Prioritas 5 (Kab.)	1.510.500.000	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Org./ Bln.	1.314.361.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	1.500.000.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	10.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	10.500.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	215.000.000,00						-	Prioritas 5 (Kab.)	290.850.000	
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	21.000.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	21.000.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	15.750.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dok.	10.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	12.600.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	10.500.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap.	150.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-	210.000.000	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100.000.000,00						-	Prioritas 5 (Kab.)	104.500.000	
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		52.500.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		52.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	497.300.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	522.165.000	
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	15.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		15.750.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	10.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		10.500.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	472.300.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		495.915.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	104.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	105.000.000	
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		84.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		10.500.000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		10.500.000	DINAS PARIWISATA
4	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	-	-	550.000.000,00			-			-	1.262.500.000	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	150.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	500.000.000	
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dok.	150.000.000,00	Desa Wali, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		500.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	400.000.000,00			-	Prioritas 5 (Kab.)	-	-	762.500.000	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	200.000.000,00	Desa Wali, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		500.000.000	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					1 Unit	100.000.000,00	Desa Wali, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		157.500.000	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Lap.	100.000.000,00	Desa Wali, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		105.000.000	DINAS PARIWISATA	
5	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	275.000.000,00						-	462.500.000		
	3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	275.000.000,00					Prioritas 5 (Kab.)	-	-	462.500.000	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri															
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Dok.	25.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		50.000.000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri															
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					2 Dok.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		210.000.000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Keg.	75.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		150.000.000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					2 Promosi	25.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		52.500.000	DINAS PARIWISATA	
6	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	50.000.000,00						-	100.000.000		
	3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	-	-	50.000.000,00					Prioritas 5 (Kab.)	-	-	100.000.000,00	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata					20 Org.	50.000.000,00	Desa Kamlanglale, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 5 (Kab.)	-		100.000.000	DINAS PARIWISATA	
J U M L A H											3.499.661.000,00							5.623.765.000		

21. DINAS PERTANIAN																			
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Dinas Pertanian										7.211.067.300,00	7.637.574.030			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										7.211.067.300,00	7.637.574.030			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										7.211.067.300,00	7.637.574.030			
1	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-						6.096.067.300,00	6.417.574.030			
	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-				Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	6.000.000,00	7.000.000			
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok.	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	7.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-						4.210.717.300,00	4.311.789.030			
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Org./ Bln.	4.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	4.300.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Lap.	10.717.300,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	11.789.030	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-						50.000.000,00	60.000.000			
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Org.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	60.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-						395.000.000,00	457.500.000			
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	35.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	15.500.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	30.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	16.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	11.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	300.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		350.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	75.000.000,00			-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	85.000.000	
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	30.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		35.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		50.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.150.450.000,00			-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	1.266.495.000	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	10.450.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		11.495.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Lap.	40.000.000,00	- Desa Namrole, Elfule, Kec - Desa Wamsisi, Kec. Waesama - Desa Leksula, Kec. Leksula - Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		45.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	1.100.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		1.210.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	208.900.000,00			-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	229.790.000	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	92.400.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		101.640.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		55.000.000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16.500.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-		18.150.000	DINAS PERTANIAN
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-		-	325.000.000,00						-	370.000.000	

3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-	-	325.000.000,00			-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	370.000.000		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Lap.	200.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	220.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Lap.	125.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	150.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	-	475.000.000,00							505.000.000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	175.000.000,00				-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	190.000.000	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dok.	100.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	110.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dok.	75.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	80.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	300.000.000,00				-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	315.000.000	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	300.000.000,00	- Desa Oki Baru, Kec. Namrole - Desa Waelikut, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	315.000.000	DINAS PERTANIAN	
4	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	-	100.000.000,00							110.000.000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100.000.000,00				-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	110.000.000	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Lap.	100.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	110.000.000	DINAS PERTANIAN	
5	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	-	40.000.000,00							45.000.000		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	-	-	40.000.000,00				-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	-	45.000.000	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

										5 Ha	40.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 3 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	45.000.000	DINAS PERTANIAN	
6	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-	-	175.000.000,00					-	190.000.000		
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	175.000.000,00				Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	190.000.000,00		
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
											4 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	110.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
											3 Unit	75.000.000,00	- Kec. Namrole, Semua Desa - Kec. Waesama, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Prov.) & Prioritas 5 (Kab.)	-	80.000.000	DINAS PERTANIAN
J U M L A H											7.211.067.300,00							7.637.574.030	

22. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan						4.500.000.000,00							4.935.442.000			
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.500.000.000,00							4.935.442.000			
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						4.145.552.000,00							4.525.902.000			
1	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-					-	2.188.214.000			
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	1.475.640.000		
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Org. / Bln.	1.362.589.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	1.461.500.000	DISPERINDAG
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Lap.	14.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	14.140.000	DISPERINDAG
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	150.840.000		
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	65.550.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	58.340.000,00	DISPERINDAG
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Org.	88.780.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	92.500.000	DISPERINDAG
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	90.155.000		
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	38.780.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		42.950.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		12.120.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	11.865.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		12.925.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dok.	20.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		22.160.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	154.840.000,00			-	Prioritas 2 (Kab.)	-	-	158.363.000	
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	87.950.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		89.456.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	66.890.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		68.907.000	DISPERINDAG
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	303.760.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	313.216.000	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	15.560.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		16.816.000,00	DISPERINDAG
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	288.200.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		296.400.000	DISPERINDAG
2	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	347.000.000,00			-		-	-	358.090.000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	258.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	268.200.000,00	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		121.200.000	DISPERINDAG
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	138.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		147.000.000	DISPERINDAG
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	-	-	-	89.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	89.890.000	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dok.	89.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		89.890.000	DISPERINDAG

3	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	-	-	247.410.000,00						-	332.306.000		
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	-	247.410.000,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	332.306.000	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Lap.	77.560.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		79.806.000	DISPERINDAG	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Lap.	169.850.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 2 (Kab.)	-		252.500.000	DISPERINDAG	
4	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	-	284.172.500,00						-	317.670.000		
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	284.172.500,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	317.670.000	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				15 Pelaku Usaha	175.500.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		202.800.000	DISPERINDAG	
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				12 Pelaku Usaha	108.672.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		114.870.000	DISPERINDAG	
5	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	-	-	1.120.245.500,00						-	1.230.407.000		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	-	-	1.120.245.500,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	1.230.407.000	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				250 Unit	1.046.685.500,00	- Kec. Namrole, Semua Desa - Kec. Waesama, Semua Desa - Kec. Leksula, Semua Desa - Kec. Fena Fafan, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		1.142.657.000	DISPERINDAG	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Org.	73.560.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		87.750.000	DISPERINDAG	
6	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	-	74.560.000,00						-	99.215.000		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	74.560.000,00						Prioritas 1 (Kab.)	-	99.215.000	

3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					45 Org.	74.560.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		99.215.000	DISPERINDAG		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									354.448.000,00						409.540.000	
7	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	354.448.000,00							-	409.540.000		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	354.448.000,00				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	409.540.000,00		
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					12 Dok.	92.870.000,00	- Desa Waelikut, Kec. Waesama - Desa Grahwaen, Kec. Leksula - Desa Uneth, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		102.540.000	DISPERINDAG		
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					24 Dok.	140.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		164.000.000	DISPERINDAG		
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					24 Dok.	121.578.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		143.000.000	DISPERINDAG		
J U M L A H											4.500.000.000,00								4.935.442.000		

23. SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Sekretariat Daerah						21.000.000.000,00							23.100.000.000				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.000.000.000,00							23.100.000.000				
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						21.000.000.000,00							23.100.000.000				
1	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			1 Dok.	21.000.000.000,00				-	23.100.000.000			
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			1 Dok.	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	55.000.000	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dok.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		55.000.000	SETDA
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.050.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.055.000.000	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1 Org. / Bln.	10.000.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000.000	SETDA

4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Lap.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		55.000.000	SETDA	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		-	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	55.000.000		
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dok.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		55.000.000	SETDA	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-	200.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	220.000.000		
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		55.000.000	SETDA	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Org. / Bln.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		-	4.525.000.000			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.977.500.000		
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		82.500.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	200.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		550.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dok.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Lap.	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		550.000.000	SETDA	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Lap.	2.600.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		2.860.000.000	SETDA	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		-	1.250.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.375.000.000		
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		330.000.000	SETDA
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	SETDA
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	SETDA
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	SETDA
4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000	SETDA
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.900.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.090.000.000	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	SETDA
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000	SETDA
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	1.600.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		1.760.000.000	SETDA
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.600.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.760.000.000	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		1.100.000.000	SETDA
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	SETDA
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		550.000.000	SETDA
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	500.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	550.000.000	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Org. / Bln.	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		550.000.000	SETDA

4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	-	-	875.000.000,00		-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	962.500.000	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah												
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	875.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	-	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	962.500.000	SETDA
J U M L A H									21.000.000.000,00							23.100.000.000	

24. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1																	
									1.900.000.000,00							1.981.106.703	
4									1.900.000.000,00							1.981.106.703	
4	01								1.900.000.000,00							1.981.106.703	
1	4	01	01						547.914.000,00							585.169.000	
4	01	01	2.01						11.025.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)			11.576.000	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12 Bln.	11.025.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.576.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				193.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)			202.700.000,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bln.	10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.500.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bln.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.500.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bln.	13.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	15.200.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Paket	10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.500.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	155.000.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271.889.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)			298.393.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bln.	13.555.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	14.233.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bln.	8.334.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		9.160.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	72.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	72.500.000	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		72.500.000	BAG. PEMERINTAHAN
2	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	1.352.086.000,00							1.395.937.703	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	1.352.086.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.395.937.703	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Kec.	584.535.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		590.000.000	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Paket	237.551.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		249.437.703	BAG. PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Paket	530.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		556.500.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
J U M L A H											1.900.000.000,00							1.981.106.703	

25. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam														1.027.091.000			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														955.091.000			
4	01	SEKRETARIAT DAERAH														955.091.000			
1	4	01	01				-	579.257.000,00						-	598.257.000				
4	01	01	2.02				-	7.725.000,00						-	8.725.000				
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	7.725.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	8.725.000	BAG. PEREKONOMIAN	
4	01	01	2.05				-	35.000.000,00						-	40.000.000				
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Org.	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	40.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	213.039.000,00			-	-	-	224.039.000	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.017.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	15.017.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.432.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	-	-	13.432.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	10.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	14.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	15.500.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Lap.	163.090.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	170.090.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	16.000.000	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	16.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	308.493.000,00			-	-	-	309.493.000	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Lap.	4.893.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	5.893.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	303.600.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	303.600.000	BAG. PEREKONOMIAN
2	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	352.343.000,00			-	-	-	356.834.000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	352.343.000,00			-	-	-	356.834.000	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dok.	35.834.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	36.834.000	BAG. PEREKONOMIAN
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Lap.	316.509.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	320.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
X					NON URUSAN						72.000.000,00						72.000.000	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						72.000.000,00						72.000.000	

3	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	72.000.000,00						-	72.000.000		
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	72.000.000,00						-	72.000.000		
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		72.000.000,00	BAG. PEREKONOMIAN	
J U M L A H											1.003.600.000,00								1.027.091.000	

26. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDA)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						4.862.431.900,00							5.348.675.030				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						4.862.431.900,00							5.348.675.030				
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						4.862.431.900,00							5.348.675.030				
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	815.972.100,00				-	897.569.250			
4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	6.900.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	7.590.000	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	6.900.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		7.590.000	BAG. KESRA
4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	69.953.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	76.948.300	
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Org.	69.953.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		76.948.300	BAG. KESRA
4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	264.157.100,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	290.572.750	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	64.975.100,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		71.472.600	BAG. KESRA
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.114.500,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		2.325.900	BAG. KESRA
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.456.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		13.701.600	BAG. KESRA
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.999.500,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		10.999.450	BAG. KESRA		
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	174.612.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		192.073.200	BAG. KESRA		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	402.962.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	443.258.200			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	11.552.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		12.707.200	BAG. KESRA		
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	8.700.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		9.570.000	BAG. KESRA		
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap.	2.110.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		2.321.000	BAG. KESRA		
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	380.600.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		418.660.000	BAG. KESRA		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	72.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	79.200.000			
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		79.200.000	BAG. KESRA		
2	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	4.046.459.800,00						-	4.451.105.780			
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	4.046.459.800,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.451.105.780			
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dok.	1.267.259.800,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		1.393.985.780	BAG. KESRA		
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dok.	2.779.200.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.057.120.000	BAG. KESRA		
J U M L A H											4.862.431.900,00									5.348.675.030	

27. BAGIAN HUKUM (SETDA)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1		Bagian Hukum														
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.000.000.000,00						928.339.503	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH							1.000.000.000,00						928.339.503	
1	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	715.522.000,00				-	-	643.577.025	
4	01 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	80.648.000,00			-	Prioritas 3 (Kab.)	-	8.068.151	
4	01 01	2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					25 Org.	52.368.000,00	Desa Elara, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	5.237.323 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2 Org.	28.280.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	2.830.828 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	196.896.000,00			-	Prioritas 3 (Kab.)	-	197.092.896	
4	01 01	2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	12.012.000 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4792 Lembar	9.896.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	9.905.896 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Lap.	175.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	175.175.000 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	365.978.000,00			-	Prioritas 3 (Kab.)	-	366.343.978	
4	01 01	2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					230 Lembar	2.990.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	2.992.990 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						14.988.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	15.002.988 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					41 Org.	348.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	348.348.000 BAG. HUKUM	
4	01 01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	72.000.000,00			-	Prioritas 3 (Kab.)	-	72.072.000	
4	01 01	2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-		72.072.000	BAG. HUKUM		
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-			-	284.478.000,00							-	284.762.478		
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-			-	284.478.000,00							-	284.762.478		
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				10 Dok.	270.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		270.270.000	BAG. HUKUM		
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	14.478.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-		14.492.478	BAG. HUKUM		
J U M L A H											1.000.000.000,00									928.339.503	

28. BAGIAN UMUM (SETDA)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Bagian Umum						12.000.000.000,00							16.657.884.200				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						12.000.000.000,00							16.657.884.200				
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						12.000.000.000,00							16.657.884.200				
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			1 Thn.	8.700.000.000,00			-	13.157.884.200			
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor	-			1 Thn.	11.500.000,00			-	11.500.000			
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok.	11.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	11.500.000	BAG. UMUM	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	-			1 Thn.	21.700.000,00			-	-	21.700.000		
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	21.700.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	21.700.000	BAG. UMUM	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi antar daerah dan pusat	-			7 Org.	104.377.000,00			-	-	-	104.377.000	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Org.	104.377.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	-	-	104.377.000	BAG. UMUM	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatnya daerah	-			12 Bln.	1.934.349.000,00			-	-	-	3.313.270.000	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.999.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	-	-	85.500.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	230.350.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	-	-	430.350.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	117.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	521.020.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	190.500.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dok.	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	52.000.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Lap.	1.300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	2.021.900.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dok.	10.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	12.000.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional dan meningkatnya jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	-			3 Unit	983.500.000,00			-	-	-	1.854.036.500	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	753.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	1.503.696.500	BAG. UMUM
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	230.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	350.340.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat dan alat listrik	-			12 Bln.	1.997.413.500,00			-	-	-	3.005.000.000	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Lap.	46.613.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	40.200.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	471.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	485.000.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	1.479.800.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	2.479.800.000	BAG. UMUM
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya seluruh kebutuhan kantor	-			12 Bln.	684.360.000,00			-	-	-	969.150.700	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	352.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	655.000.700	BAG. UMUM	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	157.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	158.300.000	BAG. UMUM	
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	75.360.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	70.850.000	BAG. UMUM	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	85.000.000	BAG. UMUM	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Menyediakan urusan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta memperhatikan kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati	-			1 Thn.	358.000.000,00			-	-	-	375.000.000		
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	178.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	180.000.000	BAG. UMUM	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Org.	180.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	195.000.000,00	BAG. UMUM	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar daerah dan pusat	-			12 Bln.	2.604.800.500,00			-	-	-	3.503.850.000		
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.529.800.500,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	1.650.450.000	BAG. UMUM	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.075.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	1.853.400.000	BAG. UMUM	
2	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase koordinasi dengan kantor pusat dan daerah lainnya untuk KDH dan WKDH demi kelancaran tugas bupati, wakil bupati dan bagian umum	-			12 Bln.	3.300.000.000,00						3.500.000.000		
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi antar daerah, kecamatan dan pusat	-			12 Bln.	3.300.000.000,00			-	-	-	3.500.000.000		
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dok.	3.300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-	3.500.000.000	BAG. UMUM	
J U M L A H											12.000.000.000,00							16.657.884.200	

29. BAGIAN ORGANISASI (SETDA)																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Bagian Organisasi						1.000.000.000,00							1.100.000.000	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.000.000.000,00							1.100.000.000	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						1.000.000.000,00							1.100.000.000	
1	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000	
	4 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.000.000	
	4 01 01	2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	22.000.000	
	4 01 01	2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	20.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		22.000.000	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	213.522.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	234.874.200	
	4 01 01	2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.022.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		22.024.200	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		16.500.000	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	168.500.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		185.350.000	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	31.828.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-	-	35.010.800	
	4 01 01	2.07 0005 Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	14.328.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		15.760.800	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	17.500.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		19.250.000	BAG. ORGANISASI
	4 01 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	243.650.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-	-	268.015.000	
	4 01 01	2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		5.500.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	34.800.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		38.280.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap.	3.650.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		4.015.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	200.200.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		220.220.000,00	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	72.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-	-	79.200.000	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		79.200.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-				-	409.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-	-	449.900.000	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				46 Dok.	185.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		203.500.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dok.	60.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		66.000.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dok.	79.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		86.900.000	BAG. ORGANISASI
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dok.	85.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) Prioritas 4 (Kab.)	-		93.500.000	BAG. ORGANISASI
J U M L A H											1.000.000.000,00							1.100.000.000	

30. BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER (SETDA)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler							1.200.000.000,00							1.274.100.000	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.182.600.000,00							1.255.900.000	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH							1.182.600.000,00							1.255.900.000	

1	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.182.600.000,00								1.255.900.000	
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.500.000,00					Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	5.500.000	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dok.	5.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	5.500.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	69.600.000,00					Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	48.000.000	
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Org.	69.600.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	48.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	535.000.000,00					Prioritas 1 (Kab.)	-	-	627.000.000	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	55.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	22.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Lap.	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	550.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	336.800.000,00					Prioritas 1 (Kab.)	-	-	338.400.000	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	6.600.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bln.	34.800.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	34.800.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bln.	297.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	297.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	72.000.000,00					Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	72.000.000	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	72.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	163.700.000,00					Prioritas 1 (Kab.)	-	-	165.000.000	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan												
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Lap.	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-	66.000.000	BAG. PROTOKOLER
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan												

						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				1 Lap.	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		33.000.000	BAG. PROTOKOLER									
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																							
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Lap.	73.700.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		66.000.000	BAG. PROTOKOLER									
X					NON URUSAN															17.400.000,00						18.200.000		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															17.400.000,00							18.200.000	
2	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	17.400.000,00							-	18.200.000									
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	17.400.000,00				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	18.200.000									
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.400.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		18.200.000	BAG. PROTOKOLER									
J U M L A H											1.200.000.000,00								1.274.100.000									

31. BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (SETDA)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa												1.322.353.750					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												1.322.353.750					
4	01	SEKRETARIAT DAERAH												1.322.353.750					
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	865.000.000,00			-	935.353.750				
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	9.250.000,00			-	10.637.500				
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok.	9.250.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		10.637.500	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	9.400.000,00			-	10.810.000				
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	9.400.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		10.810.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	138.000.000,00			-	138.000.000				
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Org.	138.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		138.000.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	315.650.000,00			-	380.700.000				
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.250.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		1.400.000,00	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		72.100.000,00	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		24.150.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		4.600.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	3.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.450.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	220.900.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	310.700.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	312.206.250	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	5.800.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		6.500.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap.	2.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.306.250	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	302.400.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		302.400.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	82.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	83.000.000	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		72.000.000	BAG. PENGADAAN
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	10.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	BAG. PENGADAAN
2	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	335.000.000,00			-		-	-	387.000.000	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	335.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	387.000.000	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dok.	175.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		190.000.000	BAG. PENGADAAN

4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dok.	85.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		115.000.000	BAG. PENGADAAN
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Org.	75.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		82.000.000	BAG. PENGADAAN
J U M L A H										1.200.000.000,00							1.322.353.750	

32. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SETDA)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Bagian Administrasi Pembangunan													1.100.000.000,00		1.051.900.000				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													1.100.000.000,00		1.051.900.000				
4	01	SEKRETARIAT DAERAH													1.100.000.000,00		1.051.900.000				
1	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	619.000.000,00					-	558.900.000,00					
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	30.878.000,00				-	-	99.900.000					
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					30.878.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	99.900.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN				
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	287.700.000,00				-	-	153.000.000					
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					140.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	0	BAG. ADM. PEMBANGUNAN				
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					20.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	21.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN				
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	11.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN				
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					7.700.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	0	BAG. ADM. PEMBANGUNAN				
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					110.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	121.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN				
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	285.422.000,00				-	-	290.000.000					
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					11.422.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		0	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		25.000.000,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					250.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		265.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					15.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.000.000	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			2 Unit		15.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
2	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-					481.000.000,00							493.000.000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-					481.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		493.000.000	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					300.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		310.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					181.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		183.000.000	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
J U M L A H											1.100.000.000,00							1.051.900.000	

33. SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Sekretariat DPRD						30.000.000.000,00							33.000.000.000		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30.000.000.000,00							33.000.000.000		
4	02	SEKRETARIAT DPRD						30.000.000.000,00							33.000.000.000		
1	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		21.834.219.000,00						-	24.017.640.900		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2.985.673.000,00					Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	3.284.240.300		
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Org. / Bln.		2.964.673.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	3.261.140.300	SETWAN
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	21.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		23.100.000	SETWAN
4	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	313.665.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	345.031.500	
4	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50 Unit	75.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		82.500.000	SETWAN
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Org.	238.665.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		262.531.500	SETWAN
4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.984.187.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.382.605.700	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	125.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		137.500.000	SETWAN
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		385.000.000	SETWAN
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	650.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		715.000.000	SETWAN
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.955.691.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		2.151.260.100	SETWAN
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		132.000.000	SETWAN
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	28.496.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		31.345.600	SETWAN
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	755.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		830.500.000	SETWAN
4	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	564.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	620.400.000	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	140.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		154.000.000	SETWAN
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	254.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		279.400.000,00	SETWAN
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	170.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		187.000.000,00	SETWAN

4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.238.100.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.461.910.000	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Lap.	21.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		23.100.000	SETWAN
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Lap.	253.200.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		278.520.000	SETWAN
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap.	1.963.900.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		2.160.290.000	SETWAN
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	372.260.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	409.486.000	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit	177.260.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		194.986.000	SETWAN
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	75.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		82.500.000	SETWAN
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	120.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		132.000.000	SETWAN
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	10.281.911.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.310.102.100	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		20 Org. / Bln.	10.031.411.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		11.034.552.100	SETWAN
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		1 Paket	150.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	SETWAN
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		20 Org.	100.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.550.000	SETWAN
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	1.094.423.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.203.865.300	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1 Lap.	194.423.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		213.865.300	SETWAN
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		1 Paket	900.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		990.000.000	SETWAN
2	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	8.165.781.000,00							8.982.359.100	

4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	-	108.709.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	119.579.900		
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dok.	108.709.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	119.579.900	SETWAN
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	-	120.492.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	132.541.200		
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dok.	31.496.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	34.645.600	SETWAN
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dok.	32.396.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	35.635.600	SETWAN
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dok.	19.300.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	21.230.000	SETWAN
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dok.	18.200.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	20.020.000	SETWAN
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dok.	19.100.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	21.010.000	SETWAN
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	18.500.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	20.350.000,00		
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dok.	18.500.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	20.350.000	SETWAN
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	-	1.998.429.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.198.271.900		
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dok.	1.527.320.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.680.052.000	SETWAN
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Org.	364.800.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	401.280.000	SETWAN
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dok.	106.309.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	116.939.900	SETWAN
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	-	4.419.651.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.861.616.100		
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Lap.	1.500.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.650.000.000	SETWAN
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dok.	18.151.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	19.966.100	SETWAN
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														

						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					1 Dok.	2.901.500.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		3.191.650.000	SETWAN	
4	02	02	2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	1.500.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.650.000.000		
4	02	02	2.08	0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1 Dok.	1.500.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		1.650.000.000	SETWAN	
JUMLAH												30.000.000.000,00								33.000.000.000	

34. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							9.846.812.200,00							11.725.070.880					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.846.812.200,00							11.725.070.880					
5	01	PERENCANAAN							8.546.812.200,00							10.075.070.880					
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	5.205.160.800,00				-			5.717.459.850		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	101.317.700,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	111.449.740		
5	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Lap.	101.317.700,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		111.449.740	BAPPELITBANG	
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	2.765.572.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	3.072.129.200		
5	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Org. / Bln.	2.700.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		3.000.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					5 Dok.	50.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		55.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Lap.	15.572.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		17.129.200	BAPPELITBANG	
5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	140.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	154.000.000		
5	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	40.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		44.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Org.	100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	BAPPELITBANG	

5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	964.471.100,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.075.834.910	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	119.673.100,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		131.640.410	BAPPELITBANG
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	134.600.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		148.060.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	55.195.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		60.714.500	BAPPELITBANG
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8 Dok.	22.200.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		24.420.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Lap.	622.803.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		700.000.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	280.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	308.000.000	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		30 Unit	80.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		88.000.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	80.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		88.000.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		50 Unit	120.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		132.000.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	817.800.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	899.246.000	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Lap.	13.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		14.300.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap.	160.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		176.000.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Bln.	6.400.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		6.706.000	BAPPELITBANG
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				54 Org./Lap.	638.400.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		702.240.000	BAPPELITBANG	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	136.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	96.800.000		
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	86.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		41.800.000	BAPPELITBANG	
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	25.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		27.500.000	BAPPELITBANG	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		27.500.000	BAPPELITBANG	
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-			-	1.322.142.300,00							-	1.958.809.420	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-			-	622.142.300,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	726.556.530		
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dok.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		150.000.000	BAPPELITBANG	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 BA	86.434.200,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		95.077.620	BAPPELITBANG	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				4 BA	70.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		77.000.000	BAPPELITBANG	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 BA	201.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		221.100.000	BAPPELITBANG	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dok.	164.708.100,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		183.378.910	BAPPELITBANG	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			-	200.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	528.000.000		
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				45 Org.	100.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		385.000.000	BAPPELITBANG	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		143.000.000	BAPPELITBANG	

5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	300.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	484.252.890		
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		3 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		186.745.020	BAPPELITBANG	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Lap.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		297.507.870	BAPPELITBANG	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	200.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	220.000.000		
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		1 Dok.	100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Dok.	100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	BAPPELITBANG	
3	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	2.019.509.100,00								2.398.801.610	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	394.365.100,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	543.801.610		
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Lap.	76.068.400,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		83.675.240	BAPPELITBANG	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dok.	60.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		66.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Lap.	108.296.700,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		229.126.370	BAPPELITBANG	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Lap.	150.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			-	650.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	720.000.000	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dok.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		270.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Lap.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		175.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dok.	100.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		110.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Lap.	150.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-			-	975.144.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.135.000.000	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dok.	200.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Lap.	150.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		165.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Lap.	300.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		350.000.000	BAPPELITBANG
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dok.	125.144.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		150.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		130.000.000	BAPPELITBANG	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan				1 Lap.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		120.000.000	BAPPELITBANG	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
4	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
							-	-			-	1.300.000.000,00							-	1.650.000.000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																
							-	-			-	900.000.000,00				-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	990.000.000	
5	05	02	2.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Lap.	350.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		385.000.000	BAPPELITBANG	
5	05	02	2.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Lap.	350.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		385.000.000	BAPPELITBANG	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				6 Lap.	200.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		220.000.000	BAPPELITBANG	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																
							-	-			-	250.000.000,00				-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	275.000.000	
5	05	02	2.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Dok.	250.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		275.000.000	BAPPELITBANG	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi																
							-	-			-	150.000.000,00				-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	385.000.000	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Lap.	150.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		385.000.000	BAPPELITBANG	

JUMLAH							9.846.812.200,00							11.725.070.880
--------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

35. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1																		
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						11.628.000.000,00							12.570.200.000			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.628.000.000,00							12.570.200.000			
	5	02	KEUANGAN						11.628.000.000,00						12.570.200.000			
1	5	02	01						7.406.000.000,00					-	8.146.400.000			
	5	02	01	2.01					340.000.000,00				-	-	374.000.000			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
										1 Dok.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	165.000.000	BPKAD
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
										1 Lap.	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	121.000.000	BPKAD
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
										1 Lap.	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	88.000.000	BPKAD
	5	02	01	2.02							4.935.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	5.428.500.000	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
										14 Bln. Org. / Bln.	4.600.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	5.060.000.000	BPKAD
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
										1 Lap.	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	99.000.000	BPKAD
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
										1 Lap.	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	121.000.000	BPKAD
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												

						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dok.	135.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		148.500.000	BPKAD
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	407.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	447.500.000	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Paket	242.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		266.000.000	BPKAD
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Paket	165.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		181.500.000	BPKAD
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.095.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	1.204.500.000	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Thn.	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		27.500.000	BPKAD
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		165.000.000	BPKAD
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Thn.	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		82.500.000	BPKAD
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Thn.	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		104.500.000	BPKAD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Thn.	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		44.000.000	BPKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	610.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		671.000.000	BPKAD
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dok.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		110.000.000	BPKAD
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	465.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	511.500.000	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket	315.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		346.500.000	BPKAD
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		165.000.000	BPKAD
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	106.700.000	

5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Lap.	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	27.500.000	BPKAD		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Thn.	47.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	51.700.000	BPKAD		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Thn.	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	27.500.000	BPKAD		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	67.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	73.700.000		
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Thn.	67.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	73.700.000	BPKAD		
2	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	3.587.000.000,00							-	3.736.800.000	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	1.830.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	1.804.000.000		
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS															
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dok.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	110.000.000	BPKAD		
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dok.	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	99.000.000	BPKAD		
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD															
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dok.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	165.000.000	BPKAD		
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD															
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dok.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	132.000.000	BPKAD		
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD															
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dok.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	132.000.000	BPKAD		
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD															
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dok.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	132.000.000,00	BPKAD		
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD															
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dok.	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	187.000.000,00	BPKAD		
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD															
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dok.	190.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran															

						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dok.	530.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		583.000.000	BPKAD
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dok.	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		99.000.000	BPKAD
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Org.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		165.000.000	BPKAD
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	715.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	786.500.000	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dok.	120.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		132.000.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dok.	115.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		126.500.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dok.	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		143.000.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Lap.	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		143.000.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dok.	125.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		137.500.000	BPKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dok.	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		104.500.000	BPKAD	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	1.042.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	1.146.300.000		
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Lap.	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		104.500.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban															
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dok.	95.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		104.500.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Lap.	142.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		156.300.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		275.000.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Lap.	140.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		154.000.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD															
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dok.	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		110.000.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD															
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dok.	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		121.000.000	BPKAD	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah															

						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dok.	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	121.000.000	BPKAD	
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-			-	635.000.000,00						687.000.000		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			-	635.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	687.000.000		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga													
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dok.	145.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	159.000.000	BPKAD	
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah													
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dok.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	132.000.000	BPKAD	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Lap.	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	143.000.000	BPKAD	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dok.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	121.000.000	BPKAD	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Lap.	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	132.000.000	BPKAD	
J U M L A H											11.628.000.000,00							12.570.200.000	

36. BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1		Badan Pendapatan Daerah						4.300.000.000,00						4.705.150.000		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.300.000.000,00						4.705.150.000		
	5	02 KEUANGAN						4.300.000.000,00						4.705.150.000		
1	5	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					3.629.800.000,00					-	3.970.100.000		
	5	02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					2.450.000.000,00				Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	2.695.000.000		
	5	02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bln. Org. / Bln.	2.450.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	2.695.000.000	BAPENDA
	5	02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					55.000.000,00				-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	60.500.000	

	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Org.	55.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		60.500.000	BAPENDA
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	345.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	389.120.000	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		38.520.000	BAPENDA
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		25.250.000	BAPENDA
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		35.350.000	BAPENDA
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dok.	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		15.000.000	BAPENDA
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Lap.	250.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		275.000.000	BAPENDA
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	45.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	45.000.000	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		45.000.000	BAPENDA
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	650.800.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	696.480.000	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap.	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		500	BAPENDA
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Lap.	52.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		45.000.000	BAPENDA
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	591.800.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		650.980.000	BAPENDA
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	84.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	84.000.000	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		84.000.000	BAPENDA
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			-	670.200.000,00						-	735.050.000	

5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	670.200.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-	-	735.050.000		
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		165.000.000	BAPENDA
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Lap.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		165.000.000	BAPENDA
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				6 kec Obyek Pajak	170.200.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		185.050.000	BAPENDA
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah													
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dok.	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 1 (Kab.)	-		220.000.000	BAPENDA
J U M L A H										4.300.000.000,00							4.705.150.000	

37. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
								4.500.000.000,00								0		
5								4.500.000.000,00								0		
5	03							3.961.741.000,00								0		
1	5	03	01					2.647.800.000,00								0		
5	03	01	2.01					10.000.000,00				-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	0		
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok.	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Org./ Bln.	1.655.276.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun													
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				50 Org.	34.116.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	71.442.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	62.160.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Lap.	300.659.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	
5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	355.147.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Lap.	15.775.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	108.372.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	231.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
2	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	1.313.941.000,00			-				0	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	211.080.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				3 Lap.	157.010.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Dok.	54.070.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	802.861.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dok.	52.861.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dok.	750.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM		
5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	-			-	250.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0			
5	03	02	2.03	0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				25 Org.	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM		
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			-	50.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0			
5	03	02	2.04	0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai															
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Org.	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM		
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					538.259.000,00							0			
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			-	538.259.000,00							0			
5	04	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	-			-	288.259.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0			
5	04	02	2.01	0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				150 Dok.	288.259.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM		
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			-	250.000.000,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0			
5	04	02	2.02	0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta															
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				100 Dok.	250.000.000,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		0	BKPSDM		
J U M L A H											4.500.000.000,00									0	

38. INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Inspektorat Daerah						4.000.000.000,00								0
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						4.000.000.000,00								0
6	01	INSPEKTORAT DAERAH						4.000.000.000,00								0

1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.634.980.500,00								0		
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.794.277.500,00						Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Org./ Bln.	1.780.277.500,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	14.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	91.967.000,00						Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Org.	91.967.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	384.636.000,00						Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	55.272.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.680.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	22.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dok.	6.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Lap.	269.184.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	49.750.000,00						Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	49.750.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	310.850.000,00						Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap.	5.250.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap.	8.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Lap.	84.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap.	213.600.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	3.500.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0		
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.500.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					-	-	877.172.500,00						-	0		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					-	-	695.782.500,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0		
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				45 Lap.	75.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				45 Lap.	186.600.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				17 Lap.	72.078.500,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Lap.	22.117.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				81 Lap.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kesepakatan	35.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				45 Dok.	154.987.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					-	-	181.390.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0		
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				45 Lap.	31.390.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Lap.	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-			-	487.847.000,00							0		
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			-	50.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0		
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	50.000.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-			-	437.847.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 OPD	87.228.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				45 OPD	35.273.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Keg.	315.346.000,00	Kec. Namrole, Semua Desa	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	INSPEKTORAT DAERAH	
J U M L A H											4.000.000.000,00								0	

39. KECAMATAN NAMROLE

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Kecamatan Namrole						1.500.000.000,00							1.537.100.350				
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.500.000.000,00							1.537.100.350				
7	01	KECAMATAN						1.500.000.000,00							1.537.100.350				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum perangkat Daerah	-			13 Org.	1.466.400.000,00			-	1.501.820.350			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			13 Org.	4.000.000,00		-	Prioritas 4 (Kab.)	-	4.800.000		
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dok.	4.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	4.800.000	KEC. NAMROLE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia dan Jumlah Sewa Rumah Jabatan Dinas	-			13 Org.	854.669.000,00		-	Prioritas 4 (Kab.)	-	871.912.800		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Org. / Bln.	849.669.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		866.662.800	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		5.250.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bln.	145.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	148.100.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		20.400.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		5.300.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		4.200.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dok.	6.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		6.000.000,00	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		112.200.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan alat-alat kebersihan Kantor dan jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor yang tersedia	-			12 Bln.	5.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	5.300.000		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	5.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		5.300.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bln.	311.800.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	318.480.000		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Lap.	4.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		4.200.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap.	10.800.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.340.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap.	297.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		302.940.000	KEC. NAMROLE	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				142.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	149.100.000		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		75.600.000	KEC. NAMROLE
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		73.500.000	KEC. NAMROLE
	7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Administrasi Umum perangkat Daerah	-			1 Dok.	3.931.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	4.127.550	
	7	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dok.	3.931.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		4.127.550	KEC. NAMROLE
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-			35 Org./ Hari	7.000.000,00						-	7.350.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta Pelaksanaan Rapat Koordinasi Unsur Muspika Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-			35 Org./ Hari	7.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	7.350.000	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Lap.	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		7.350.000	KEC. NAMROLE
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-			1 Dok.	10.000.000,00						-	10.500.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan & Pemberdayaan Kader PKK di Kecamatan	-			40 Org. / Hari	10.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.500.000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Lap.	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		10.500.000	KEC. NAMROLE
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			35 Org. / Hari	7.000.000,00						-	7.350.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah aparaturnya desa yang mengikuti Bimtek peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-			35 Orang / Hari	7.000.000,00			-	4)Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	7.350.000	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Org.	7.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		7.350.000	KEC. NAMROLE
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	-			65 Org.	9.600.000,00						-	10.080.000	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah	-			18 Desa	9.600.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.080.000	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dok.	9.600.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.080.000	KEC. NAMROLE
JUMLAH											1.500.000.000,00							1.537.100.350	

40. KECAMATAN LEKSULA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Kecamatan Leksula						3.000.000.000,00							3.150.000.000				
7		UNSUR KEWILAYAHAN						3.000.000.000,00							3.150.000.000				
7	01	KECAMATAN						3.000.000.000,00							3.150.000.000				
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		2.884.000.000,00						-	3.028.200.000				
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2.151.274.000,00					Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.258.837.700			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Org. / Bln.	2.151.274.000,00	Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.258.837.700	KEC. LEKSULA
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		212.976.000,00					Prioritas 4 (Kab.)	-	-	223.624.800			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bln.	12.976.000,00	Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	13.624.800	KEC. LEKSULA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bln.	200.000.000,00	Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	210.000.000	KEC. LEKSULA
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		440.750.000,00					Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	462.787.500			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bln.	8.000.000,00	Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	8.400.000	KEC. LEKSULA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bln.	12.000.000,00	Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	12.600.000	KEC. LEKSULA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				62/OB	420.750.000,00	Desa Leksula, Kec. Leksula		-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	441.787.500	KEC. LEKSULA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra OPD	Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Kecamatan Waesama							1.522.971.000,00							1.599.119.549	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.522.971.000,00							1.599.119.549	
	7	01			KECAMATAN							1.522.971.000,00							1.599.119.549	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-		1.464.256.000,00						-	1.537.468.799		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-		9.602.500,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.082.625		
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok.	2.962.500,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.110.625	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	3.738.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.924.900	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Lap.	2.902.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.047.100	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-		932.895.023,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	979.539.774		
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Org. / Bln.	930.170.023,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		976.678.524	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	2.725.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		2.861.250	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-		151.308.477,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	158.873.900		
	7	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.934.477,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		3.081.200	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.400.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		21.420.000	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.076.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		8.479.800	KEC. WAESAMA	
	7	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.598.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		5.877.900	KEC. WAESAMA	

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 Lap.	114.300.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	120.015.000	KEC. WAESAMA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	287.950.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	302.347.500	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Lap.	3.150.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	3.307.500	KEC. WAESAMA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	2 Lap.	12.000.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	12.600.000	KEC. WAESAMA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	37 Lap.	272.800.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	286.440.000	KEC. WAESAMA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	82.500.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	86.625.000	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	3 Unit	75.000.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	78.750.000	KEC. WAESAMA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	7.500.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	7.875.000	KEC. WAESAMA
2	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	21.313.000,00			-				22.378.650	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	21.313.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	22.378.650	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	2 Lap.	21.313.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	22.378.650	KEC. WAESAMA
3	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	26.736.000,00			-				28.072.800	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	26.736.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	28.072.800	
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	36 Org.	11.044.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.596.200	KEC. WAESAMA
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		-	-	-					-					

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				25 Org.	8.139.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		8.545.950	KEC. WAESAMA
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				20 Dok.	7.553.000,00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		7.930.650	KEC. WAESAMA
4	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				-	10.666.000,00						-	11.199.300	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-				-	10.666.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.199.300	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36 Dok.	10.666.000,00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		11.199.300	KEC. WAESAMA
J U M L A H												1.522.971.000,00								1.599.119.549

42. KECAMATAN KEPALA MADAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Kecamatan Kepala Madan						1.750.000.000,00							1.910.199.675						
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.750.000.000,00							1.910.199.675						
7	01	KECAMATAN						1.750.000.000,00							1.910.199.675						
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.662.500.000,00						-	1.796.199.675						
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.000.000						
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	5.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	KEC. KEPALA MADAN	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.032.015.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.084.008.450						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Org. / Bln.	1.018.015.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		1.068.915.750	KEC. KEPALA MADAN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	14.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		15.092.700	KEC. KEPALA MADAN	

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	4.985.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	5.000.000	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Lap.	4.985.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	5.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	127.500.000,00			-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	148.791.225	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7.500.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	7.875.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	15.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	25.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	5.916.225	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Lap.	100.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 2 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	110.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	75.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	102.000.000	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	10.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	12.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	50.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	65.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	15.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	25.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	336.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	352.400.000	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Lap.	2.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.100.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lap.	2.400.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	2.520.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Lap.	10.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.100.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Lap.	321.600.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	337.680.000	KEC. KEPALA MADAN

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	82.000.000,00			-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	94.000.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	72.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 10 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		82.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	10.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		12.000.000	KEC. KEPALA MADAN
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	15.000.000,00							26.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	15.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	26.000.000	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Lap.	5.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		6.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dok.	10.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		20.000.000	KEC. KEPALA MADAN
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	25.000.000,00							36.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	10.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	11.000.000	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Lap.	10.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		11.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	15.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	25.000.000	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			1 Keluarga	15.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		25.000.000	KEC. KEPALA MADAN
4	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	25.000.000,00							28.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	25.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	28.000.000	
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Org.	10.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		12.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dok.	15.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.000.000	KEC. KEPALA MADAN
5	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	22.500.000,00							-	24.000.000	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	22.500.000,00				-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	24.000.000	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dok.	7.500.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		8.000.000	KEC. KEPALA MADAN
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dok.	15.000.000,00	Desa Biloro, Kec. Kepala Madan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		16.000.000	KEC. KEPALA MADAN
J U M L A H											1.750.000.000,00								1.910.199.675	

43. KECAMATAN AMBALAU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								1.639.929.000,00							1.629.929.000					
7								1.272.629.000,00							1.262.629.000					
7	01							1.272.629.000,00							1.262.629.000					
1	7	01	01					1.220.102.000,00						-	1.210.102.000					
	7	01	01	2.01				10.000.000,00				-	Prioritas 4 (Kab.)	-	10.000.000					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok.	5.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		5.000.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	5.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		5.000.000	KEC. AMBALAU
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	926.129.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	916.129.000		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Org. / Bln.	916.129.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		916.129.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	10.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		0	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	20.000.000	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		20.000.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	176.973.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	176.973.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		15.000.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.648.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		10.648.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Lap.	151.325.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		151.325.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	87.000.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		72.000.000	KEC. AMBALAU
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		15.000.000	KEC. AMBALAU
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	7.000.000,00						-	7.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	7.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	7.000.000	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Lap.	7.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		7.000.000	KEC. AMBALAU
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	8.000.000,00						-	8.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	8.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	8.000.000	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

															Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Lap.	8.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		8.000.000	KEC. AMBALAU																							
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-														-							8.000.000																								
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			Prioritas 4 (Kab.)	-		8.000.000																							
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																																														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																75 Org.	8.000.000,00	Desa Siwar, Kec. Ambalau	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		8.000.000	KEC. AMBALAU																					
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-																						29.527.000																							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																				Prioritas 4 (Kab.)	-		29.527.000																						
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																																														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																								9.000.000	KEC. AMBALAU																					
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																																														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																								20.527.000	KEC. AMBALAU																					
	X					NON URUSAN																				367.300.000,00																						367.300.000				
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				367.300.000,00																							367.300.000			
6	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-																							367.300.000																						
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																							7.000.000																						
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																								7.000.000	KEC. AMBALAU																					
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																							360.300.000																						
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																																														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								10.500.000	KEC. AMBALAU																					
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																								349.800.000	KEC. AMBALAU																					
J U M L A H																																																	1.639.929.000,00		1.629.929.000	

44. KECAMATAN FENA FAFAN

									Prakiraan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														Prakiraan Maju Rencana	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kecamatan Fena Fafan						1.690.802.000,00							1.690.802.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.677.764.500,00							1.677.764.500	
7	01	KECAMATAN						1.677.764.500,00							1.677.764.500	
1	7	01	01					1.576.200.800,00							1.576.200.800	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-													
	7	01	01	2.01				9.820.800,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	9.820.800	
	7	01	01	2.01	0001											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok.	4.820.800,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		4.820.800	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.01	0002											
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok.	5.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		5.000.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.02				1.000.452.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.000.452.000	
	7	01	01	2.02	0001											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Org. / Bln.	990.452.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		990.452.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.02	0005											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	10.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.05				15.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	15.000.000	
	7	01	01	2.05	0002											
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-													
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		15.000.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.06				200.500.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	200.500.000	
	7	01	01	2.06	0002											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-													
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		12.000.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.06	0004											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.500.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		12.500.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.06	0005											
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		10.000.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.06	0009											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap.	166.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		166.000.000	KEC. FENA FAFAN

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	10.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.000.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	10.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	10.000.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	287.108.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	287.108.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Lap.	6.758.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	6.758.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap.	280.350.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	280.350.000	KEC. FENA FAFAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	53.320.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	53.320.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	53.320.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	53.320.000	KEC. FENA FAFAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	29.563.700,00			-			-	29.563.700	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	14.563.700,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	14.563.700	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Lap.	14.563.700,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	14.563.700	KEC. FENA FAFAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	15.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	15.000.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Lap.	15.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	15.000.000	KEC. FENA FAFAN
3	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	15.000.000,00			-			-	15.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	15.000.000,00			-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-	-	15.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												

						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				25 Org.	15.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		15.000.000,00	KEC. FENA FAFAN	
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			-	57.000.000,00							57.000.000		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			-	57.000.000,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		57.000.000		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dok.	17.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		17.000.000	KEC. FENA FAFAN	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dok.	40.000.000,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		40.000.000	KEC. FENA FAFAN	
	X					NON URUSAN					13.037.500,00							13.037.500		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					13.037.500,00							13.037.500		
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	13.037.500,00							13.037.500		
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	13.037.500,00				Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		13.037.500		
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.037.500,00	Desa Waekatin, Kec. Fena Fafan	DAU	-	Prioritas 1 (Prov.) & Prioritas 4 (Kab.)	-		13.037.500	KEC. FENA FAFAN	
J U M L A H											1.690.802.000,00							1.690.802.000		

45. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						5.027.054.200,00							5.529.759.619	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.027.054.200,00							5.529.759.619	
	8	01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.027.054.200,00							5.529.759.619	
1	8	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	2.447.468.238,00						-	2.692.215.061	
	8	01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.629.493.000,00				Prioritas 4 (Kab.)	-	-	1.792.442.300	
	8	01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Org./ Bln.	1.614.658.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		1.776.123.800	KESBANGPOL
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap.	14.835.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		16.318.500	KESBANGPOL
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	57.628.800,00			-	Prioritas 1 (Kab.)	-	-	63.391.680	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Org.	57.628.800,00	Semua Kota/ Kab	DAU	-	Prioritas 1 (Kab.)	-		63.391.680	KESBANGPOL
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	278.957.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	306.852.700	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		6.600.000	KESBANGPOL
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.707.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		13.978.250	KESBANGPOL
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.417.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	-	-		8.159.250	KESBANGPOL
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dok.	6.900.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		7.590.000	KESBANGPOL
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Lap.	245.932.000,00	-	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		270.525.200	KESBANGPOL
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	387.389.438,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	426.128.381	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Lap.	4.427.500,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		4.870.250	KESBANGPOL
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Lap.	42.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		46.200.000	KESBANGPOL
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap.	17.561.938,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		19.318.131	KESBANGPOL
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				42 Lap.	323.400.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-		355.740.000	KESBANGPOL
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	94.000.000,00			-	Prioritas 4 (Kab.)	-	-	103.400.000	

	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	92.400.000	KESBANGPOL
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Desa Elfule, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 4 (Kab.)	-	11.000.000	KESBANGPOL
2	8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			-	665.000.000,00						731.500.000	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			-	665.000.000,00			-	Prioritas 3 (Kab.)	-	731.500.000	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Org.	600.000.000,00	Desa Labuang, Kec. Namrole	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	660.000.000	KESBANGPOL
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Org.	65.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	71.500.000	KESBANGPOL
3	8	01	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-			-	1.212.700.000,00						1.333.970.000	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			-	1.212.700.000,00			-	Prioritas 3 (Kab.)	-	1.333.970.000	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												

							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dok.	350.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3)Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis	-		385.000.000,00	KESBANGPOL	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Org.	166.350.000,00		DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-		182.985.000	KESBANGPOL	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Lap.	696.350.000,00	-	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-		765.985.000	KESBANGPOL	
4	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	132.250.000,00							-	145.475.000		
	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	132.250.000,00						Prioritas 3 (Kab.)	-	-	145.475.000	
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dok.	132.250.000,00	-	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-		145.475.000	KESBANGPOL	
5	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	-	-	569.635.962,00							-	626.599.558		

8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	569.635.962,00	-	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	-	626.599.558		
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1 Dok.	92.542.000,00	-	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	101.796.200	KESBANGPOL
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			20 Org.	250.000.000,00	-	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	275.000.000	KESBANGPOL
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			6 Lap.	227.093.962,00	-	DAU	-	Prioritas 3 (Kab.)	-	249.803.358	KESBANGPOL
J U M L A H									5.027.054.200,00						5.529.759.619		